

**KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)**

*STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)*

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG
(P032192001)**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)**

*STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)*

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG
(P032192001)**



**PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**STUDY OF SOCIAL ASPECTS IN
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF
TAKALAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT PLAN
(CASE STUDY OF COASTAL COMMUNITIES AND FISHERMAN
IN MANGARABOMBANG DISTRICT, TAKALAR DISTRICT)**

**ANDI ZULKARNAIM SUMANG
(P032192001)**



**ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STUDY PROGRAM
GRADUATE SCHOOL
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR, INDONESIA
2023**

TESIS

KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR
(STUDI KASUS MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN DI
KECAMATAN MANGARABOMBANG, KABUPATEN TAKALAR)

ANDI ZULKARNAIM SUMANG
P032192001

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Pengelolaan Lingkungan
Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
pada tanggal 13 Desember 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

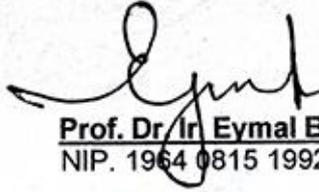
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
NIP. 19750823 200212 1 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.
NIP. 1964 0815 1992 02 1 001

Ketua Program Studi
Pengelolaan Lingkungan Hidup



Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.
NIP. 19650810 199103 1 006

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd.
19661231 199503 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

Nama : Andi Zulkarnaim Sumang
NIM : P032192001
Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup
Judul : Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengembalian alihan tulisan orang lain dengan arahan dari komisi pembimbing **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.** sebagai **pembimbing utama** dan **Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.** sebagai **pembimbing pendamping**. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Desember 2023



Andi Zulkarnaim Sumang
NIM. P032192001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah ‘Azza wa Jalla, yang hanya Dia semata yang berhak disembah, atas berkah, nikmat iman dan Islam serta rahmat-Nya sehingga Tesis dengan judul “**Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)**” dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna mencapai derajat Magister Lingkungan pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, minat studi Sosial-Ekonomi Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam pelaksanaan studi ini penulis banyak mendapatkan baik dari perorangan maupun instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.** dan **Prof. Dr. Ir. Eymal Bahsar Demmallino, M.Si.** selaku komisi penasihat atas bantuan dan bimbingannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
2. **Dr. Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., Dr. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si., dan Dr. Ir. Mahyuddin, M.Si.,** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan serta saran dan kritik yang membangun.
3. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
4. **Prof. Dr. dr. Budu, PH.D.,SP.M(K),M.MedEd.** sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
5. **Dr. Ir. Muhammad Farid Samawi, M.Si.** selaku ketua program studi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah memberikan arahan masukan terkait tesis ini.
6. Staf Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yakni bapak ibu yang telah mendidik penulis dalam menempuh pendidikan di Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Ucapan terima kasih dan limpahan kasih sayang melalui tesis ini penulis sampaikan kepada mereka yang telah berperan serta dalam proses penelitian, penulisan hingga penyelesaian tesis ini. Akhirnya dengan segala hormat dan

kerendahan hati penulis mengucapkan banyak trima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan segala kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyusunan tesis ini. Besar harapan penulis, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama kepada penulis dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 13 Desember 2023



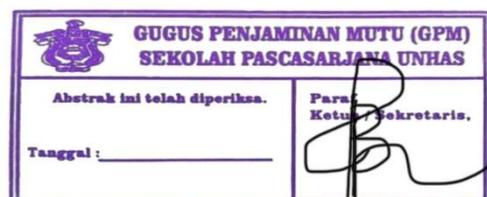
Andi Zulkarnaim Sumang

ABSTRAK

Andi Zulkarnaim Sumang, Kajian Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar) **Dibimbing oleh, Tasrifin Tahara** (Pembimbing Utama) dan **Eymall B. Demmallino** (Pembimbing Anggota)

Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) telah ditetapkan sebagai salah satu dari 18 kawasan industri yang akan dikembangkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pelaksanaan pembangunan ini harus diiringi oleh peningkatan sumber daya manusia, dengan tujuan memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap dampak rencana pembangunan kawasan industri takalar terhadap aspek sosial pembangunan, dan menganalisis dampak yang dianggap prioritas dalam rencana pembangunan KITA. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan menerapkan Focus Group Discussion (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Analisis Dampak Sosial pada tujuh informan. Tujuan utama adalah memahami pandangan dan harapan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan KITA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Laikang dan Desa Punaga memberikan persepsi positif terhadap perencanaan pembangunan KITA. Dari segi demografis, para petani melihat pembangunan ini sebagai peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan melihat potensi bisnis yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi, seiring dengan peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan jumlah penduduk. Aspek ekonomi menekankan pada biaya sosial yang dibayarkan terkait dampak yang dirasakan akibat pembangunan KITA. Dalam konteks sosial-budaya, perbedaan budaya antara masyarakat lokal dan pendatang dianggap tidak akan menyebabkan konflik atau mengganggu kegiatan adat setempat. Analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas dampak rencana pembangunan KITA dapat dibagi menjadi tiga kriteria utama. Demografi, dengan bobot 0,246, menyoroti Komposisi Penduduk sebagai faktor penting. Ekonomi, dengan bobot 0,299, menekankan Tingkat Pendapatan Masyarakat, sementara kriteria Sosial-Budaya, dengan bobot 0,359, menilai Budaya Maudu' Lompoa sebagai aspek yang signifikan. Dengan adanya Kawasan Industri Takalar, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan lapangan kerja dan peluang berusaha. Pembangunan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas umum, memperkuat jaminan hukum, dan menerapkan tindakan lingkungan hidup yang bijaksana. Untuk mencapai tujuan ini, partisipasi aktif dari berbagai pihak dianggap sangat penting dalam pengembangan KITA, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Kajian Dampak Sosial, Kawasan Industri Takalar.

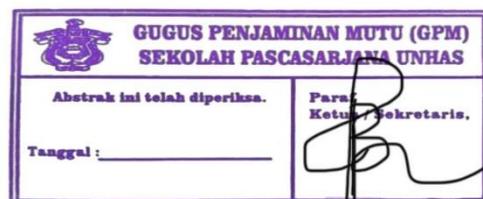


ABSTRACT

Andi Zulkarnaim Sumang. *Study of Social Aspects In Environmental Management of The Takalar Industrial Area Development Plan (Case Study of Coastal Communities And Fishermen In Mangarabombang Sub-District, Takalar District).* **Supervised by Tasrifin Tahara** (Main Advisor) dan **Eymall B. Demmallino** (Member Advisor)

The Development Plan of Takalar Industrial Area (KITA) has been designated as one of the 18 industrial areas to be developed, in accordance with Presidential Regulation No. 18 of 2020 regarding the National Medium-Term Development Plan for the years 2020-2024. The implementation of this development must be accompanied by an enhancement of human resources, with the goal of providing positive benefits to the surrounding community, the majority of whom work as farmers. This research was conducted to understand the community's perception of the impact of Takalar industrial area development plan on social development aspects and to analyze the prioritized impacts in the KITA development plan. The research method used was quantitative descriptive approach, utilizing Focus Group Discussions (FGD), Analytical Hierarchy Process (AHP), and Social Impact Analysis with seven informants. The main objective was to comprehend the views and perceptions of the community regarding the planning of KITA development. The research results indicate that the communities in Laikang Village and Punaga Village have a positive perception of the KITA development plan. Demographically, farmers view this development as an opportunity to increase employment and see potential business opportunities that can improve economic conditions, alongside infrastructure improvement and population growth. The economic aspect emphasizes the social costs paid related to the perceived impacts of the KITA development. In the socio-cultural context, cultural differences between the local and immigrant populations are considered unlikely to cause conflicts or disrupt local customs. The AHP analysis shows that the priority of the impacts of the KITA development plan can be divided into three main criteria. Demographics, with a weight of 0.246, highlight Population Composition as a crucial factor. Economics, with a weight of 0.299, stress the Level of Community Income, while Social-Cultural criteria, with a weight of 0.359, evaluate the Maudu' Lompoa Culture as a significant aspect. With the development of Takalar Industrial Area, the community can enhance social well-being through increased employment and business opportunities. This development is also expected to improve public facilities, strengthen legal assurances, and implement environmentally sound actions. To achieve these goals, active participation from various parties is considered crucial in the development of KITA, ultimately positively impacting the progress of the local community.

Key Words: Society Perception, Social Impact Assessment, Takalar Industrial Area.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL (INGGRIS)	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pembangunan Sosial	2
2.2. Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	7
2.2.1. Demografi	11
2.2.2. Ekonomi	11
2.2.3. Budaya	12
2.3. Perubahan Sosial dan Analisis Dampak Sosial	12
2.3.1. Perubahan Sosial	12
2.3.2. Analisis Dampak Sosial	16
2.4. Lingkungan Sosial Pesisir atau Nelayan	17
2.4.1. Tipe-Tipe Masyarakat Pesisir di Indonesia	18
2.4.2. Pemanfaatan Lingkungan	19
2.4.3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Masyarakat Pesisir	21
2.5. Kawasan Industri	22
2.6. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.1.1. Pengertian Studi Kasus	26
3.1.2. Metode Pendekatan	27
3.2. Lokasi Penelitian	28
3.3. Waktu Penelitian	28
3.4. Informan Penelitian	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	31
3.5.1. Data Primer	31
3.5.2. Data Sekunder	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6.1. Diskusi Grup Sistematis (<i>Focus Group Discussion</i>)	32
3.6.2. Wawancara Mendalam (<i>Indepth Interview</i>)	34
3.6.3. Observasi	35
3.6.4. Dokumentasi	35
3.7. Teknik Analisis Data	35
BAB IV KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
4.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif	40

4.2. Pola Penggunaan Lahan	41
4.3. Kependudukan	42
4.4. Mata Pencaharian	44
4.5. Tingkat Pendidikan	45
4.6. Sarana dan Prasarana	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
5.1. Deskripsi Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)	49
5.1.1. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pra-Konstruksi	52
5.1.2. Rencana Pembangunan KITA Tahap Proses Konstruksi	55
5.1.3. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pasca Konstruksi/Operasional	58
5.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri	61
5.2.1. Persepsi yang Dipengaruhi Faktor Internal	62
5.2.2. Persepsi yang Dipengaruhi Faktor Eksternal	77
5.3. Analisis Dampak Prioritas dari Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)	83
5.3.1. Masyarakat	84
5.3.2. Pemerintah	86
5.3.3. Pemrakarsa	89
5.3.4. Kombinasi Dampak Prioritas Rencana Pembangunan KITA	91
5.4. Kesesuaian antara Harapan Masyarakat dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar	93
5.3.1. Harapan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)	96
5.3.2. Kesesuaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	103
6.1. Kesimpulan	103
6.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Demografi	11
2. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Ekonomi	11
3. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Budaya	12
4. Kebutuhan Data	29
5. Skala Perbandingan Pasangan	37
6. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019	40
7. Penggunaan Lahan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019	41
8. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang (Hektar) 2019	42
9. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019	43
10. Distribusi dan Kepadatan penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019	44
11. Jenis Pekerjaan Utama dan Sampingan Masyarakat di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar, 2019	45
12. Tingkat Pendidikan Responden di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), 2019	46
13. Jumlah Gedung Sekolah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019	47
14. Jumlah sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019	48
15. Pembagian Peruntukan Kawasan Industri Takalar Seluas 3.500 Ha	50
16. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Demografi	65
17. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Ekonomi	69
18. Biaya Sosial terhadap dampak demografis pembangunan kawasan industri Takalar pada Petani/Peternak dan Nelayan Desa Punaga dan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, 2023	74
19. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Sosial-Budaya	77

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Struktur Lingkungan Hidup	9
2. Kerangka Pemikiran	25
3. Rangkaian Penentuan Informan dengan Teknik <i>Snowball Sampling</i>	30
4. Bagan Metode Analisis Data (Miles & Huberman, 1992)	36
5. Abstraksi Susunan Hirarki Permasalahan Saaty (1986)	39
6. Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) di Desa Laikang dan Punaga, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar	50
7. Tahapan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) Sulawesi Selatan	51
8. Diagram Model AHP Dampak Prioritas Rencana Pembangunan KITA ..	84
9. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Masyarakat, 2023	84
10. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Masyarakat, 2023	85
11. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Masyarakat, 2023	86
12. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Pemerintah, 2023	86
13. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemerintah, 2023	87
14. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemerintah, 2023	88
15. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Demografi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023	89
16. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023	89
17. Urutan Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023	90
18. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Demografi, 2023	91
19. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Ekonomi, 2023	91
20. Urutan Kombinasi Dampak Prioritas Berdasarkan Kriteria Keseluruhan Informan pada Sosial-Budaya, 2023	92

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini terus mengalami situasi yang dinamis akibat perubahan eksternal perekonomian global. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga menghadapi perubahan internal terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dengan berbagai persoalan seperti kesenjangan antar daerah, tingginya pengangguran dan kemiskinan. Munculnya ketimpangan tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kuat, mandiri, dan sehat dengan memposisikan sektor industri sebagai penggerak utama.

Perkembangan sektor industri sebagai bagian dari proses pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi dari aspek sosial ekonomi yang meliputi kehidupan masyarakat dari pertanian ke industri dan perdagangan serta terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, sedangkan dari aspek sosial budaya meliputi berkurangnya kekuatan pengikatan eksistensi nilai dan norma budaya karena adanya infiltrasi nilai dan norma-norma budaya baru yang dibawa oleh masyarakat pendatang (Nurkholis, 2015).

Menurut (Kwanda, 2000) kawasan industri adalah tempat di mana kegiatan industri terkonsentrasi dengan infrastruktur dan fasilitas yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan lahan industri. Kawasan industri harus mampu menggerakkan dan mendorong pengembangan industri kecil di sentra-sentra di luar kawasan padat karya melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Mengembangkan klaster-klaster usaha per wilayah dapat menjadikan industri sebagai umpan untuk pengembangan yang tersebar karena kawasan industri yang berkembang dengan baik terletak pada klaster-klaster usaha dan dapat berada di pedesaan dengan wilayah yang cukup

luas untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan industri pedesaan juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara tidak langsung terlibat dalam sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian.

Kementerian Perindustrian (Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Kementerian Perindustrian, 2010) mendorong pengelola kawasan industri di seluruh tanah air untuk terus memperluas salah satu lokasinya di Kabupaten Takalar. Pembangunan Kawasan Industri Takalar akan berlangsung di 2 desa kecamatan Mangarabombang, yaitu Desa Laikang, dan Desa Punaga. Kawasan industri ini akan fokus pada industri daur ulang logam *non-ferrous*, mulai dari pemisahan, pemurnian, peleburan, pengecoran hingga kombinasi komponen. Lokasi ini dinilai berpotensi menjadi kawasan industri metalurgi dengan sejumlah aspek konvergen. Sebagai contoh, wilayah strategis Kabupaten Takalar yang dilalui oleh jalur laut internasional yaitu Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan letaknya yang dekat dengan Pelabuhan Makassar hanya berjarak sekitar 25 km saja. Selain itu, Takalar memiliki wilayah geografis dengan pantai dan tepi laut yang dapat dijadikan sebagai kawasan pengembangan pelabuhan khusus.

Kawasan Industri Takalar telah mendapatkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Takalar, sehingga pengembangan Kawasan Industri Takalar dinilai layak lingkungan. KITA telah masuk dalam proyek strategis nasional di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, 2020. Kawasan industri ini didasarkan pada rencana induk yang sudah ada dan siap dibangun di suatu kawasan peruntukan industri, serta dapat juga melihat kemajuan yang telah dicapai di lapangan sehingga perlu pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang maksimal.

Rencana pembangunan kawasan industri Takalar harus dapat memberikan manfaat baik bagi kawasan maupun masyarakat sekitar. Manfaat yang dihasilkan tidak hanya berupa peningkatan perekonomian masyarakat tetapi juga pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga dapat

dijadikan sebagai kawasan industri yang menjadi industri utama pembangunan daerah tersebut. Peranan kawasan industri yang akan diterima oleh masyarakat perlu dikaji untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan rencana kawasan industri untuk kondisi berikut kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan kawasan industri, penulis telah melakukan penelitian **“Kajian Aspek Sosial Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-budaya masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar?
3. Apakah dampak prioritas yang dirasakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan industri Takalar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengkaji kondisi sosial-budaya masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar.
2. Mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar.
3. Mengetahui dampak prioritas yang dirasakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan industri Takalar.

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua keuntungan dari penelitian ini, yaitu keuntungan teoritis dan keuntungan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperkaya temuan penelitian yang ada dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan,

1. Memberikan wawasan kepada peneliti tentang pedoman kegiatan penelitian dan mengetahui perkembangan kawasan industri di Indonesia,
2. Sebagai salah satu pertimbangan untuk pengembangan kawasan industri lebih lanjut berbasis lingkungan. kesadaran sektor industri,
3. Sebagai informasi tentang inovasi dan perluasan studi sebelumnya Hal ini terkait dengan perkembangan sektor industri di Indonesia, dan
4. Akan dipertimbangkan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi untuk studi serupa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Sosial

Perhatian telah lama diberikan pada aspek sosial pembangunan Indonesia, seperti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pertimbangan aspek-aspek sosial ini dimasukkan dalam peraturan yang menentukan perlunya pengelolaan lingkungan sosial. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia telah lama terlibat dalam dialog mengenai keterkaitan antara keberlanjutan dan lingkungan sosial, berperan sebagai peserta yang aktif dalam penandatanganan perjanjian dan sebagai pendukung berbagai kesepakatan lingkungan tingkat internasional. Partisipasi Indonesia mencakup perjanjian yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972, serta melibatkan diri dalam konferensi yang signifikan pada tahun 1974, 1984, dan 1994. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro.

Semua perjanjian kelas dunia ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia, sumber daya dan lingkungan serta perlunya memperhatikan kesinambungan hubungan antara manusia, sumber daya dan pembangunan. Agenda 21 UNCED bahkan menjelaskan bahwa manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan mempertahankan fungsi eko-sistem. Manusia ditempatkan sebagai sasaran dan tujuan pembangunan dan sekaligus sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Indonesia setuju dan menerima ide-ide yang terkandung dalam perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, penerapan pengelolaan lingkungan sosial masih belum mencapai tingkat yang memadai. Faktor-faktor penyebabnya antara lain melibatkan kurangnya pemahaman umum mengenai konsep lingkungan sosial dan ketidaksepahaman dalam integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan,

baik di tingkat nasional maupun daerah. Terdapat kecenderungan untuk memandang lingkungan alam sebagai entitas terpisah, yang terkadang dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan sosial dan struktur sosial secara keseluruhan.

Partisipasi Indonesia dalam perjanjian pembangunan lingkungan dan sosial internasional menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menempatkan manusia sebagai pusat dan hak mereka untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam (prinsip pertama Agenda 21); Menggarisbawahi hak atas pembangunan dan kewajiban untuk menanggapi secara seimbang kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan mendatang (prinsip ketiga Agenda 21); menggarisbawahi perlunya pengentasan kemiskinan, agar pembangunan berkelanjutan (prinsip kelima Agenda 21); mempromosikan kebijakan demografis yang tepat dan mencegah pola konsumsi dan produksi yang tidak menjamin keberlanjutan (prinsip ke-9 Agenda 21); Prioritas diberikan kepada perempuan, pemuda dan komunitas lokal (Prinsip 20, 21, 22 Agenda 21).

Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Pembangunan Berkelanjutan juga menunjukkan bahwa pemahaman Indonesia akan pentingnya pembangunan sosial bagi masyarakat Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Indonesia setuju dengan Agenda 21 bahwa dunia berada dalam situasi terburuk karena kualitas hidup masyarakatnya tidak terjamin. Indonesia juga percaya bahwa kemiskinan, kesehatan yang buruk, impotensi, dan kelebihan penduduk memperburuk kondisi ekosistem manusia yang merupakan fondasi kehidupan dan kebahagiaan manusia. Indonesia juga harus sepakat bahwa harmonisasi pengelolaan dan pembangunan lingkungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indonesia sepakat bahwa kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan setiap peningkatan kualitas hidup berarti didukung oleh pendidikan, kesehatan, gizi, identitas budaya, perlindungan hukum (HAM) dan masyarakat yang lebih baik. kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan berkelanjutan: manusia sebagai sumber nilai dan esensi sebagai alat atau nilai guna. Sebaliknya, jangan meremehkan orang seperti (Goeltenboth, 1990) menyatakan keprihatinan bahwa masyarakat adat di hutan lindung sering diperlakukan lebih buruk daripada spesies yang terancam punah. Filosofi pembangunan

berkelanjutan ini mirip dengan model "ekologi dalam" Fritjof Capra, karena tidak memisahkan manusia dari alam. Dunia tidak dilihat sebagai kumpulan objek diskrit, tetapi sebagai jaringan fenomena yang secara fundamental terkait dan saling bergantung (Capra, 2001). Menurut perspektif kedua ini, rencana pembangunan dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang memastikan tidak adanya pihak yang merugi, baik manusia maupun alam. Keberlanjutan dalam konteks ini merujuk pada bentuk pembangunan yang memungkinkan manusia untuk bertahan dan berkembang tanpa merusak ekosistem alam. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekologis. Dengan kata lain, rencana pembangunan yang berkelanjutan diarahkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan manusia, keberlanjutan ekologi, serta nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya. (Soemarwoto, 1991).

2.2. Aspek Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan selalu mengejar peningkatan kualitas hidup masyarakat dan didasarkan pada prinsip kelangsungan kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dalam konsep ini, manusia dilihat dalam semua aspek kehidupannya, bersama dengan komponen lingkungan alam dan lingkungan buatan, sebagai satu kesatuan yang dikenal sebagai lingkungan hidup. Lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 1997, merujuk pada kesatuan ruang yang mencakup segala benda, daya, keadaan, makhluk hidup (termasuk manusia) dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Lebih lanjut, pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021 dan Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009, merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan mengatasi kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan seperti perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan juga dianggap sebagai suatu sistem yang utuh, terdiri dari subsistem-subsystem yang saling terhubung, bergantung satu sama lain, dan dapat dioperasikan, membentuk kesatuan ekosistem secara total.

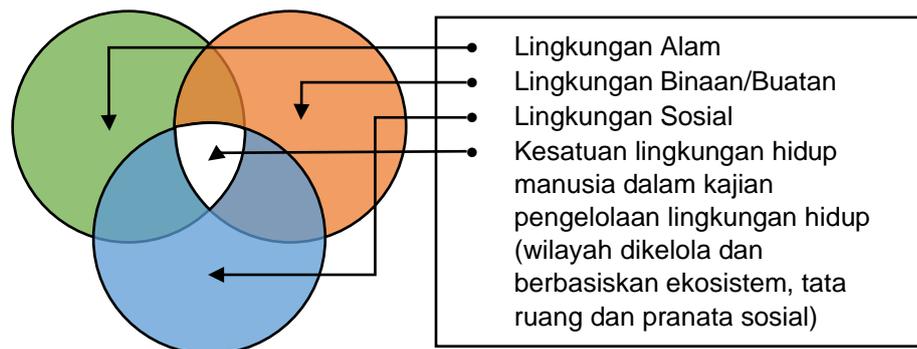
Dengan pemahaman sistematis tersebut, setelah membagi lingkungan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menggambarkan unsur-unsur lingkungan, maka analisis juga harus mencerminkan hubungan yang tidak terpisahkan dari unsur-unsur lingkungan tersebut (Capra, 2001). Oleh karena itu lingkungan sosial, yang dianggap sebagai bagian dari lingkungan hidup, adalah suatu kawasan di mana terdapat banyak jenis interaksi sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda dan lembaga-lembaganya, simbol-simbol dan nilai-nilai dan norma-norma yang mapan, baik alam maupun lingkungan buatan atau buatan. untuk lingkungan. Lingkungan (spasial). Pengertian lingkungan sosial ini mempertimbangkan hubungan antara semua komponen lingkungan; tidak hanya interaksi sosial, simbol, nilai dan norma, tetapi juga hubungannya dengan unsur lingkungan lainnya, alam dan lingkungan binaan atau buatan manusia.

Mengingat kompleksitas unsur-unsur dan hubungan unsur-unsur dalam suatu lingkungan sosial tertentu, wajar jika tidak semua orang dan semua kelas memahami apa yang disebut lingkungan sosial. Meski dikembangkan lebih dalam, ada berbagai konsep teknis yang mungkin tampak lebih rumit. Namun, hal ini harus dilakukan dengan melibatkan dan menyikapi seluruh lingkungan sosial, yang dapat dikelola melalui proses pengelolaan lingkungan sosial. Secara teoritis, pengelolaan lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengendalikan dan mengevaluasi yang dianggap komunikatif;

- a. Resistensi sosial (daya dukung dan kapasitas sosial lokal);
- b. Keadaan ekosistem;
- c. Tata letak;
- d. Kualitas sosial lokal (karakteristik objektif dan subjektif);
- e. Sumber daya sosial (kekuasaan) dan batasan (ketenangan) (di-manifestasikan sebagai institusi, pengetahuan lingkungan, dan eti-ka lingkungan);
- f. Penghormatan terhadap asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, pengelolaan lingkungan sosial ini tidak terjadi begitu saja. Kegiatan ini disebabkan oleh banyaknya perubahan yang terjadi dengan pelaksanaan pem-bangunan yang pesat, ketika pengelolaan sosial (tradisional) sebelumnya tidak lagi bersifat prediktif. Kita membutuhkan sumber daya pengelolaan sosial yang lebih harmonis dan seimbang dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, perlu diketahui secara lebih tepat bagaimana komponen-komponen lingkungan tersebut saling berhubungan.

Secara skematis, komponen lingkungan yang saling berinteraksi tersebut dapat digambarkan dalam tiga domain, yaitu aspek alam, sosial (*griasarct*) dan tempat buatan. Meskipun terdapat tiga aspek, namun dalam prakteknya setiap kategori tidak dapat dikaji secara parsial untuk setiap aspek, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang solid yang disebut ekosistem (Soetaryono dalam Purba, 2005).



Gambar 1. Struktur Lingkungan Hidup.

Kesinambungan kehidupan dalam lingkungan sosial, menurut konsep di atas, terwujud melalui keberhasilan interaksi manusia dengan lingkungan alami. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, modifikasi lingkungan alam menjadi habitat nyaman, serta pembangunan sistem pertanian, industri, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Akibat dari aktivitas ini, terbentuklah lingkungan buatan manusia atau lingkungan binaan. Namun, keberhasilan interaksi dengan lingkungan alam saja tidak mencukupi. Pentingnya juga keberhasilan dalam hubungan antara manusia dengan lembaga dan pranata sosial, budaya, serta agama. Dalam kedua konteks ini, muncul konsep-konsep seperti ketahanan sosial, kualitas sosial, dan sumber daya sosial.

Sebagai contoh, ketahanan sosial merujuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya, serta kemampuan untuk pulih setelah mengalami bencana alam atau disintegrasi sosial. Daya dukung sosial menunjukkan kemampuan suatu wilayah atau ekosistem untuk mendukung kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat, sementara daya tampung sosial mencerminkan kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara harmonis, seimbang, rukun, tertib, dan aman.

Beberapa pandangan melihat lingkungan sosial sebagai interaksi di antara sekelompok orang atau individu yang dengan sukarela menempati suatu wilayah atau lokasi secara relatif permanen. Mereka terikat pada pranata sosial atau aturan yang telah dikembangkan, dimengerti, dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam lingkungan ini, terjadi interaksi dan kerjasama di antara anggota kelompok, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan pengertian ini, kelangsungan hidup mencakup bertahannya populasi melalui proses reproduksi atau regenerasi, bertahannya pranata sosial melalui proses seperti sosialisasi, enkulturasi, internalisasi, dan institusionalisasi, serta berlanjutnya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisik melalui interaksi dengan lingkungan alam. Dalam konteks pengelolaan lingkungan sosial, konsep-konsep tersebut sering digunakan baik untuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Mereka membantu memahami kompleksitas interaksi manusia dalam suatu lingkungan tertentu dan membentuk dasar bagi upaya pengelolaan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis.

Kajian dampak sosial yang di muat di (Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 1994) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian-kajian komponen lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Komponen sosial yang ditelaah meliputi:

2.2.1. Demografi

Tabel 1. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Demografi.

Komponen	Parameter
Struktur Penduduk	- komposisi penduduk - kepadatan penduduk
Perkembangan Penduduk	- pertumbuhan penduduk - mobilitas penduduk
Angkatan Kerja	- tingkat partisipasi angkatan kerja - tingkat pengangguran

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

2.2.2. Ekonomi

Tabel 2. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Ekonomi.

Komponen	Parameter
Ekonomi Rumah Tangga	- tingkat pendapatan - pola pendapatan
Ekonomi Sumber Daya Alam	- pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam - pola pemanfaatan sumber daya alam - pola penggunaan lahan - nilai tanah dan sumber daya alam lainnya - sumber daya alam milik umum
Perekonomian Lokal dan Regional	- kesempatan kerja dan berusaha - nilai tambah karena proses manufaktur - jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal - distribusi pendapatan - efek ganda ekonomi (<i>multiplier effect</i>) - produk Domestik Regional Bruto - pendapatan asli daerah - pusat-pusat pertumbuhan ekonomi - fasilitas umum dan fasilitas sosial - aksesibilitas wilayah

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

2.2.3. Budaya.

Tabel 3. Komponen dan Parameter Aspek Sosial Budaya.

Komponen	Parameter
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">- adat-istiadat- nilai dan norma budaya
Proses Sosial	<ul style="list-style-type: none">- proses asosiatif (kerjasama)- proses disosiatif (konflik sosial)- akulturasi- asimilasi dan integrasi- kohesi sosial
Pranata Sosial Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- ekonomi, misal hak ulayat- pendidikan- agama- sosial- keluarga
Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none">- situs purbakala- cagar budaya
Pelapisan Sosial	<ul style="list-style-type: none">- pendidikan- ekonomi- pekerjaan- kekuasaan
Kekuasaan dan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none">- kepemimpinan formal dan informal- kewenangan formal dan informal- mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat- kelompok individu yang dominan- pergeseran nilai kepemimpinan
Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Usaha atau Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Internal masyarakat- Eksternal masyarakat
Adaptasi Ekologis	-

Sumber: K-14 MNLH, 1994.

2.3. Perubahan Sosial dan Analisis Dampak Sosial

2.3.1. Perubahan Sosial

Setiap masyarakat mengalami dinamika perubahan sepanjang rentang hidupnya. Perubahan tersebut dapat bervariasi, menarik perhatian, berpengaruh luas, berlangsung lambat, atau bahkan terjadi dengan cepat. Perubahan dalam masyarakat dapat mencakup norma-norma, pola perilaku individu, struktur organisasi, susunan dan stratifikasi sosial, serta lembaga kemasyarakatan. Penyebab perubahan masyarakat dapat bersumber dari dalam Masyarakat itu

sendiri atau dari luar masyarakat. Faktor-faktor internal masyarakat melibatkan aspek seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik antar golongan, pemberontakan, atau evolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, jika penyebab perubahan berasal dari luar masyarakat, penting untuk memahami saluran-saluran yang dilalui selama proses perubahan. Hal ini diperlukan agar perubahan tersebut akhirnya dapat dikenal, diterima, diakui, dan digunakan oleh masyarakat luas. Saluran-saluran tersebut umumnya melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, agama, rekreasi, dan lain sebagainya. Proses melalui lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mengarahkan perubahan dan menyebarkannya di tengah masyarakat. Menurut Ibrahim (2002) industrialisasi dalam masyarakat agraris merupakan contoh nyata dari perubahan sosial yang memiliki dampak besar pada fondasi kehidupan manusia. Secara keseluruhan, perubahan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem dan struktur sosial. Proses industrialisasi mengubah pola hubungan kerja dari yang bersifat tradisional menjadi lebih modern dan rasional.

Perubahan sosial, menurut definisi dari Wiryohandoyo (2002), dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkembangan peradaban manusia yang muncul sebagai hasil dari perubahan alam, biologis, dan fisik yang terjadi sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Selain itu, perubahan sosial juga mencakup perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Djazifah (2012). Menurut Selo Soemardjan dalam (Wulansari, 2009), perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan ini mempengaruhi sistem sosial masyarakat, melibatkan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial mencakup transformasi dalam struktur sosial serta unsur-unsur budaya dan interaksi sosial dalam suatu komunitas.

Perubahan dianggap sebagai fakta sosial yang dapat terjadi karena adanya rencana dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan manusia. Perubahan yang direncanakan merupakan suatu transformasi yang dipertimbangkan dan dihitung dengan matang terkait manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Kecepatan atau lambatnya perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan tanggung jawab dari pihak yang

menjadi pelopor perubahan. Selain itu, kunci keberhasilan perubahan juga terletak pada sejalan atau tidaknya program yang dirancang dengan kebutuhan yang diakui oleh masyarakat. Pihak yang berupaya mewujudkan perubahan ini disebut sebagai "*agent of change*". Tugas utamanya adalah memimpin dan mengarahkan jalannya perubahan, serta bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses perubahan tersebut.

Dalam membentuk pola perilaku kehidupan masyarakat, terdapat beberapa aspek sosial yang memiliki peran penting. Salah satunya adalah pembentukan nilai-nilai peradaban yang bersifat rasional. Selain itu, adaptasi terhadap budaya dan persiapan untuk masa depan masyarakat juga merupakan aspek-aspek krusial. Seorang pembaharu tidak hanya dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab dan martabat yang tinggi demi perbaikan kehidupan masyarakat. Tantangan ini menjadi lebih kompleks, terutama ketika dihadapi dengan masalah yang bersifat kultural. Oleh karena itu, seorang pembaharu perlu dilengkapi dengan wawasan dan pandangan yang luas. Hanya dengan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kultural dan konteks masyarakat, pembaharu dapat efektif dalam membentuk pola perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Perubahan alami dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi secara tidak disengaja atau otomatis. Dinamika ini bisa berlangsung dengan cepat atau lambat, tergantung pada tingkat keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Perubahan yang terjadi secara otomatis membawa implikasi positif jika arah dan akibatnya memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Sebaliknya, perubahan alami dapat memiliki dampak negatif jika arah dan konsekuensinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan alami mewakili proses evolusi atau transformasi yang terjadi tanpa campur tangan aktif dari pihak luar.

Dalam menanggapi implikasi perubahan yang terjadi secara alami, beberapa filosof dan sejarawan terkemuka seperti Arnold Toynbee dan Spengler merekomendasikan perlunya pengembangan tata nilai baru, pandangan hidup baru, sikap-sikap baru, dan struktur institusional baru. Mereka menyoroti perlunya adaptasi terhadap perubahan yang semakin kompleks, meluas, dan mendalam. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan yang muncul, diperlukan

inovasi dalam nilai-nilai, pandangan dunia, serta cara pandang dan sistem yang baru (Mazidah, 2011). Rekomendasi ini menunjukkan bahwa untuk menghadapi perubahan alami yang memerlukan penyesuaian, masyarakat perlu terbuka terhadap transformasi dalam nilai-nilai fundamental, paradigma berpikir, sikap, dan tata kelola institusional. Dengan mengembangkan pendekatan baru ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif dan responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara alami dalam dinamika kehidupan mereka.

(Soekanto, 1986) mengungkapkan bahwa perubahan sosial dianggap sebagai suatu peristiwa yang melibatkan proses atau mekanisme tertentu dalam struktur kehidupan manusia. Proses terjadinya perubahan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa faktor yaitu:

- a. **Kontak dengan Budaya Lain.** Interaksi dan kontak dengan budaya lain dapat memicu perubahan sosial. Pertukaran ide, nilai, dan tradisi antarbudaya dapat memberikan kontribusi besar terhadap transformasi masyarakat.
- b. **Sistem Pendidikan Formal yang Maju.** Perkembangan sistem pendidikan formal yang canggih dan maju juga dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Pendidikan yang baik memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan baru kepada individu, yang kemudian dapat memengaruhi perubahan dalam masyarakat.
- c. **Sikap Menghargai Karya dan Keinginan untuk Maju.** Sikap positif terhadap pencapaian dan karya seseorang, serta keinginan untuk mencapai kemajuan, dapat menjadi pendorong perubahan sosial. Semangat untuk berkembang dan mencapai tujuan baru dapat membawa dampak positif dalam masyarakat.
- d. **Toleransi.** Sikap toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Toleransi menciptakan ruang bagi adaptasi terhadap ide dan nilai baru.
- e. **Sistem Terbuka.** Adanya sistem terbuka mengindikasikan bahwa masyarakat dapat menerima pengaruh dari lingkungan eksternal. Keberlanjutan perubahan sosial seringkali terkait dengan tingkat keterbukaan masyarakat terhadap ide dan inovasi dari luar.

Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat lebih baik memahami dinamika dan mekanisme yang terlibat dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat.

2.3.2. Analisis Dampak Sosial

Menurut (Richards, 2012), dampak sosial dapat diartikan sebagai akibat sosial dan budaya yang timbul pada kelompok manusia tertentu sebagai hasil dari tindakan, baik yang dilakukan oleh lembaga publik maupun swasta. Tindakan ini dapat mengubah gaya hidup, pekerjaan, kegiatan rekreasi, interaksi sosial, dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ini secara keseluruhan mempengaruhi kemampuan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang berdaya. Penilaian dampak sosial bertujuan utama untuk menciptakan lingkungan biofisik dan kondisi hidup manusia yang berkelanjutan serta mendukung kehidupan yang layak. Forest-Trends, sebagai LSM yang fokus pada isu kehutanan, mengakui peran integral masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan, perlu memperhatikan potensi dampak positif dan negatif yang mungkin muncul dari inisiatif pembangunan terhadap masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan untuk menilai dampak secara komprehensif dan menyeluruh, serta mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Dampak sosial menurut Surto Haryono dalam (Purwanto, 2015), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk dalam (Kusmayadi, 2013) menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti, (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kolektif, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta, (5) struktur masyarakat. Sedangkan Fardani (2012) menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Penelitian tentang evaluasi dampak, yang dimulai pada tahun 1969 (Burdge, 1994), menitikberatkan pada pentingnya memperhitungkan dampak fisik, budaya, dan lingkungan masyarakat sebagai aspek utama yang perlu dipertimbangkan. Evaluasi dampak sosial kemudian menjadi bagian integral dari

evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, ada kesadaran bahwa evaluasi dampak lingkungan belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang memadai mengenai dampak sosial. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan penanganan yang lebih rinci terhadap dampak sosial, dokumentasi evaluasi dampak sosial berkembang dan menjadi suatu entitas terpisah dari evaluasi dampak lingkungan yang lebih umum.

Berdasarkan usulan (Burdge, 1994), terdapat beberapa variabel dalam analisis dampak sosial yang dapat diidentifikasi. Pertama, dampak pada populasi melibatkan penilaian terhadap perubahan populasi, aliran masuk dan keluar pekerja, fluktuasi populasi musiman, relokasi individu dan keluarga, perbedaan usia, jenis kelamin, serta komposisi etnis. Kedua, dampak pada struktur komunitas mencakup sikap masyarakat terhadap rencana pembangunan, dukungan atau penolakan dari kelompok kepentingan, perubahan jumlah dan struktur pemerintahan daerah, perencanaan dan penataan wilayah dalam rencana pembangunan, diversifikasi industri, ketidakadilan ekonomi, dan perubahan peluang pekerjaan. Ketiga, dampak konflik dapat dilihat dari kehadiran agensi eksternal, munculnya kelas sosial baru, pergeseran fokus komersial/industri dalam komunitas, dan kehadiran penduduk musiman pada akhir pekan. Keempat, dampak pada individu dan keluarga melibatkan perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari, perubahan praktik keagamaan, perubahan dalam struktur keluarga, perubahan dalam struktur jaringan sosial, persepsi terhadap kesehatan dan keselamatan, serta perubahan dalam peluang waktu luang. Kelima, dampak pada kebutuhan infrastruktur komunitas melibatkan perubahan dalam kebutuhan infrastruktur, akuisisi lahan, dan dampak pada aspek budaya, sejarah, dan arkeologi (Firdausi, 2018).

2.4. Lingkungan Sosial Pesisir atau Nelayan

Pemahaman tentang lingkungan sosial pesisir di sini hampir sejalan dengan konsep masyarakat pesisir atau komunitas pesisir yang digunakan oleh beberapa kelompok. Dalam perspektif geografi-budaya, lingkungan sosial pesisir secara umum mencakup unit-unit kehidupan manusia yang menetap dan mengembangkan kehidupan sosial di daerah yang berdekatan dengan laut. Dengan kata lain, yang termasuk dalam kategori lingkungan sosial pesisir adalah masyarakat yang tinggal di daratan yang berdekatan dengan laut dan masyarakat yang secara khusus menghabiskan sebagian besar hidup mereka di

atas perairan laut. Dalam konteks ini, komunitas perairan (seperti Orang Laut di Kepulauan Riau dan Orang Bajau di perairan sebelah timur Pulau Sulawesi) juga dapat dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosial pesisir. Bagi komunitas ini, ketergantungan hidup mereka terhadap sumber daya alam daratan sama besarnya dengan ketergantungan mereka terhadap sumber daya perairan.

2.4.1. Tipe-Tipe Masyarakat Pesisir di Indonesia

Meskipun Indonesia negara kepulauan (*archipelago*), akan tetapi hanya sebagian kecil saja dari penduduknya yang berdiam, hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir. Berdasarkan hubungan, adaptasi dan pemahaman terhadap daerah pesisir dengan segala kondisi geografisnya, maka masyarakat yang berdiam di pesisir setidaknya dapat kita kategorikan menjadi tiga.

a. Masyarakat Perairan

Kesatuan-kesatuan sosial yang hidup dari sumber daya perairan (laut, sungai atau pantai), cenderung terasing dari kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, lebih banyak berada di lingkungan perairan dari pada darat, dan berpindah-pindah tempat di suatu wilayah (teritorial) perairan tertentu. Kehidupan sosial mereka cenderung bersifat egaliter, dan hidup dalam kelompok-kelompok kekerabatan setingkat klen kecil. Berbagai literatur etnografi menunjukkan bahwa masyarakat asli setempat yang benar-benar menggantungkan kehidupan ekonomi subsistensinya dari sumber daya perairan dapat dihitung dengan jari.

b. Masyarakat Nelayan

Golongan masyarakat yang dapat dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut dan potensi lingkungan perairan dan pesisir untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya telah bermukim secara tetap di daerah-daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem ekonomi mereka tidak dapat lagi dikategorikan masih berada pada tingkat subsistensi; sebaliknya sudah masuk ke sistem perdagangan, karena hasil mereka laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, tetapi didistribusikan dengan ekonomis kepada pihak-pihak lain. Sungguhpun hidup dengan memanfaatkan sumber daya perairan, namun sebenarnya mereka lebih banyak menghabiskan kehidupan sosial-budayanya di daratan.

Dari perspektif kesukubangsaan atau etnisitas, masyarakat nelayan seperti ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari suku bangsa yang lebih luas. Mereka dibedakan dari kelompok-kelompok lain dalam sukubangsanya karena adanya sub-kebudayaan kelautan yang khas. Selain itu, terdapat desa-desa nelayan yang terbentuk akibat migrasi masyarakat nelayan dari sukubangsa lain, contohnya desa-desa nelayan keturunan Bugis di pantai timur Sumatera. Interaksi sosial yang luas dengan dunia luar mengakibatkan terjadinya perubahan yang lebih dinamis di kalangan masyarakat nelayan semacam ini.

c. Masyarakat Pesisir Tradisional

Masyarakat-masyarakat pesisir seperti ini memang berdiam dekat perairan laut, akan tetapi sedikit sekali menggantungkan kelangsungan hidup dari sumber daya laut. Mereka kebanyakan hidup dari pemanfaatan sumber daya daratan, baik sebagai pem-buru dan peramu ataupun sebagai petani tanaman pangan ataupun jasa. Meskipun sebagian warganya bisa memanfaatkan sumber daya perairan, akan tetapi jumlahnya sedikit dan nampak sekali mereka lebih menguasai pengetahuan mengenai lingkungan darat daripada perairan, lebih mengembangkan kearifan lingkungan darat daripada taut. Jadi masyarakat pesisir seperti ini tidak dapat di-samakan dengan masyarakat nelayan ataupun masyarakat perai-ran yang memiliki ketergantungan hidup sangat besar kepada sumber daya perairan.

2.4.2. Pemanfaatan Lingkungan

Subsisten adalah istilah yang merujuk pada kegiatan memperoleh makanan secara sederhana dan diambil sebagian kecil dari sumber daya yang tersedia. Kegiatan subsisten lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi sendiri (*subsistence economic*) daripada untuk keperluan pertukaran atau perdagangan (*commercial economic*). Kegiatan hidup ini biasanya didukung oleh teknologi yang juga sangat sederhana, namun adaptif dengan lingkungan. Masyarakat pesisir yang hidup dari berburu binatang liar dan meramu (mengumpulkan) tumbuhan dan hewan kecil sebagai makanan menciptakan peralatan sederhana yang dapat diperoleh langsung dari alam

seperti tombak, panah, dan perangkap. Biasanya penggunaan peralatan untuk berburu dan meramu tersebut disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal mereka mengenai sifat-sifat dan guna binatang-binatang tersebut bagi kebutuhan hidup mereka.

Hanya sebagian kecil masyarakat pesisir yang hidup dari meramu sagu, khususnya beberapa masyarakat pesisir di Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan yang tergantung kepada sistem ekonomi subsisten sumber daya laut umumnya mengembangkan cara-cara menangkap berbagai jenis ikan, seperti pancing dan kailnya, tangguk (serokan), bubu, jaring, jala, atau alat yang besar lebih kompleks seperti pukot, dan bagan. Pada dua dekade belakangan ini kepada masyarakat pesisir telah diperkenalkan pula suatu alat yang menggabungkan teknik penangkapan dan pemeliharaan ikan di perairan laut tenang, yaitu rumpon.

Masyarakat sederhana di perairan sungai-sungai besar di Irian Jaya bagian selatan, seperti orang Asmat sungguhpun pada zaman dulu tidak mengenal busana, tetapi memiliki suatu pengetahuan khusus untuk keamanan tubuh dari sengatan cahaya matahari di siang hari dan dinginnya cuaca di malam hari. Masyarakat yang berdiam di daratan luas berawa-rawa itu sengaja memoles tubuhnya dengan lumpur di siang hari agar tidak langsung terkena sinar matahari, dan memakai lemak babi pada malam hari untuk mengurangi rasa dingin. Selain itu mereka sengaja membuat rumah yang tidak berjendela dengan tungku yang apinya terus menyala di tengah rumah. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan hangat, sekaligus mengusir nyamuk dengan asap yang memenuhi ruangan. Sayangnya, dampak buruk kebiasaan ini terhadap kesehatan tidak terdapat dalam sistem pengetahuan mereka. Sementara itu masyarakat pesisir Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sebelum mengenai alat tenun sebagian mengembangkan teknologi pembuatan pakaian dari kulit kayu.

Hampir semua masyarakat pesisir membuat rumah di atas tiang-tiang yang relatif tinggi dari tanah. Tujuannya bukan saja agar tidak terendam oleh air pada waktu air laut pasang naik, atau waktu hari hujan, tapi juga agar tidak diganggu oleh binatang-binatang kecil yang berkeliaran di tanah, seperti ular, kalajengking, lipan, semut dan serangga-serangga lain. Kolong rumah yang cukup tinggi itu juga mereka manfaatkan sebagai tempat membuang sampah domestik. Bahan-bahan untuk membangun rumah itu seluruhnya diperoleh dari lingkungan setempat. Daerah-daerah yang banyak ditumbuhi jenis palem rawa

seperti rumbia, nibung atau sagu memanfaatkan hampir semua bagian dari tumbuhan tersebut untuk keperluan rumah. Mulai dari batangnya yang dibuat dari batang nibung, atap dari anyaman daun rumbia, lantai dari bilah-bilah batang rumbia, dan dinding dari pelepah daunnya. Masyarakat pesisir di daerah lain memanfaatkan bambu atau pohon kelapa untuk membuat rumah. Lain halnya dengan komunitas-komunitas perairan yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas air, seperti Orang Laut dan Bajau. Bagi masyarakat ini rumah mereka sekaligus adalah alat transportasi dan rumah tempat tinggal keluarga.

2.4.3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Masyarakat Pesisir

Komunitas-komunitas yang berdiam di daerah pesisir kepulauan Indonesia tidak terkecuali relatif telah mengalami berbagai kontak kebudayaan dengan dunia luar. Bersamaan dengan itu berbagai pengetahuan dan teknologi peralatan dari luar juga telah mereka kenal dan dijadikan sebagai bagian dari sistem pemenuhan kebutuhan hidup. Relativitas kontak-kontak kebudayaan dan tingkat kemajuan kehidupan sosial ekonomi mereka menyebabkan adanya berbagai corak pengetahuan dan teknologi di antara masyarakat pesisir tersebut.

Mengingat pengetahuan dan teknologi tradisional tersebut merupakan hasil interpretasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap lingkungan alamnya, maka sifat adaptifnya dengan lingkungan sangatlah berbeda dengan teknologi moderen yang cenderung bersifat eksploitatif. Namun sifat pengetahuan dan teknologi asli setempat yang akrab dengan lingkungan tersebut dapat saja berubah akibat berubahnya lingkungan karena intervensi teknologi dan kebijakan pembangunan yang tidak layak. Sedangkan faktor penentu perubahan dari dalam umumnya ditimbulkan oleh makin besarnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam yang ada, terutama karena pertumbuhan penduduk berkat perbaikan perilaku sehat.

Persoalan yang umum terjadi di lingkungan pesisir pada masa kini adalah penurunan daya dukung lingkungan alam yang berbanding terbalik dengan tekanan akibat peningkatan jumlah populasi manusia dan penggunaan teknologi yang tidak arif lingkungan. Lingkungan alam pesisir pada masa dulu dianggap keras dan tidak cocok untuk kenyamanan hidup manusia, antara lain karena mudah dilanda bencana alam, bersuhu relatif lebih panas dan udaranya lembab, serta menjadi hidup nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Akan tetapi pada masa kini hambatan-hambatan alamiah tersebut tidak lagi dianggap

sebagai penghalang kehidupan manusia di daerah pesisir. Akibat berbagai tuntutan hidup dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk lebih mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan alam pesisir. Karena upaya memenuhi kebutuhan hidup dan berkat dukungan teknologi modern daerah pesisir sekarang dieksploitasi menjadi lahan pertanian pasang surut, tambak-tambak udang dan ikan, tambak garam, tambang minyak, tambang timah, dan tambang pasir. Pantai laut tidak sekedar digali tapi juga ditimbun, sehingga daratan menjadi lebih luas (reklamasi) untuk dijadikan tempat pemukiman, pabrik, pelabuhan dan lahan wisata.

Peningkatan kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan alam pesisir telah membantu kehidupan jutaan penduduk yang tidak memperoleh tempat di lingkungan lain. Akan tetapi penyesuaian diri yang umumnya dipicu oleh pembukaan lahan industri besar dengan sistem eksploitasi tersebut telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit terhadap kelestarian lingkungan. Lingkungan pesisir semakin banyak kehilangan dukungan bagi keanekaragaman hayati alamiahnya, dan selanjutnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat-masyarakat pesisir tradisional yang seiam ini menggantungkan hidup kepada sumber daya alamiah tersebut. Contoh paling dekat adalah kepunahan komunitas nelayan Bagan Siapi-api di Sumatera bagian timur. Daerah Bagan Siapi-api yang dulu dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Sumatera, sekarang menjadi desa sepi karena perairan sekitarnya tidak lagi menghasilkan ikan atau udang. Para nelayannya sekarang beralih usaha atau pindah ke pesisir pulau-pulau lain.

2.5. Kawasan Industri

Menurut National Industrial Zoning Committee's (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015. Menurut peraturan pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang

dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Kebijakan pengembangan kawasan industri merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Syahrudin, 2011).

Dirdjuwono (2014) menyebutkan, kawasan peruntukan industri merupakan bentang lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan. Perusahaan kawasan industri merupakan perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, sedangkan perusahaan industri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri di Indonesia. Zona industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri baik industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai penggerak utama secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan dan memiliki daya ikat spasial. Tujuan pengembangan kawasan industri adalah:

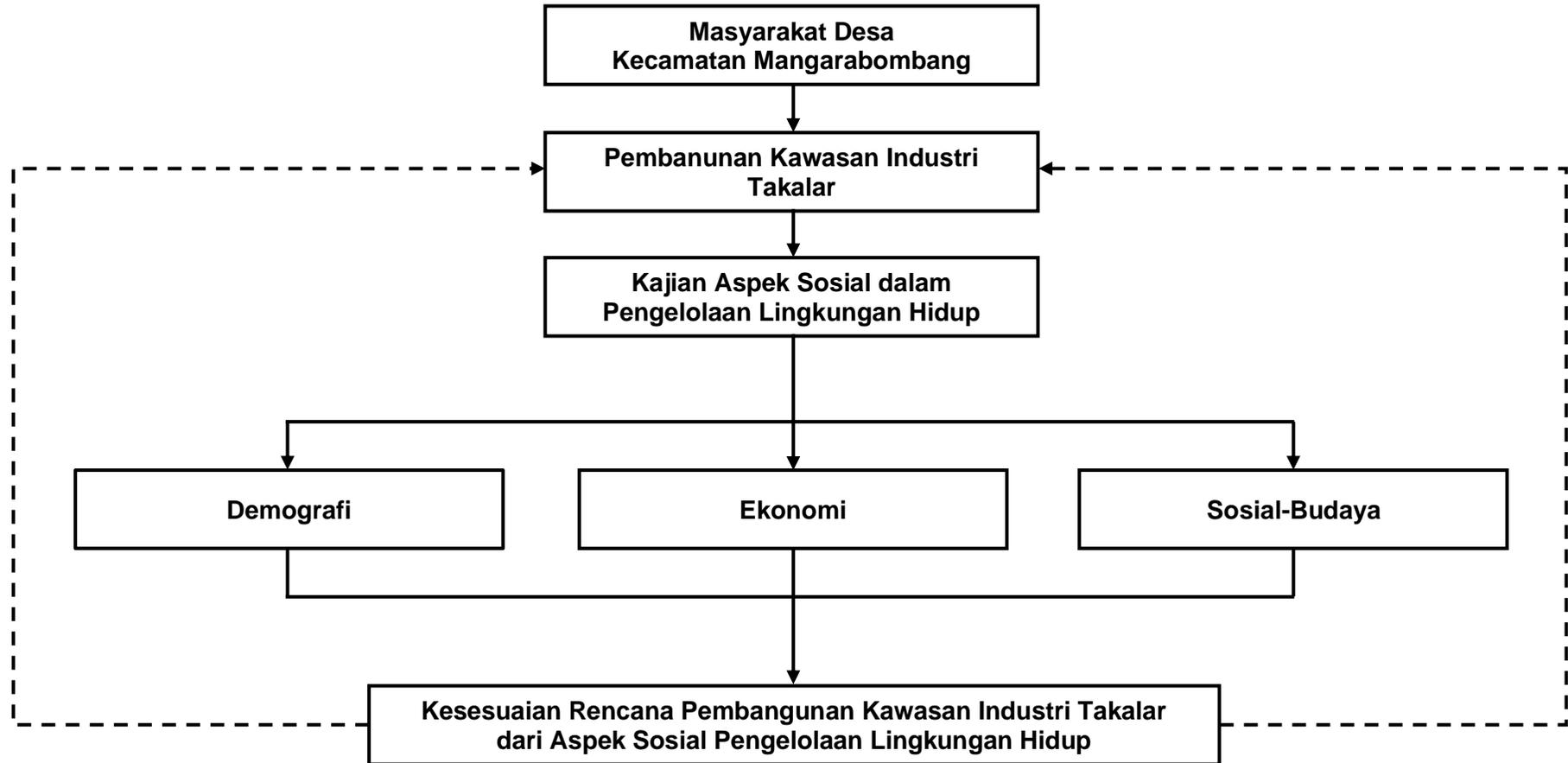
- 1) Tujuan utama sebagai alat untuk mengatur tata ruang dan meminimalkan kasus pencemaran terutama bagi daerah dengan iklim investasi tinggi.
- 2) Sebagai penciptaan (*stimulator*) iklim investasi bagi daerah-daerah yang remote.
- 3) Tujuan lainnya, yaitu menciptakan (mencari) profit.

Pengaruh pemilihan lokasi industri untuk suatu pusat kegiatan kerja terhadap keterlibatan masyarakat setempat seringkali tidak disadari. Padahal suatu kawasan perindustrian mempengaruhi secara langsung terhadap ribuan keluarga dan lebih banyak lagi secara tidak langsung. Lokasi pusat kegiatan kerja industri diperlukan untuk perjalanan ke tempat kerja. Pemilihan suatu lokasi secara tidak langsung meningkatkan atau mengurangi biaya sosial dan ekonomi bagi beberapa keluarga.

Keadaan fasilitas transpor yang tersedia ke lokasi seperti akses ke jalur kereta api atau jarak ke sistem jalan raya antar daerah akan menentukan tipe industri yang dapat beroperasi secara efisien pada saat pengembangan. Keragaman dari industri yang menarik di lokasi akan mempengaruhi kesempatan kegiatan kerja masyarakat di masa mendatang. Suatu program swadaya masyarakat secara substansial dapat dipengaruhi oleh fasilitas air dan selokan, dan peningkatan sistem jalan raya serta transportasi umum yang diperlukan oleh industri di masa depan.

Kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat diartikan dalam dua cara, yaitu fungsional dan secara geografis. Pusat pertumbuhan secara fungsional berarti bahwa pada tempat tersebut merupakan pusat dari aktivitas atau lokasi konsentrasi dari usaha maupun industri yang ada dengan memberikan efek pertumbuhan dan perkembangan baik itu ke dalam maupun luar negeri dari lokasi industri tersebut. Sedangkan secara geografis maka pusat pertumbuhan diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki daya tarik sehingga mampu menarik berbagai macam usaha dan masyarakat akan bermukim di tempat tersebut. Suatu lokasi dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki empat ciri, yaitu (1) adanya hubungan antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, (2) adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), (3) adanya konsentrasi geografis dan (4) bersifat mendorong daerah di belakangnya. Unsur pengganda muncul karena adanya keterkaitan antar sektor tersebut dan akan memacu pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2016).

2.6. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2. Kerangka Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John Creswell dalam (Sudirman, 2016) terdapat lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yaitu *narrative research*, *phenomenological research*, *grounded theory research*, *ethnographic research*, dan *case study research*. Adapun studi ini mencoba melihat kesesuaian rencana pembangunan kawasan industri takalar terhadap aspek sosial pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study research*).

Gagasan atau pendekatan *case study* tersebut ditunjukkan untuk lebih dalam mengkaji tentang aspek sosial dalam pengelolaan hidup masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar terhadap adanya rencana pembangunan kawasan industri Takalar. Konseptual proses tersebut kemudian dituangkan menjadi suatu metode penelitian lengkap dengan pola analisa observasi serta pengumpulan data yang diperlukan. Dari hasil observasi diperoleh data untuk dilakukan pengolahan menjadi informasi untuk dianalisa dan akhirnya ditarik berbagai kesimpulan yang diperlukan.

3.1.1. Pengertian Studi Kasus

Studi kasus berasal dari istilah "*A Case Study*" atau "*Case Studies*". Kata "kasus" diambil dari kata "case" sebagaimana dijelaskan dalam Kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1989; 173). "Case" diartikan sebagai (1) "contoh atau contoh kejadian sesuatu," (2) "keadaan aktual; situasi," dan (3) "keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau sesuatu." Dengan demikian, istilah ini mencakup (1) contoh kejadian suatu hal, (2) keadaan aktual dari suatu keadaan atau situasi, dan (3) lingkungan atau kondisi tertentu yang terkait dengan seseorang atau sesuatu.

Studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang satu latar, atau subjek tunggal, atau suatu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu (Bogdan & Biklen, 1998). Definisi lain menyetujui bahwa studi kasus adalah eksaminasi sebagian besar atau seluruh aspek-aspek potensial dari unit atau kasus khusus yang dibatasi secara jelas (atau serangkaian kasus). Suatu kasus itu bisa berupa individu, keluarga, pusat Kesehatan masyarakat, rumah

perawat, atau suatu organisasi. Sementara studi topikal (*topical study*) hanya menginvestigasi satu atau sedikit suasana aktivitas terpilih dalam lapangan yang kurang dibatasi secara jelas, seperti studi tentang makna nyeri bagi orang-orang terpilih di masyarakat (Crabtree & Miller, 1999).

3.1.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam buku berjudul *Fundamental of Research Methodology and Statistics* oleh Singh (2006) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berkaitan dengan masa kini dan upaya untuk menentukan status fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian deskriptif berorientasi pada penentuan status dari suatu fenomena tertentu daripada pada isolasi faktor-faktor penyebab yang menjelaskan keberadaannya. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Syahza, 2021).

Data dan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar di Desa Laikang dan Desa Punaga tersebut diperoleh melalui penelitian di lokasi rencana pembangunan kawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji kondisi sosial-budaya masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar dan mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Mangarabombang terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri tersebut, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui Mengetahui dampak prioritas yang dirasakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan industri Takalar. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkannya dari berbagai narasumber, termasuk masyarakat dan pihak-

pihak yang terlibat langsung ke dalam pengembangan kawasan industri di Desa Punaga dan Desa Laikang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan jurnal penelitian, literatur, buku-buku kepustakaan, dan publikasi dari dinas terkait yang berhubungan dengan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua desa yang terletak di Kecamatan Manggarabombang, dengan penekanan pada dua desa, yaitu Desa Laikang dan Desa Punaga, yang menjadi pusat dari rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Dalam konteks metode purposive area, (Arikunto, 2010) menjelaskan bahwa *purposive area* berarti penelitian dilakukan di suatu tempat bukan berdasarkan strata, melainkan didasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu. Kecamatan Manggarabombang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa masyarakat di desa tersebut akan mengalami perubahan keadaan akibat pembangunan kawasan industri. Pemfokusan daerah penelitian pada Desa Laikang, Desa Punaga, Desa Cikoang, dan Desa Pattopakkang dipilih karena keempat desa tersebut memiliki beberapa perusahaan yang sudah berdiri dan beroperasi, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menilai persepsi dan peran masyarakat dalam menghadapi kondisi sosial-budaya terkait rencana pengembangan kawasan industri selanjutnya.

3.3. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan rentan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah penelitian, pada waktu memulainya penelitian sampai dengan berakhirnya penelitian. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai pada 10 Mei 2023 sampai dengan bulan 6 Oktober 2023. Adapun rincian waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rincian waktu penelitian KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TAKALAR (Studi Kasus Masyarakat Pesisir dan Nelayan Kecamatan Mengarabombang, kabupaten Takalar)

No.	Kegiatan Penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Literatur (Dokumentasi)		✓	✓								✓								✓					
2.	Observasi Pra-Pengambilan Data						✓																		
3.	Pengambilan Data (Interview dan Observasi)							✓			✓	✓	✓												
4.	Pembuatan Transkrip Wawancara										✓	✓	✓		✓	✓	✓								
5.	Analisis Data														✓	✓	✓		✓	✓	✓				
6.	Penyusunan Laporan Penelitian															✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	

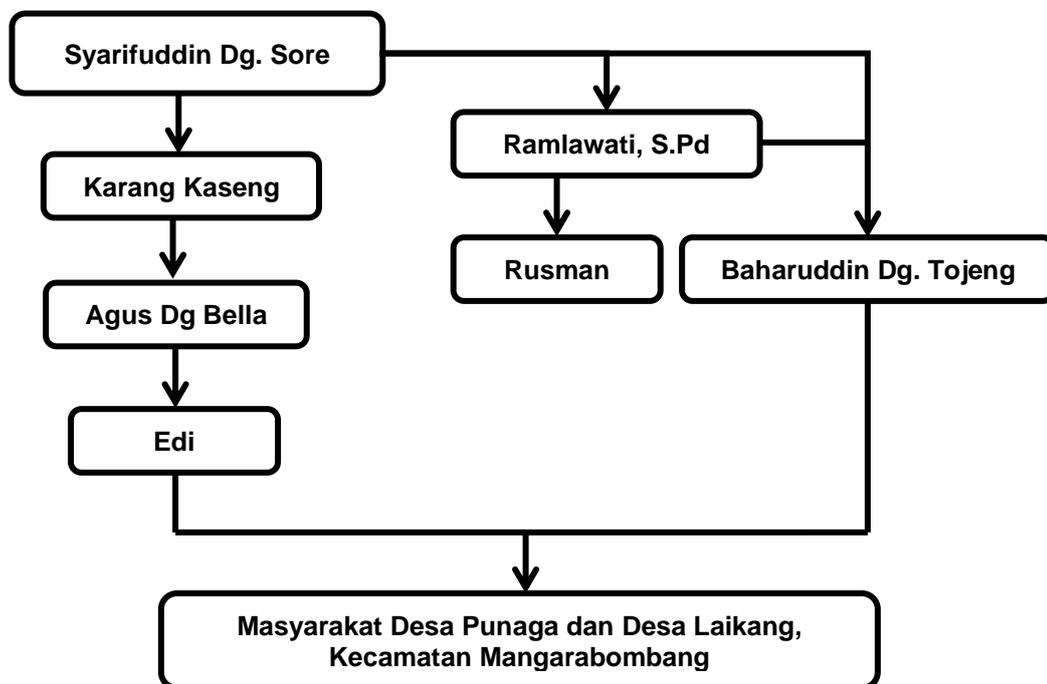
3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang memberikan data yang diperlukan untuk studi tersebut. Mereka memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sehingga kontribusi mereka sangat penting dalam pemahaman dan analisis persoalan tersebut. Peran informan tidak hanya sebatas sebagai sumber data, tetapi juga sebagai pemberi umpan balik yang berharga terhadap hasil penelitian, membantu memvalidasi temuan, serta memberikan sudut pandang dan wawasan tambahan yang dapat memperkaya interpretasi hasil penelitian. (Bungin, 2003).

Menurut (Suyatno & Sutinah, 2013) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang terkena dampak langsung dari rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dan mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial dalam konteks rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pada tahap berikutnya, pemilihan informan dilakukan menggunakan metode *snowball sampling*. Dalam metode ini, informan kunci awal dipilih, dan kemudian informan kunci tersebut memberikan rekomendasi mengenai informan lain yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses ini berlanjut seiring dengan penambahan informan baru berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik *snowball sampling* membantu dalam mengidentifikasi calon informan yang mungkin sulit dijangkau secara langsung oleh peneliti, sehingga memperluas jaringan informan dan mendapatkan berbagai perspektif yang kaya terkait dengan topik penelitian. Berikut ini adalah rangkaian informan dengan teknik *snowball sampling*.



Gambar 3. Rangkaian Penentuan Informan dengan Teknik *Snowball Sampling*.

Dari gambar diatas, diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) informan utama, yang mana satu diantaranya adalah informan kunci yaitu Pak Syarifuddin Dg Sore yang merupakan Kepala Desa Punaga, yang menurut Camat Mangarabombang, Pak Mappaturung S,Sos, Pak Syarifuddin Dg Sore lebih berkompeten daripada dirinya untuk menjadi informan kunci. Informan lainnya yaitu Karaeng Kaseng, Agus Dg. Bella, Edi, Ramlawati, S.Pd., Rusman, dan Baharudding Dg. Tojeng. Selain dari ketujuh informan utama tersebut, peneliti juga

banyak mendapatkan informasi dari warga Desa Punaga dan Laikang yang menjadi lokasi pembangunan awal KITA. Adapun deskripsi diri dari ketujuh informan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dikaitkan dengan tempat dan waktu untuk analisis dalam pengambilan keputusan. Data yang akan digunakan untuk bahan analisis dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

3.5.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2015). Dalam Penelitian ini data primer dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan informan, untuk melihat tingkat pengetahuan dan respon masyarakat terhadap terhadap kajian aspek sosial pengelolaan lingkungan hidup (aspek demografi, ekonomi, dan sosial-budaya) dalam rencana pembangunan KITA.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan untuk tujuan selain menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Data ini dapat diakses dengan cepat. (Sugiyono, 2016). Data sekunder mencakup informasi pendukung dari data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber. Ini termasuk publikasi resmi seperti jurnal, buku, hasil penelitian, serta publikasi terbatas dan arsip data lembaga atau instansi yang relevan antara lain, dokumen perencanaan seperti peta dasar, data jumlah penduduk Kecamatan Mangarabombang, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Kabupaten Takalar, dan berbagai literatur lainnya yang bersumber dari jurnal ilmiah dan atau dari internet.

Kebutuhan akan kedua jenis data tersebut baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4 yang merupakan tabel kebutuhan data pada penelitian rencana pembangunan kawasan industri Takalar.

Tabel 4. Kebutuhan Data.

Sasaran	Variabel	Data		Sumber
		Primer	Sekunder	
Persepsi Masyarakat				
Internal	Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana Pembangunan KITA terhadap kondisi demografis masyarakat	√	√	Masyarakat BPS Kantor Desa
	Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana Pembangunan KITA terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat	√	√	Masyarakat BPS Kantor Desa
	Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana Pembangunan KITA terhadap kebudayaan masyarakat	√	√	Masyarakat BPS Kantor Desa
Eksternal	Respon masyarakat terhadap rencana Pembangunan KITA dalam kehidupan sosial masyarakat	√		Masyarakat
	Respon masyarakat terhadap rencana Pembangunan KITA dalam pembangunan ekonomi masyarakat	√		Masyarakat
Harapan Masyarakat terhadap rencana pembangunan KITA		√		Masyarakat
Kesesuaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar		√	√	Masyarakat & RIPIN 2015-2035

Sumber: Hasil Analisis.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada cara dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel. (Bungin, 2003). Sementara itu (Arikunto, 2010), berpendapat bahwa dalam penelitian ini mencakup berbagai teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data selama proses penelitiannya.

3.6.1. Diskusi Grup Sistematis (*Focus Group Discussion*)

FGD (*Focus Group Discussion*) merupakan suatu metode pengumpulan data yang biasanya diterapkan dalam penelitian kualitatif dengan maksud untuk menggali makna suatu tema berdasarkan pemahaman kelompok tertentu.

(Bungin, 2003). Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan interpretasi dari suatu kelompok melalui hasil diskusi yang terfokus pada permasalahan tertentu. FGD juga bertujuan untuk mencegah penafsiran yang keliru dari seorang peneliti terhadap inti masalah yang sedang diselidiki.

Ada dua tahapan utama FGD (Bungin, 2003) yaitu tahap diskusi dengan melibatkan berbagai anggota FGD secara kolektif yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan fokus masalah FGD dan tahap analisis hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap yaitu:

- 1) Tahap analisis mikro, yaitu:
 - a. melakukan coding terhadap sikap, pendapat, peserta yang memiliki kesamaan.
 - b. menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan konteks yang berbeda.
 - c. menentukan kesamaan istilah yang digunakan, termasuk perbedaan pendapat terhadap istilah yang sama tadi.
 - d. melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi.
 - e. mencari hubungan diantara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan (fokus diskusi).
 - f. menyiapkan draf laporan FGD untuk didiskusikan pada kelompok yang lebih besar untuk mendapat masukan lebih luas, sebelum diseminarkan dalam forum yang lebih luas.
- 2) Tahap analisis makro, yaitu:

Tahap ini dilakukan pada tahap e dan f, karena pada tahap ini peneliti tidak hanya dapat menemukan hubungan antara masing-masing kategorisasi, namun juga dapat mengabstraksikan kesesuaian yang menjadi tingkat substansial antara fenomena-fenomena demografi, sosial ekonomi dan budaya dengan harapan masyarakat terkait dengan kajian aspek sosial pengelolaan lingkungan hidup masyarakat pesisir di daerah pembangunan KITA.

Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari survei memiliki manfaat penting dalam FGD, khususnya terkait data-data yang disajikan dalam bentuk tabel. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini

dirancang untuk menghindari subjektivitas dari peneliti tunggal, melainkan untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama dalam mencari kebenaran informasi yang terkait dengan persepsi masyarakat mengenai rencana pembangunan KITA di lapangan.

3.6.2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Estenberg (Sugiyono, 2016) menjelaskan tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dipilih sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang informasi yang dibutuhkan. Dalam proses wawancara ini, pewawancara telah menyiapkan pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan sebelumnya. Di sisi lain, wawancara semistruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang memberikan lebih banyak kebebasan pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk secara lebih terbuka menemukan permasalahan dan mendapatkan pandangan dari pihak yang diwawancarai. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur merupakan pendekatan wawancara yang lebih bebas, di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Panduan wawancara yang digunakan hanya mencakup garis-garis besar permasalahan yang akan diajukan.

Menurut jenis dan sifat penelitian ini, wawancara semistruktur dianggap sebagai metode yang paling sesuai. Pilihan ini sejalan dengan pandangan (Herdiansyah, 2010) yang menegaskan bahwa wawancara semistruktur lebih cocok diterapkan dalam penelitian kualitatif daripada jenis penelitian lainnya. Sebagai bagian dari wawancara semistruktur, pendekatan *indepth interview* menjadi relevan untuk dilakukan.

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan pada setiap informan penelitian. Wawancara dimulai dengan membahas hal-hal yang bersifat umum seperti pekerjaan, aktivitas keseharian, cara-cara bercocok tanam atau hal-hal tampak lainnya. Setelah wawancara berjalan beberapa saat dan informan telah mengingat informan merasa nyaman dan sudah bersedia untuk berbagi informasi yang bersifat lebih pribadi, wawancara diarahkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Peneliti sepenuhnya terlibat dalam narasi informan, dengan mendengarkan, menerima, dan merinci informasi

yang diberikan. Proses wawancara tidak hanya dilakukan sekali, melainkan diulang beberapa kali untuk setiap informan.. Seringkali pada wawancara pertama informan belum terbuka untuk memberikan informasi yang mendalam, namun biasanya setelah dua tiga kali wawancara, informan akan lebih mengalir memberikan informasi dan tidak sekaku pada saat wawancara pertama, dengan demikian lebih mudah bagi peneliti untuk memasuki dunia informan guna mendapatkan informasi secara mendalam.

3.6.3. Observasi

Observasi merupakan tindakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih dekat terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Riduwan, 2008). Dalam hal ini, peneliti secara langsung mengamati objek penelitian, sambil melakukan wawancara mendalam kepada responden guna memperdalam pemahaman tentang kondisi wilayah secara langsung di lokasi penelitian.

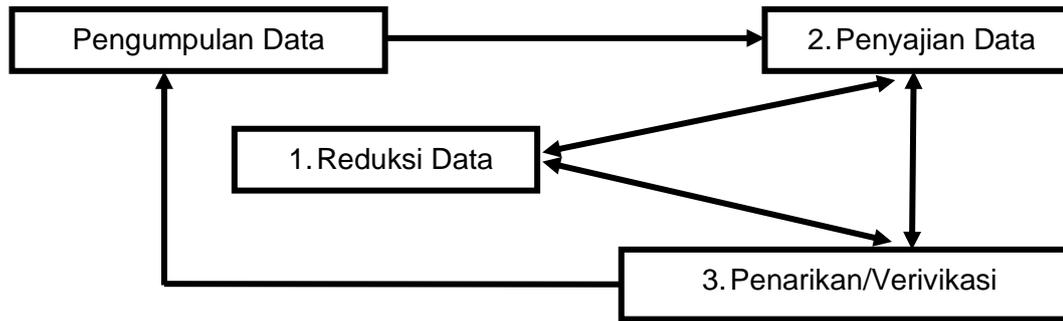
3.6.4. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip Kecamatan Mangarabombang, literatur tertulis perpustakaan daerah Kabupaten Takalar, dan sumber lainnya terkait dengan kehidupan masyarakat Kecamatan Mangarabombang.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah suatu proses pengaturan urutan data, pengorganisasian menjadi pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Sementara menurut (Bogdan & Biklen, 1998), analisis data kualitatif melibatkan upaya bekerja dengan data, mengorganisirnya, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, mengidentifikasi aspek yang penting dan yang dipelajari, serta membuat keputusan tentang informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain. (Moleong, 2018).

Menurut (Miles & Huberman, 1992). Tahapan analisis data digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Metode Analisis Data (Miles & Huberman, 1992).

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan rangkuman, memilih aspek-aspek pokok, dan memfokuskan perhatian pada elemen-elemen yang signifikan dengan mencari tema dan pola (Sugiyono, 2016). Dalam konteks penelitian kualitatif, reduksi data mengacu pada proses pemilihan, penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan. Proses reduksi data terus berlanjut sepanjang proyek kualitatif berlangsung hingga laporan akhir dapat disusun. (Miles & Huberman, 1992).

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yang sangat penting setelah analisis data adalah penyajian data. Penyajian data merujuk pada susunan informasi yang terstruktur dengan tujuan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles & Huberman, 1992).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data merujuk pada upaya untuk mencari, menguji, mengecek kembali, atau memahami makna, arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi dalam data. Sementara itu, kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya mungkin masih samar atau kurang jelas. Setelah dilakukan penelitian, kesimpulan dapat menjadi lebih terang dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori yang lebih terperinci. (Sugiyono, 2016).

Setelah melakukan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan metode analisis (Miles & Huberman, 1992), selanjutnya pemilihan alternatif solusi yang dianggap paling sesuai yaitu menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan metode pengambilan keputusan dengan melihat kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk mengambil keputusan. AHP digunakan untuk pengambilan keputusan dengan multi kriteria. Dengan menggunakan AHP, suatu

persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya (Warjiyono, 2010).

AHP digunakan untuk mencapai tujuan ketiga yaitu menentukan dampak prioritas dalam pembangunan kawasan industri Takalar (KITA). Dengan menggunakan AHP, memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang efektif atas permasalahan yang dianalisis. Prinsip dasar AHP adalah mengubah masalah yang kompleks, tidak terstruktur, strategis, dan dinamis menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, yang kemudian diatur dalam suatu hierarki. Setelah itu, tingkat kepentingan relatif dari setiap variabel dibandingkan satu sama lain. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, dilakukan sintesis untuk menentukan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan peran krusial dalam memengaruhi hasil sistem tersebut (Sumiyati et al., 2011). Prinsip dasar AHP menurut (Saaty, 1986) dalam (Warjiyono, 2010) meliputi:

a. Penyusunan Hierarki

Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan memecahkannya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya atau mensintesisnya. Permasalahan yang akan diselesaikan diuraikan menjadi kriteria-kriteria dan alternatif, yang selanjutnya disusun menjadi struktur hirarki.

b. Penilaian Kriteria dan Alternatif

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Menurut Saaty, untuk berbagi persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5. Skala Perbandingan Pasangan.

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai diantara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Sumber: (Marimin, 2004).

c. Penentuan Prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot prioritas. Bobot prioritas dihitung dengan manipulasi melalui matriks atau penyelesaian persamaan matematik.

d. Konsistensi Logis

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsistensi sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Konsistensi memiliki dua makna yang pertama bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya.

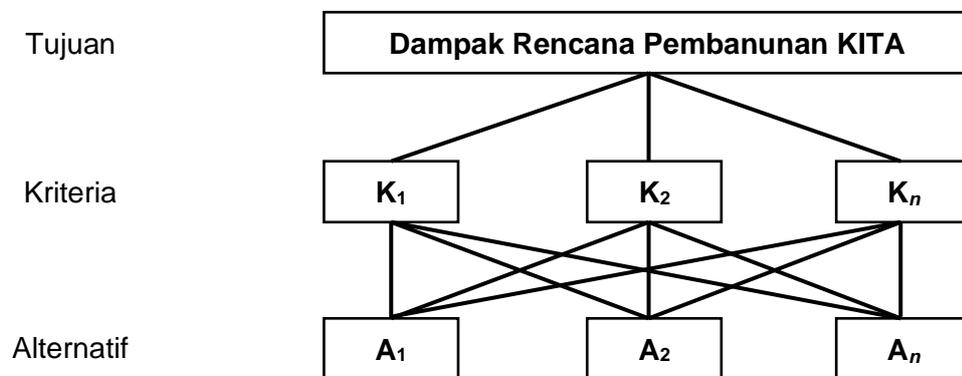
AHP memiliki berbagai aplikasi yang luas, salah satunya adalah dalam mengatasi masalah alokasi sumber daya, analisis keputusan berdasarkan manfaat atau biaya, peringkat beberapa alternatif, perencanaan masa depan yang diproyeksikan, dan penentuan prioritas pengembangan unit usaha serta masalah kompleks lainnya. Dalam konteks ini, hirarki digunakan sebagai alat untuk memahami secara lebih mudah masalah yang kompleks. Proses ini melibatkan dekonstruksi masalah menjadi elemen-elemen terkait, pengelompokan elemen tersebut secara homogen, penyusunan dalam suatu hierarki, dan akhirnya melakukan penilaian serta pengambilan keputusan. Hirarki berfungsi sebagai alat abstraksi yang mempermudah pemahaman struktur suatu sistem. Sistem tersebut terdiri dari interaksi antara komponen-komponen dan dampaknya pada sistem secara keseluruhan. Abstraksi ini terbentuk sebagai serangkaian struktur terkait yang berpusat pada suatu tujuan utama (*ultimate goal*). Struktur tersebut turun ke sub-sub tujuan, ke pelaku atau aktor yang memberikan dorongan, dan terus turun hingga mencapai tujuan pelaku. Dalam perjalanannya, abstraksi mencakup kebijakan dan strategi yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut, seperti pada Gambar 5.

Dalam proses pengambilan keputusan, perhatian utama harus difokuskan pada tahap pengumpulan data, dengan harapan bahwa data yang dikumpulkan dapat mencerminkan nilai sesungguhnya. Penilaian derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan melalui pendekatan perbandingan berpasangan. Metode perbandingan berpasangan digunakan secara luas untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen dan kriteria yang terlibat dalam proses ini. Langkah-langkah perbandingan berpasangan diulang untuk semua elemen pada

setiap tingkat hierarki. Elemen yang memperoleh bobot tertinggi menjadi pilihan keputusan yang layak dipertimbangkan. Dalam konteks kriteria dan alternatif, perbandingan berpasangan dilakukan pada setiap tingkat hierarki, membandingkan setiap elemen secara berpasangan untuk menghasilkan nilai tingkat kepentingan dalam bentuk penilaian kualitatif (Warjiyono, 2010).

Adapun proses-proses menurut Saaty (1986) yang harus dilakukan pada metode AHP meliputi:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas.



Gambar 5. Abstraksi Susunan Hirarki Permasalahan.

2. Menentukan prioritas elemen
Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Matriks perbandingan berpasangan diisi dengan menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya.
3. Sintesis
Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas.
4. Mengukur Konsistensi
Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada karena kita menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis dan Wilayah Administratif

Kecamatan Mangarabombang merupakan salah satu dari sepuluh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berlokasi sekitar 9,6 km ke selatan dari Ibukota Kabupaten Takalar, kecamatan ini memiliki luas wilayah mencapai 10.050 Ha. Secara geografis, Kecamatan Mangarabombang terbagi menjadi dua belas desa, antara lain Desa Punaga, Desa Laikang, Desa Cikowang, Desa Pattoppakang, Desa Bontoparang, Desa Panyangkalang, Desa Bontomanai, Desa Lakatong, Desa Topejawa, Desa Banggae, Desa Mangadu, dan Desa Lengkese. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mangarabombang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bontoala, Polombangkeng Selatan, Takalar
- Sebelah timur berbatasan dengan Bangkala Barat, Jeneponto
- Sebelah selatan berbatasan dengan Mappakasunggu, Takalar
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores

Luas wilayah dan persentase dari masing masing desa dan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut;

Tabel 6. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019.

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Punaga	1.574	15,66
2	Laikang	1.960	19,50
3	Cikoang	556	5,53
4	Patokapang	1.056	10,51
5	Bonto Parang	468	4,66
6	Panyangkalang	1.107	11,01
7	Bonto Manai	961	9,56
8	Lakatong	356	3,54
9	Topejawa	484	4,82
10	Banggae	374	3,72
11	Mangadu	271	2,70
12	Lengkese	883	8,72
	Jumlah	10,050	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Penelitian akan dilakukan di Desa Punaga dan Laikang yang secara administratif memiliki wilayah terluas dari desa lainnya. Desa Punaga dan Laikang secara bersama sama memiliki luasan 3.534 Ha atau sekitar 35,1% dari seluruh wilayah Kecamatan Mangarabombang. Pembangunan kawasan industri Takalar (KITA) menjadi megaproject strategis nasional bersama tujuh proyek yang ada di Sulawesi Selatan.

4.2. Pola Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan, berkaitan dengan aktivitas manusia di wilayah tertentu atau eksploitasi lahan oleh manusia untuk tujuan khusus. Di Kecamatan Mangarabombang, penggunaan lahan terdiversifikasi menjadi delapan jenis, termasuk Sawah, Semak Belukar, Tegalan/Ladang, Rawa, Tubu Air, Pantai Berpasir, Permukiman, dan Sungai. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada Tabel 7 dan peta Penggunaan Lahan Kecamatan Mangarabombang.

Tabel 7. Penggunaan di Kecamatan Mangarabombang Tahun 2019.

No.	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah	5.129	51
2	Semak Belukar	500	5
3	Telaga / Ladang	1.516	15
4	Rawa	705	7
5	Tubu Air	46	0,4
6	Pantai Berpasir	560	5,5
7	Permukiman	912	9,1
8	Sungai	682	7
Jumlah		10,050	100

Sumber: RTRW Kabupaten Takalar, 2012-2032

Potensi di bidang pertanian di Kecamatan Mangarabombang tercermin dari pola penggunaan lahan yang dominan. Lebih dari setengah dari total luas wilayah Kecamatan Mangarabombang ternyata diwujudkan dalam bentuk lahan persawahan. Lahan persawahan ini tersebar di sebelas desa dan satu kelurahan di wilayah kecamatan tersebut.

Penelitian telah menjadi sektor unggulan di Kabupaten Takalar selama periode 2017 hingga 2020, sebagaimana dicatat oleh Jafar & Meilvidiri (2021). Pada tahun 2017, Kabupaten Takalar berhasil meraih peringkat ketiga dalam produksi rumput laut dengan total mencapai 291.077,4 ton. Meskipun sektor

pertanian memiliki potensi yang besar, namun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, kebutuhan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebaran luasan persawahan di Kecamatan Mangarabombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Luas Lahan Sawah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang (Hektar), 2019.

No.	Desa / Kelurahan	Non Irigasi (Ha)	Persentase (%)
1	Punaga	108,20	15,66
2	Laikang	108,30	19,50
3	Cikoang	168,10	5,53
4	Patokapang	162,50	10,51
5	Bonto Parang	57,00	4,66
6	Panyangkalang	170,18	11,01
7	Bonto Manai	726,01	9,56
8	Lakatong	219,14	3,54
9	Topejawa	274,98	4,82
10	Banggae	199,97	3,72
11	Mangadu	160,40	2,70
12	Lengkese	594,60	8,72
Jumlah		2.949,20	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

4.3. Kependudukan

Dinamika penduduk mencerminkan fenomena peningkatan atau penurunan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perkembangan penduduk di Kecamatan Mangarabombang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah kelahiran dan kematian, yang secara langsung memengaruhi perubahan populasi secara alami. Selain itu, pergerakan penduduk melalui migrasi, baik keluar maupun masuk, juga turut mempengaruhi dinamika penduduk di Kecamatan Mangarabombang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Kecamatan Mangarabombang mencapai 40.119 jiwa. Informasi lebih rinci mengenai jumlah penduduk dapat ditemukan dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019.

No.	Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Punaga	1.143	1.237	2.379	0,92
2	Laikang	2.617	2.674	5.291	0,98
3	Cikoang	1.553	1.658	3.215	0,94
4	Patokapang	1.458	1.464	2.922	1,00
5	Bonto Parang	1.076	1.181	2.257	0,91
6	Panyangkalang	1.356	1.435	2.791	0,94
7	Bonto Manai	1.870	1.903	3.759	0,98
8	Lakatong	1.336	1.479	2.812	0,90
9	Topejawa	1.856	1.940	3.796	0,96
10	Banggae	1.804	1.800	3.604	1,00
11	Mangadu	1.720	1.772	3.442	0,97
12	Lengkese	1.825	1.962	3.787	0,93
Jumlah		19.614	20.505	40.119	0,96

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penduduk Kecamatan Mangarabombang didominasi oleh perempuan, yang mencapai 51% dari total penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk mencerminkan penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, dan dapat menunjukkan apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk mengacu pada hubungan antara jumlah penduduk dan luas lahan, dan secara umum diukur sebagai perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah dalam satuan luas tertentu. Informasi lebih lanjut mengenai penduduk Kecamatan Mangarabombang dapat ditemukan dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019.

No.	Desa / Kelurahan	Presentase penduduk (%)	Kepadatan penduduk per km ² (Jiwa)
1	Punaga	7,38	151
2	Laikang	13,05	269
3	Cikoang	7,78	577
4	Patokapang	7,29	276
5	Bonto Parang	5,36	482
6	Panyangkalang	7,18	252
7	Bonto Manai	9,25	392
8	Lakatong	6,86	791
9	Topejawa	9,94	846
10	Banggae	8,94	963
11	Mangadu	8,07	1.288
12	Lengkese	8,89	429
	Jumlah	100	398

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Desa Punaga dan Desa Laikang yang menjadi lokasi penelitian memiliki presentase sebaran penduduk yang cukup besar dengan kepadatan penduduk yang cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh luasan wilayah administratif kedua desa ini belum dipenuhi oleh jumlah penduduk yang ada didalamnya.

Pembangunan kawasan industri di wilayah minim penduduk adalah suatu tantangan tersendiri, namun juga bisa memiliki berbagai manfaat jika dilakukan dengan baik. Penting untuk diingat bahwa pembangunan kawasan industri di wilayah minim penduduk memerlukan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara pemerintah, investor, dan komunitas setempat. Dengan pendekatan yang tepat, kawasan industri tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang bermanfaat bagi wilayah tersebut.

4.4. Mata Pencaharian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penggunaan lahan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, masyarakat di wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan (KITA), khususnya di Desa Punaga dan Desa Laikang, mayoritas mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan, yakni mencapai 36%. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan, terutama sebagai petani rumput laut, juga memiliki andil signifikan

sebesar 25%. Adapun sektor pedagang/swasta menyumbang sekitar 16%, sementara aparat pemerintahan mencapai 10%, dan pekerjaan lainnya menyumbang kurang dari 10%. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pekerjaan utama responden diperlihatkan pada Tabel 11 berikut:

Tabel 11. Jenis pekerjaan utama dan sampingan Masyarakat di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar, 2019.

No.	Uraian	Pekerjaan Utama		Pekerjaan Sampingan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Petani/Peternak	36	36	33	33
2	Pegawai Negeri Sipil/Karyawan	3	3	0	0
3	Pedagang/Swasta	16	16	2	2
4	Nelayan	5	5	4	4
5	Petani Rumput Laut	25	25	5	5
6	Buruh Bangunan	1	1	8	8
7	Aparatur Desa	10	10	1	1
8	Tukang Kayu	1	1	1	1
9	Honoror	3	3	0	0
10	Budidaya Lobster	0	0	5	5
11	Tidak Bekerja	0	0	30	30
12	Lainnya	0	0	16	16
Jumlah		100	100	100.00	100.00

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2020.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penduduk Desa Laikang dan Desa Punaga cenderung tidak memiliki pekerjaan sampingan secara umum. Sebanyak 33% dari responden memilih bertani dan beternak sebagai pekerjaan sampingan, sedangkan hanya sebagian kecil yang memilih bekerja sampingan sebagai tukang kayu, aparaturnya desa (honoror), dan pedagang. Sebagian besar responden lainnya memiliki pekerjaan sampingan lainnya termasuk di dalamnya sopir angkot, fotografi, petambak garam, aktivis dan berdakwah.

4.5. Tingkat Pendidikan

Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Hasil wawancara terhadap 100 responden di Desa Punaga dan Desa Laikang menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan masyarakat cukup baik. Sebanyak 23% responden telah mengenyam

Mayoritas responden memiliki pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat, sedangkan hanya 14% dari total responden yang tidak menyelesaikan sekolah dasar. Selengkapnya mengenai pendidikan responden dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Tingkat Pendidikan Responden di Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), 2019.

No.	Uraian	Pekerjaan Utama	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	Tidak tamat SD	14	14,00
3	SD	36	36,00
4	SMP/Sederajat	19	19,00
5	SMA/Sederajat	23	23,00
6	Diploma/Sarjana	8	8,00
Jumlah		100	100

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah, 2020.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi tenaga kerja lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

4.6. Sarana dan Prasarana

Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan suatu wilayah atau negara, penting untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisnis dengan lancar, seperti yang dikemukakan oleh (Parid & Alif, 2020). Pentingnya sarana dan prasarana juga tidak terelakkan dalam pembangunan desa, karena ketersediaan infrastruktur ini dapat mendukung berbagai kegiatan, termasuk pendidikan dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana di pedesaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Mangarabombang dapat dikategorikan sebagai cukup baik. Keadaan ini tentu saja diperkuat oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di wilayah tersebut. Selengkapnya mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Mangarabombang dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Jumlah Gedung Sekolah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019.

No.	Desa / Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA/SMK	Total
1	Punaga	2	3	1	-	6
2	Laikang	2	5	1	-	8
3	Cikoang	1	3	1	2	7
4	Patokapang	2	2	-	-	4
5	Bonto Parang	1	1	-	-	2
6	Panyangkalang	1	2	1	-	4
7	Bonto Manai	3	3	1	-	7
8	Lakatong	1	3	-	-	4
9	Topejawa	2	3	-	-	5
10	Banggae	2	3	-	-	5
11	Mangadu	3	3	1	-	7
12	Lengkese	1	4	1	2	8
Jumlah		21	35	7	4	67

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan di Kecamatan Mangarabombang memiliki dampak pada tingkat pendidikan masyarakat di sana. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap dan menumbuhkan kepentingan, terutama bagi para peternak dalam menghadapi perubahan.

b. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menjaga sarana serta prasarana yang berkualitas. Partisipasi aktif keduanya diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Di Kecamatan Mangarabombang, strategi pembangunan sarana dan prasarana yang seimbang dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya memerlukan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian di Kecamatan Mangarabombang dapat dilihat pada Tabel 14 berikut:

Tabel 14. Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mangarabombang, 2019.

No.	Desa / Kelurahan	Toko / Swalayan	Pasar	Kedai makanan / restoran	Objek Wisata	Total
1	Punaga	24	1		2	27
2	Laikang	25		7	1	33
3	Cikoang	28		4	1	33
4	Patokapang	23		2		25
5	Bonto Parang	28		1		29
6	Panyangkalang	45		1		46
7	Bonto Manai	50		1		51
8	Lakatong	29		1		30
9	Topejawa	52		9	1	62
10	Banggae	40		2		42
11	Mangadu	16	1	15		32
12	Lengkese	99	2	12		113
	Jumlah	459	4	55	5	523

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana perekonomian di Kecamatan Mangarabombang didominasi oleh toko dan swalayan, dengan jumlah sebanyak 459 unit yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan tersebut. Keberadaan toko dan swalayan juga ditunjang dengan adanya pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan masyarakat setempat. Menurut (Mutolib et al., 2019), berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal, mempromosikan budaya lokal, dan memperkuat ikatan sosial di antara penduduk desa.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)

Rencana pelaksanaan Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) di Desa Punaga dan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, akan dijalankan oleh PT Berikat Nusantara (PT KBN). Rencana kegiatan pengembangan kawasan industri ini mengacu pada konsep kawasan industri yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Definisi Kawasan Industri dalam konsep ini menyatakan bahwa itu adalah suatu wilayah di mana kegiatan industri terpusat dan dilengkapi dengan infrastruktur serta fasilitas pendukung yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang memiliki izin usaha.

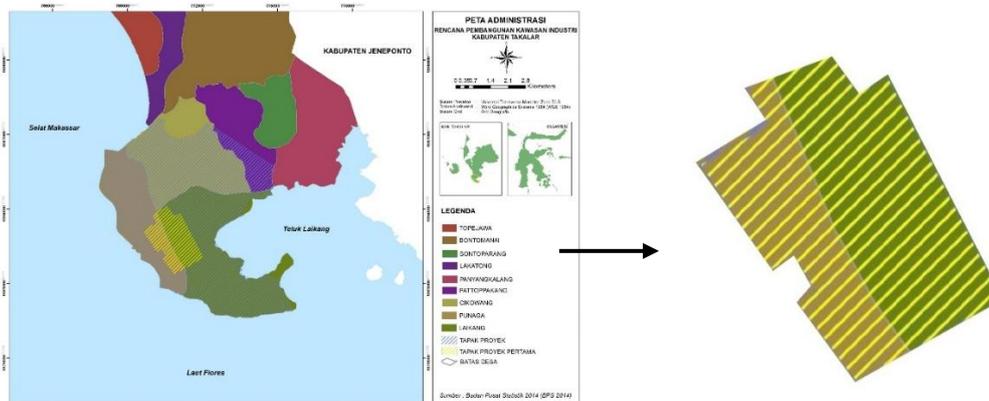
Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: pembangunan zona peruntukan industri, pembangunan prasarana industri, dan pembangunan sarana penunjang. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, luas zona peruntukan industri maksimal adalah 70% dari total luas (2.450 ha). Dengan demikian, luas peruntukan zona industri di Kawasan Industri Takalar memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Sementara itu, luas zona peruntukan sarana penunjang, yang seharusnya berada dalam kisaran 8-12% dari total luas (280 – 420 ha), menunjukkan bahwa luas peruntukan zona sarana penunjang KITA kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis prasarana industri yang akan dibangun di dalam zona peruntukan prasarana industri dapat diidentifikasi melalui Tabel x, yang mencakup empat zona utama: 1) zona industri, 2) zona prasarana industri, 3) zona sarana penunjang, dan 4) zona ruang terbuka hijau.

Tabel 15. Pembagian Peruntukan Kawasan Industri Takalar Seluas 3.500 Ha.

No.	Zone (Zona Peruntukan)	Luas (ha)	%	Ketentuan (%) *
A. Zona Industri				
1.	Kawasan Berikat Daur Ulang Industri Pengolahan Logam Non Besi	769,272		
2.	Industri Pengolahan Bukan Daur Ulang	625,202		
3.	Industri Agribisnis	337,567		
Jumlah		1.722,541	49,21	70,00
B. Zona Prasarana Industri				
1.	Fasilitas Logistik	50,000		
2.	Fasilitas Umum	632,794		
Jumlah		682,794	19,51	8-12
C. Zona Sarana Penunjang				
1.	Kantor, Perumahan & Lapangan Golf	142,660		
2.	Infrastruktur Bisnis	50,000		
Jumlah		192,660	5,50	8-12
D Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)		902,005	27,77	10,00
Total		3.500,000	100,0	100,0

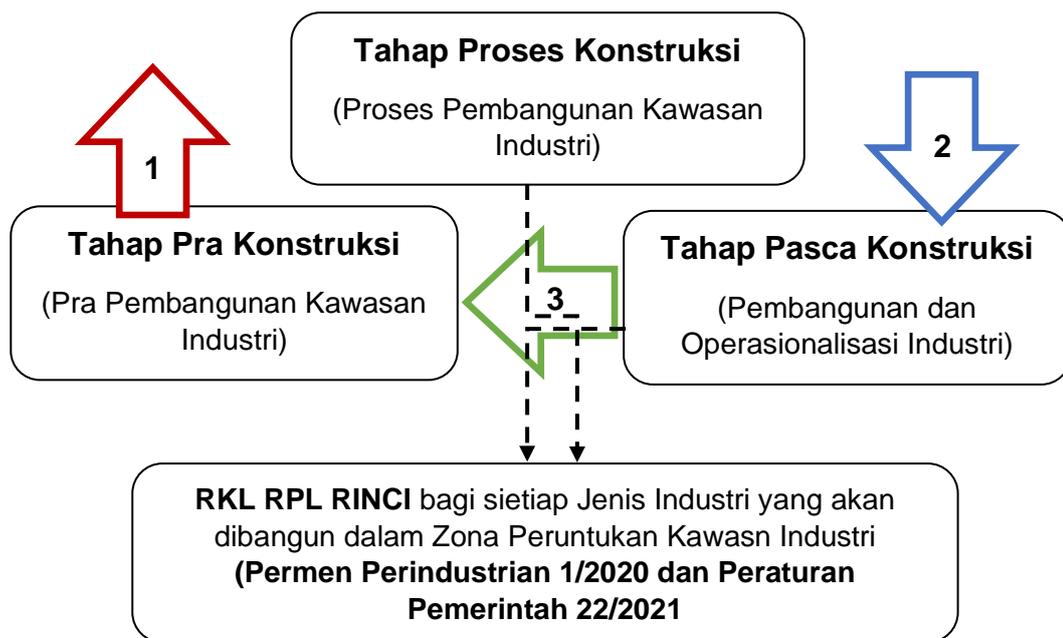
Sumber: PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), *Published*, 2021.

Tabel 15 diatas menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari pembagian peruntukan terbesar merupakan zona industri yaitu sebesar 49,21 % dari total wilayah yang digunakan. Kegunaan lahan sebagai kantor, perumahan dan sarana penunjang lainnya hanya mengambil 5,50% dari total wilayah pembangunan. Adapun Desa Punaga dan Laikang merupakan lokasi tapak awal dari pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) yang dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini:



Gambar 6. Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) di Desa Laikang dan Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Dengan mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (1) Tahap Pra Konstruksi (Pra Pembangunan Kawasan Industri), (2) Tahap Proses Konstruksi (Proses Pembangunan Kawasan Industri beserta prasarana dan sarana penunjangnya), dan (3) Tahap Pasca Konstruksi (Pembangunan dan Operasionalisasi Industri). Silakan lihat Gambar 7 untuk detailnya.



Gambar 7. Tahapan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), Sulawesi Selatan.

Desa Laikang dan Desa Punaga, yang terletak di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dipilih sebagai lokasi pertama untuk proyek pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA). Pada lokasi ini, tahap pra konstruksi atau pra pembangunan Kawasan Industri akan dilaksanakan. Tahap pra-konstruksi pengembangan kawasan industri melibatkan serangkaian kegiatan penting dan proses perencanaan untuk memastikan proyek konstruksi yang sukses dan efisien. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang, analisis yang menyeluruh, dan koordinasi yang efektif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek. Setelah langkah-langkah ini selesai, proyek dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi.

5.1.1. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pra-Konstruksi

Lingkup kegiatan pra konstruksi dari Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dapat dikategorikan menjadi lima kegiatan utama. Kelima kegiatan tersebut diperkirakan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak yang signifikan dan penting pada lingkungan sekitar Kawasan Industri. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa tidak ada kegiatan lain dalam lingkup kegiatan pra konstruksi yang juga turut memberi dampak pada lingkungan Kawasan Industri dan sekitarnya, tetapi kegiatan lain tersebut dinilai tidak signifikan. Penetapan kelima kegiatan itu terutama didasarkan pada pengamatan terhadap aktivitas kawasan industri, di mana dampak kegiatan lain yang dimaksud dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting pada lingkungan. Adapun kelima kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Desain Kawasan Industri

Lahan Kawasan Industri yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap PT Kawasan Berikat Nusantara adalah seluas 3.500 ha (Surat Rekomendasi Bupati Takalar Nomor 500/2409/Ekon/Tertanggal 7 Oktober 2019). Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri dan Hasil Disain Kawasan Industri, penetapan terhadap lahan tersebut mengindikasikan bahwa: (1) sebagian besar luas lahan (49,21%) dialokasikan untuk zona industri, sementara sisanya dialokasikan sebagai: (2) zona prasarana industri (19,51%), (3) zona sarana penunjang (5,50%), dan (4) zona Ruang Terbuka Hijau (27,77%). Meskipun demikian, dalam konteks Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri tersebut, pembagian zona di Kawasan Industri Takalar (KITA) dapat menimbulkan potensi dampak kekumuhan di masa depan. Hal ini terutama disebabkan oleh alokasi luas lahan yang diperuntukkan pada zona sarana penunjang, yang seharusnya mencapai kisaran 8–12% dari total luas Kawasan Industri (280–420 ha). Alokasi yang kurang untuk zona sarana penunjang mungkin mengakibatkan kekurangan fasilitas perumahan bagi karyawan di berbagai tingkatan, seperti manajer, staf administrasi, dan terutama pekerja industri. Karena itu harus dapat mengalihkan kelebihan lahan pada zona peruntukan prasarana industri ke zona sarana penunjang atau dapat pula berupa pembangunan rumah atau pemukiman bertingkat.

2. Sosialisasi Stakeholder

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT Kawasan Berikat Nusantara telah dilaksanakan secara berulang, namun cakupannya masih terbatas pada pihak-pihak terkait di tingkat pemangku kepentingan, mulai dari tingkat Kabupaten Takalar hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan sosialisasi pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi atau izin lokasi. Sementara itu, pada tingkat internal pemerintah Kabupaten Takalar, melalui kegiatan sosialisasi, telah dicapai kesepakatan bahwa tanggung jawab pembebasan lahan berada di bawah pemerintah Kabupaten Takalar, terutama untuk lahan di luar luasan 350 ha, sedangkan tanggung jawab pembangunan Kawasan Industri berada di bawah wewenang PT Kawasan Berikat Nusantara. Pihak pemda Kabupaten Takalar juga sesungguhnya telah berulang kali melakukan Sosialisasi bertalian dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar pada masyarakat lokal khususnya pada warga Desa Punaga, Laikang dan Cikoang Kecamatan Mangarabombang. Kegiatan Sosialisasi selanjutnya bertalian dengan Disain Kawasan Industri Takalar (*Rencana Induk-Master Plan*) masih dalam tahap perencanaan seiring dengan pengurusan izin, pembebasan lahan, dan kegiatan pembangunan Kawasan Industri selanjutnya.

3. Pembebasan Lahan

Luas lahan seluruh Kawasan Industri Takalar (KITA) adalah 3.500 ha. Pada tahap pertama pembangunan Kawasan Industri baru akan dibebaskan oleh PT KBN sekitar 10% dari luas total yang dimaksud, yakni 350 ha. Posisi lahan tersebut tepatnya berada dalam Zona Peruntukan Industri Daur Ulang Tembaga dan Aluminium atau secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah pemerintahan Desa Punaga dan Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang. Status kepemilikan lahan di lokasi tersebut umumnya merupakan milik badan usaha, tanah negara, dan kepemilikan perorangan warga dari kedua Desa yang disebutkan. Lahan-lahan tersebut termasuk dalam kategori lahan non-irigasi atau lahan yang kurang subur. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri,

diizinkan untuk mengubah statusnya menjadi lahan industri. Sisa lahan berikutnya (seluas 3.150 ha akan dibebaskan kemudian secara bertahap oleh pemda Kabupaten Takalar sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Takalar ke dalam Kawasan Industri.

4. Mobilisasi Alat Berat

Alat berat sepenuhnya didatangkan dari luar yang umumnya melalui jalur laut menuju pelabuhan terdekat dengan Kawasan Industri. Jenis alat berat yang umum digunakan adalah: *Excavator, Dozer, Loader, Roller/Compector, Dump Truck*, dan *Mixer Truck*. Jenis alat berat tersebut akan digunakan dalam pembentukan muka tanah dan air larian yang umumnya dimulai dengan pembukaan vegetasi, pembukaan tanah humus (top soil), pengangkutan material tanah untuk pematangan muka tanah, penggalian material tanah dan lobang pondasi, pembuatan jalan dan drainase, dsb. Sehubungan dengan dampak lingkungan, hal terpenting untuk diperhatikan dalam memobilisasi alat-alat berat adalah: (1) harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional (bersertifikat) khususnya dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan, pengamanan tanah penutup dan bahan-bahan organik lainnya, serta dalam mengamankan satwa liar dalam proses migrasinya ke tempat lain di sekitarnya (bila ada), (2) pengangkutan material baik untuk pematangan lahan (tanah timbunan) maupun untuk pembangunan prasarana dan sarana industri (material bangunan) harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya terutama pada area yang dilalui terdapat aktivitas sosial seperti: jalur-jalur padat lalu lintas, jalur pemukiman, dan lain-lain atau dengan kata lain sedapat mungkin tidak boleh berpapasan dengan aktivitas sosial yang dimaksud, demi menghindari peristiwa yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan lingkungan sosial lainnya. Termasuk di dalamnya aktivitas pengangkutan material yang diimpor dari luar melalui pelabuhan terdekat juga harus dilakukan pada jam-jam tertentu yang tidak bersinggungan dengan aktivitas sosial pada jalur yang bersangkutan atau menggunakan jalur tertentu yang bersifat darurat (sementara).

5. Rekrutmen (Kontraktor, Sub Kontraktor, dan Tenaga Kerja Kasar)

Dalam pembangunan tahap pertama KITA seluas 350 ha, terdapat 4 jenis pekerjaan kontraktor, yakni: (1) pekerjaan pembangunan zona peruntukan industri (pekerjaan pengukuran, pembentukan kaveling dan pembentukan muka tanah dan air larian); (2) pekerjaan pembangunan prasarana industri (pekerjaan

pembangunan pembangkit listrik dan jaringannya, pekerjaan pembangunan instalasi air baku dan air minum, pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan limbah: cair, padat, dan limbah B3, pekerjaan pembangunan sistem drainase yang dipadukan dengan RTH, pekerjaan pembangunan sistem jaringan telekomunikasi, dan pekerjaan pembangunan sistem transportasi); (3) pekerjaan pembangunan sarana penunjang (pekerjaan pembangunan stasiun kontrol bea cukai, pekerjaan pembangunan kantor, perumahan dan lapangan olah raga, pekerjaan pembangunan rumah ibadah, pekerjaan pembangunan poliklinik atau RSUD, pekerjaan pembangunan fasilitas komersial: trade center dan perbankan, dan pekerjaan pembangunan pos keamanan); dan (4) pekerjaan pembangunan ruang terbuka hijau (pekerjaan disain landscape, pekerjaan pemilihan jenis tanaman yang dapat berfungsi sebagai: penyejuk, penyerap polutan, dan peredam bising, pekerjaan pembibitan, pekerjaan penanaman, dan pekerjaan pemeliharaan).

5.1.2. Rencana Pembangunan KITA Tahap Proses Konstruksi

Ruang lingkup kegiatan pada tahap proses konstruksi, sebagaimana ditegaskan dalam Master Plan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dan berdasarkan pengalaman dari kajian AMDAL serupa pada kegiatan pembangunan Kawasan Industri di lokasi lain, mencakup setidaknya lima kegiatan utama yang diprediksi berpotensi menimbulkan dampak besar dan signifikan selama berlangsungnya tahap proses konstruksi, yakni: (1) Pengangkutan Material Bangunan (2) Pembangunan Zona Peruntukan Industri, (3) Pembangunan Prasarana Industri, (4) Pembangunan Sarana Penunjang, dan (5) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Deskripsi singkat terhadap kelima kegiatan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pengangkutan Material Bangunan

Pengangkutan material bangunan direncanakan dilakukan dari Daerah DAS Jeneberang dan lainnya dari Kabupaten Takalar sendiri menuju lokasi Kawasan Industri. Pengangkutan material bangunan ini diprediksi berlangsung intensif dengan frekuensi pengangkutan yang tinggi selama tahap pembangunan fisik berlangsung, mulai dari pembangunan prasarana industri dan pembangunan sarana penunjang pada tahap konstruksi maupun pada pembangunan industri pada zona peruntukan industri pada tahap pasca konstruksi Kawasan Industri

Takalar. Material bangunan yang dimaksud dapat berupa: material galian (pasir, krikil, tanah timbunan, dan batu pondasi) dan hasil industri (semen, batu merah atau batu bata, seng, kusen, pintu, rangka baja ringan, besi beton, besi holo, dan hasil industry lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan fisik Kawasan Industri. Pengangkutan material ini selain akan melewati Jalur Poros Kabupaten Gowa dan Takalar juga sekaligus akan melewati sejumlah pemukiman di Kecamatan Mangarabombang, mulai dari Desa Topejawa, Desa Lakatong, Desa Bontomanai, hingga masuk ke dalam Kawasan Industri (yakni: Desa Punaga, dan Desa Laikang).

2. Pembangunan Zona Peruntukan Industri

Pembangunan zona peruntukan industri yang luasnya direncanakan maksimal 70% dari luas total Kawasan Industri, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, dibagi menjadi tiga kaveling zona, yakni: (1) kaveling zona peruntukan industri daur ulang pengolahan logam non besi seluas 769,272 ha, (2) kaveling zona peruntukan bukan daur ulang (industri terbaru) seluas 615,208 ha, dan (3) kaveling zona peruntukan industri agribisnis (mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi) seluas 337,567 ha. Setiap sub zona peruntukan industri selanjutnya dipecah menjadi beberapa kaveling berukuran lebih kecil untuk kemudian ditawarkan kepada investor atau calon perusahaan yang hendak bergabung dalam Kawasan Industri.

3. Pembangunan Prasarana Industri

Pembangunan Prasarana Industri akan ditempatkan dalam zona seluas 682,794 ha (19,51% dari luas total), Luasan zona peruntukan prasarana industri ini telah melampaui persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri menetapkan bahwa luas Zona Prasarana Industri sebesar 8–12% dari total luas Kawasan Industri. Berbeda dengan zona industri dan zona sarana penunjang yang berbentuk zona khusus, Zona Prasarana Industri justru posisinya berada atau melengkapi setiap zona di dalam Kawasan Industri. Fungsinya adalah melayani kebutuhan dasar

dari setiap zona dalam Kawasan Industri. Dalam zona peruntukan prasarana industri ini direncanakan akan dibangun sejumlah infrastruktur bagi keberlangsungan atau keberlanjutan sebuah Kawasan Industri. Jenis infrastruktur yang dimaksud adalah:

- a) Pembangunan Listrik dan Jaringannya
- b) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih
- c) Pengolahan Limbah Industri
- d) Sistem Drainase
- e) Sistem Telekomunikasi
- f) Sistem Jaringan Utilitas Terpadu
- g) Sistem Transportasi

4. Pembangunan Sarana Penunjang

Sarana penunjang dialokasikan pada zona seluas 192,660 ha (Standar 8–12% dari luas total Kawasan Industri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, memiliki struktur dan ketentuan tertentu untuk pengembangannya. Luasan ini sesungguhnya masih kurang dari yang ditetapkan (8-12%). Dari 192,660 ha tersebut, 142,660 ha diantaranya diperuntukkan sebagai Sub Zona *Office, Residential*, dan *Golf Course* (Kantor, Perumahan & Lapangan Golf), termasuk di dalamnya pemukiman buruh industri. Sedang sisanya seluas 50 ha diperuntukkan sebagai Sub Zona *Business Infrastructure* (Infrastruktur Bisnis).

Bangunan utama dalam zona sarana penunjang adalah Kantor Pengelola Kawasan dalam hal ini PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Bangunan utama lainnya adalah perumahan, lapangan olahraga, sarana peribadatan, dan pemukiman karyawan/buruh industri. Bangunan utama berikutnya adalah Rumah Sakit Umum (Tipe B) yang juga direncanakan akan dibangun dalam beberapa lantai. Rumah Sakit ini selain direncanakan untuk melayani karyawan industri juga sekaligus dapat melayani masyarakat sekitar kawasan. Bangunan Rumah Sakit diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Selain sub zona kawasan perkantoran, kawasan perumahan, dan penunjangnya yang telah disebutkan, juga dicadangkan sub zona peruntukan infrastruktur

bisnis seluas 50 ha. Sub zona ini dirancang untuk pembangunan kantor perbankan, pusat perdagangan, pusat perbelanjaan modern, kantor pos, tempat kuliner, pos keamanan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan di Kawasan Industri.

5. Pembangunan RTH

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, luas peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kawasan Industri Takalar (KITA) ditetapkan minimal sebesar 10% dari total luas Kawasan Industri. Dengan demikian, luas RTH dalam KITA diusulkan sebesar 902,005 ha (25,77%). RTH ini direncanakan dapat berupa green belt (jalur hijau), garden (taman atau kebun raya), atau perimeter (batas terluar atau keliling Kawasan Industri).

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dipadukan dengan Sistem Drainase dengan menggunakan konsep ekodrainase- sebagaimana yang dikemukakan pada penjabaran sistem drainase di muka. Dimana pada setiap lokalisasi RTH yang potensial atau memungkinkan secara geohidrologi dibuat Kolam Retensi atau Kolam Detensi yang dihubungkan (via sambungan pipa atau saluran terbuka) dengan sumur resapan pada setiap kaveling pabrik.

5.1.3. Rencana Pembangunan KITA Tahap Pasca Konstruksi/Operasional

Ruang lingkup kegiatan pada tahap pasca konstruksi/operasional dari Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting-sebagaimana yang ditegaskan dalam *Master Plan* Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), juga terdapat sekurang-kurang lima kegiatan utama yang diprediksi akan berdampak pada lingkungan, yakni: (1) Pembangunan dan Operasionalisasi Zona Peruntukan Industri Daur Ulang, (2) Pembangunan dan Operasionalisasi Zona Peruntukan Industri Bukan Daur Ulang, (3) Pembangunan dan Operasionalisasi Zona Peruntukan Industri Agribisnis, dan (4) Rekrutmen Tenaga Kerja Profesional.

Pembangunan Zona Peruntukan Industri di Kawasan Industri Takalar dialokasikan pada luasan maksimal sebesar 2.450 ha. Hal ini sesuai dengan standar maksimum, yang setara dengan 70% dari luas total Kawasan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan

Industri., tidak termasuk di dalamnya luasan Zona Prasarana Industri yang tidak dapat dipisahkan dari setiap zona, Secara garis besar pada zona peruntukan industri, terdapat tiga jenis kaveling industri utama yang direncanakan, yakni: (1) Kaveling Industri Daur Ulang Pengolahan Logam Bukan Besi (seluas 769,272 ha), (2) Kaveling Industri Pengolahan Bukan Daur Ulang (Industri Terbarukan atau Mengolah Sumberdaya Alam Terbarukan: seluas 615,208 ha), dan (3) kaveling Industri Agribisnis (mengolah hasil pertanian untuk tujuan pangan dan untuk tujuan yang lebih luas atau efek ganda dari hasil pertanian: seluas 337,567 ha).

1. Pembangunan dan operasionalisasi Industri Pengolahan Bukan Daur Ulang

Jenis Industri Bukan Daur Ulang (*Non Recycling Processing Industry*) dalam Kawasan Industri Takalar (KITA) dialokasikan pada zona seluas 615,208 ha. Luasan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Jenis industri yang direncanakan akan dibangun dalam zona ini adalah jenis industri yang mengolah sumberdaya alam terbarukan (sebutlah Industri Terbarukan), diantaranya adalah: (1) Industri Desalinasi Air Laut, (2) Industri Pembangkit Listrik Terbarukan (pemanfaatan sumberdaya alam: energi surya, energi angin, dan energi air laut), dan (3) Industri Hayati (Biofuel dan Biomassa). Tujuan utama dari ketiga jenis industri terbarukan tersebut adalah untuk memperkuat infrastruktur ekonomi dalam negeri khususnya dalam mendukung aktivitas industri.

2. Pembangunan dan Operasionalisasi Industri Agribisnis

Agribisnis bekerja pada rantai pasok pangan-makanan (*food supply chain*) dengan menfokuskan perhatian pada perolehan keuntungan melalui pengelolaan budidaya, pasca panen, pengolahan hasil hingga pemasaran. Industri agribisnis bergerak lebih jauh mensupport dalam bentuk teknologi pengelolaan budidaya, pasca panen, pengolahan hasil dan terutama teknologi dalam pemasaran hasil. Tujuan utamanya adalah memberi nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan ekspor atau dengan kata lain memperluas efek ganda (*multiplier effect*) dari hasil pertanian.

Industri Agribisnis (*Agribusiness Industry*) dalam Kawasan Industri Takalar dialokasikan pada zona seluas 337,567 ha. Berdasarkan potensi pertanian di Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia pada umumnya, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis industri agribisnis yang dapat dimasukkan dalam zona ini. Kesembilan jenis industri agribisnis yang dimaksud adalah: (1) Industri Tepung berbahan baku beras dan ubi kayu; (2) Industri VCO, Nata Decoco, dan Karbon Aktif berbahan baku buah kelapa dalam; (3) Industri Gula berbahan baku tebu atau enau; (4) Industri Pelezat Makanan berbahan baku rempah: cengkeh, lada, pala, dan panili; (5) Industri Minuman berbahan baku teh, kopi dan buah-buahan; (6) Industri Daging Segar berbahan baku daging sapi dan ayam ras; (7) Industri Ikan, Udang dan Kepiting Segar berbahan baku hasil tangkapan nelayan, budidaya keramba dan budidaya tambak tradisional; (8) Industri Agar-agar berbahan baku rumput laut; dan (9) Industri Kayu Lapis dan *Furniture* (Meubel) berbahan baku hasil hutan.

Baik Industri Terbarukan sebagai pilihan industri dalam *zona Non Recycling Processing Industry* (Kecuali Desalinasi Air Laut) maupun Industri Agribisnis (*Agribusiness Industry*) dalam Kawasan Industri Takalar, keduanya masih dalam bentuk zona peruntukan dalam luasan 3.500 ha atau masih dalam tahap perencanaan jangka panjang. Kedua jenis industri tersebut belum termasuk jenis industri yang akan direalisasikan pada tahap pertama pembangunan Kawasan Industri Takalar. Keduanya masih menunggu perkembangan pasar investasi dan kebijakan pengembangan Kawasan Industri berikutnya.

3. Rekrutmen Tenaga Kerja Profesional

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam draft AMDAL rencana pembangunan KITA, Jumlah keseluruhan tenaga kerja yang akan direkrut pada tahap Operasionalisasi KITA (pada luasan 3500 ha) diprediksi dapat mencapai 315.000 s/d 385.000 TK (standar 90-110 TK/ha), yang selanjutnya terbagi dalam tiga strata, yakni: (1) Level Manajer/Penyelia (berpendidikan minimal Sarjana, standar 3% dari total TK) atau sebanyak 9.450 s/d 11.550 TK, (2) Level Administrasi (berpendidikan minimal SMK/SMA atau sederajat, standar 20% dari total TK) atau sebanyak 63.000 s/d 77.000 TK, dan (3) Level Buruh Industri (berpendidikan minimal SMP atau sederajat, standar 77% dari total TK) atau sebanyak 242.550 s/d 296.450 TK. Pada tahap pertama pembangunan KITA,

yakni pada luasan 350 ha, jumlah tenaga kerja profesional yang dibutuhkan dapat mencapai 31.500 s/d 38.500 TK, yang selanjutnya juga terbagi dalam tiga strata, yakni: (1) Level Manajer/Penyelia (berpendidikan minimal Sarjana) sebanyak 945 s/d 1.155 TK, (2) Level Administrasi (berpendidikan minimal SMK/SMA atau sederajat) sebanyak 6.300 s/d 7.700 TK, dan (3) Level Buruh Industri (berpendidikan minimal SMP atau sederajat) sebanyak 24.255 s/d 29.645 TK.

5.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar

Persepsi masyarakat Desa Laikang dan Desa Punaga terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) ini dapat dikategorikan sebagai positif. Dalam aspek pengetahuan mengenai rencana kawasan industri, mayoritas informan menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya rencana pengembangan kawasan industri. Persepsi masyarakat mencerminkan bagaimana penduduk setempat memandang dan menilai rencana tersebut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan penerimaan dan kesuksesan proyek (Giridharan et al., 2017). Oleh karena itu, memahami dan merespons persepsi masyarakat adalah langkah awal yang krusial dalam membangun hubungan yang positif dan berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masyarakat Kabupaten Takalar memberikan sambutan positif terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA). Mereka melihat proyek ini sebagai peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperluas akses terhadap berbagai layanan dan fasilitas. Namun, ada juga beberapa keprihatinan yang muncul dari masyarakat terkait dengan rencana pembangunan KITA. Beberapa di antaranya mencakup kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, seperti polusi udara dan air, serta potensi gangguan terhadap ekosistem lokal. Masyarakat ingin memastikan bahwa rencana pembangunan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif.

Selain itu, ada juga perhatian terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi proyek. Masyarakat ingin memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan bahwa suara mereka didengarkan dalam pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan KITA.

Dalam menanggapi keprihatinan ini, pemerintah dan pengembang proyek KITA harus bersikap terbuka dan transparan. Mereka harus berkomunikasi dengan jelas tentang rencana pembangunan, mengadakan pertemuan terbuka, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan masukan mereka.

5.2.1. Persepsi yang Dipengaruhi Faktor Internal

Pengetahuan memiliki peran penting dalam membimbing individu dalam perilaku mereka pada waktu tertentu, yang merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Seseorang memperoleh pengetahuan melalui berbagai hasil proses belajar serta informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya (Patmawati, 2019).

1. Pengetahuan Masyarakat tentang Perubahan Demografis Terkait dengan Rencana Pembangunan KITA

Setiap kegiatan pembangunan berpotensi mengakibatkan perubahan dalam kondisi demografis lokasi kegiatan. Pembangunan kawasan industri, khususnya, dapat memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik demografis suatu wilayah. Masyarakat yang berada di lokasi pembangunan kawasan industri biasanya memiliki kesadaran dan kesiapan penuh terhadap potensi perubahan, terutama terkait dengan komposisi penduduk setempat, kepadatan penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk, dan mobilitas penduduk. (Suratmo, 2004).

Pengetahuan masyarakat tentang perubahan demografis yang terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) adalah faktor internal yang memengaruhi persepsi mereka. Pemahaman masyarakat tentang perubahan demografis yang mungkin terjadi akibat proyek ini dapat berdampak signifikan pada pandangan mereka terhadap rencana pembangunan. Dengan demikian, menjadi penting untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana pengetahuan masyarakat dapat memengaruhi persepsi mereka.

Menurut (Setiawan, 2016) pengetahuan masyarakat tentang demografi dapat memengaruhi sikap mereka terhadap proyek-proyek pembangunan. Pengetahuan yang kuat tentang bagaimana proyek tersebut dapat memengaruhi jumlah penduduk, komposisi usia, dan distribusi penduduk dapat menyebabkan reaksi yang beragam. Misalnya, jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang dampak peningkatan lapangan kerja terkait dengan proyek KITA, mereka mungkin lebih mendukung rencana pembangunan.

Namun, dalam beberapa kasus, pengetahuan yang terbatas atau salah kaprah tentang perubahan demografis dapat menyebabkan kekhawatiran. Masyarakat mungkin merasa cemas tentang peningkatan populasi yang mendadak, perubahan sosial yang mungkin terjadi, atau ketidakpastian terkait dengan dampak perubahan ini terhadap infrastruktur dan layanan sosial. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat adalah langkah penting dalam mengelola persepsi mereka.

Dalam rencana pembangunan KITA, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan transparan kepada masyarakat tentang bagaimana proyek ini dapat memengaruhi demografi lokal. Ini mencakup informasi tentang jumlah lapangan kerja yang akan diciptakan, dampak pada distribusi penduduk, serta bagaimana infrastruktur dan layanan sosial akan disesuaikan dengan perubahan ini. Penting juga untuk mencatat bahwa selain pengetahuan masyarakat, pendekatan komunikasi yang terbuka dan partisipatif akan memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi positif terhadap rencana pembangunan KITA. Mendengarkan kekhawatiran dan memberikan jawaban yang jelas akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

"saya yakin KITA akan membawa banyak lapangan kerja baru bagi penduduk Takalar. Ini bisa mengubah dinamika penduduk di sini, dengan munculnya orang-orang baru yang mencari pekerjaan."

Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa proyek ini dapat mempengaruhi komposisi penduduk melalui penciptaan lapangan kerja baru. Namun, seorang informan yang menunjukkan kekhawatiran terkait perubahan demografis yang mungkin terjadi. Seorang responden menyatakan,

"Saya khawatir dengan peningkatan jumlah penduduk, apakah infrastruktur dan layanan sosial akan mampu menangani pertumbuhan ini dengan baik?"

Pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kemampuan infrastruktur dan layanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam jumlah penduduk. Ada juga informan yang menyoroti pentingnya transparansi dalam komunikasi tentang dampak demografis dari proyek KITA. Seorang responden mencatat,

"Saya ingin mendengar informasi yang jelas tentang bagaimana proyek ini akan memengaruhi penduduk kami. Transparansi dalam penyampaian informasi adalah kunci."

Pendapat ini menunjukkan bahwa responden menginginkan penyediaan informasi yang akurat dan terbuka untuk memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi tentang rencana pembangunan.

Secara keseluruhan, pendapat responden mencerminkan keragaman dalam persepsi mereka tentang perubahan demografis terkait dengan rencana pembangunan KITA. Beberapa melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sementara yang lain memiliki kekhawatiran terkait infrastruktur dan layanan sosial. Penting untuk mendengarkan dan memahami berbagai perspektif masyarakat dalam hal merancang dan melaksanakan rencana pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi masyarakat setempat.

Dampak yang kemungkinan terjadi dalam aspek demografis terkait rencana pengembangan kawasan industri Takalar juga telah diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan persepsi masyarakat terkait hal tersebut, dapat dijelaskan dalam matriks dampak rencana pembangunan kawasan industri pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Demografi

No.	Stakeholder	Persepsi Terhadap Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)		Pencegahan
		Dampak Positif (+)	Dampak Negatif (-)	
1.	Masyarakat			
	Toko Adat/Budaya	- Pemberdayaan masyarakat setempat dan pendatang	- Potensi migrasi pekerjaan yang tidak terkontrol - Konflik kepentingan antara industri dan tradisi	- Menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan nilai-nilai budaya
	Petani/Peternak	- Peluang kerja dan kemitraan bisnis. - Peningkatan pendapatan	- Potensi kerusakan lahan dan menurunnya kesuburan tanah	- Menerapkan praktik industri ramah lingkungan - Pembentukan dialog antara industri dan petani peternak untuk merumuskan solusi bersama
	Nelayan	- Peningkatan peluang pekerjaan dan penghasilan - Potensi keterlibatan dalam industri baru	- Potensi kerusakan lingkungan rumput laut - Limbah industri dapat merusak kualitas air dan udara	- Terapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi - Libatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan industri
2.	Pemerintah			
	Aparatur Desa	- Pemberdayaan masyarakat melalui CSR industri	- Peningkatan permintaan layanan publik	- Penguatan kapasitas aparat desa dalam mengelola pertumbuhan dan perubahan.
	Pemerintah Kabupaten	- Penciptaan lapangan kerja di tingkat kabupaten	- Potensi konflik kebijakan dan regulasi	- Koordinasi yang erat antara pemerintah kabupaten dan desa
3.	Pemrakarsa			
	PT Berikat Nusantara	- Penciptaan Lapangan Kerja Baru	- Kemungkinan Konflik Lahan dan Sumber Daya	- Implementasi proses pembebasan lahan yang transparan dan adil

Tokoh adat/budaya memiliki peran sentral dalam mempertahankan identitas dan hak-hak tradisional suatu daerah. Dalam konteks pembangunan kawasan industri, kehadiran perwakilan dari tokoh adat dapat membawa dampak

positif berupa pemberdayaan masyarakat setempat dan pendatang. Namun, potensi migrasi pekerjaan yang tidak terkontrol dan konflik kepentingan antara industri dan tradisi. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, perlu dilakukan konsultasi aktif dengan tokoh adat dan masyarakat lokal, serta pengakuan hak tanah yang adil dan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan.

Pentingnya langkah-langkah pencegahan ini adalah untuk menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan nilai-nilai budaya. Keterlibatan aktif tokoh adat dan tokoh budaya dalam seluruh proses perencanaan dan implementasi adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung keberagaman kultural masyarakat setempat.

Dari sudut pandang petani peternak, kehadiran kawasan industri dapat membawa dampak positif seperti peningkatan peluang kerja dan kemitraan bisnis serta pendapatan. Namun, terdapat juga dampak negatif potensial, seperti potensi kerusakan lahan dan menurunnya kesuburan tanah. Untuk mencegah dampak tersebut, diperlukan penerapan praktik industri yang ramah lingkungan serta dibentuknya dialog antara pihak industri dan petani peternak untuk merumuskan solusi bersama.

Bagi nelayan rumput laut, hadirnya kawasan industri dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan penghasilan serta potensi terlibatnya dalam industri baru. Namun, terdapat risiko Kawasan industri dapat merusak habitat perikanan serta limbah yang nanti dihasilkan Kawasan industri dapat merusak kualitas air dan udara. Langkah pencegahan mencakup penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kawasan industri.

Penting untuk menerapkan kebijakan inklusif dan distributif guna memastikan bahwa manfaat pembangunan kawasan industri dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dukungan pelatihan, pendidikan, dan program diversifikasi ekonomi membantu mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan demografis dan struktural. Konsultasi aktif, pengawasan ketat, serta penerapan regulasi yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal juga menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menghormati keberagaman dan keberlanjutan masyarakat setempat.

Aparatur desa dan pemerintah kabupaten dapat merasakan dampak positif melalui pemberdayaan masyarakat melalui CSR industri dan penciptaan lapangan kerja di Tingkat kabupaten. Meskipun demikian, terdapat potensi dampak negatif seperti peningkatan permintaan layanan publik serta potensi konflik kebijakan dan regulasi. Langkah-langkah pencegahan melibatkan penguatan kapasitas aparat desa dalam mengelola pertumbuhan dan perubahan serta kordinasi yang era tantara pemerintah aparat desa dan pemerintah kabupaten.

Pemrakarsa atau developer pembangunan kawasan industri dapat membawa dampak positif signifikan pada demografi suatu daerah. Penciptaan lapangan kerja baru oleh kawasan industri dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mencegah dampak negatif tersebut, penting untuk menerapkan implementasi proses pembebasan lahan yang transparan dan adil. Secara keseluruhan, pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif dari pemrakarsa pembangunan kawasan industri sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positifnya diperkuat, dan dampak negatifnya diminimalkan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh komunitas lokal.

2. Pengetahuan Masyarakat tentang Kondisi Ekonomi terkait dengan Rencana Pembangunan KITA

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi ekonomi yang terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) adalah faktor internal yang berpengaruh besar terhadap persepsi mereka. Pemahaman masyarakat tentang bagaimana KITA dapat memengaruhi perekonomian lokal dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan pandangan mereka terhadap rencana pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana masyarakat memahami implikasi ekonomi dari proyek ini.

Sejumlah wawancara dengan penduduk setempat mengungkapkan variasi tingkat pengetahuan terkait kondisi ekonomi yang akan diakibatkan oleh rencana pembangunan KITA. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang baik tentang potensi dampak ekonomi positif dari proyek ini. Mereka mengakui bahwa KITA berpotensi membawa peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Takalar.

Sebagai contoh, salah seorang informan menyatakan,

"Saya yakin bahwa KITA akan membawa dampak positif pada perekonomian kami. Dengan hadirnya kawasan industri baru, akan ada lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi penduduk setempat."

Namun, ada juga sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami implikasi ekonomi dari rencana pembangunan KITA. Beberapa dari mereka memerlukan informasi tambahan atau klarifikasi terkait dengan bagaimana proyek ini dapat memengaruhi perekonomian lokal. Seorang responden mengungkapkan,

"Saya tertarik dengan proyek ini, tapi saya butuh lebih banyak informasi tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi pekerjaan dan bisnis di wilayah kami."

Dalam mengelola persepsi yang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan ekonomi masyarakat, penting untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pertemuan komunitas, atau publikasi materi informasi. Memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak ekonomi dari KITA merupakan langkah kunci untuk membangun dukungan yang kuat dan mengurangi kekhawatiran atau ketidakpastian yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat tentang kondisi ekonomi terkait dengan rencana pembangunan KITA adalah faktor kunci dalam membentuk persepsi mereka terhadap proyek ini. Dengan komunikasi yang efektif dan transparan, pemerintah dan pengembang proyek dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang kuat dan terinformasi tentang dampak ekonomi dari proyek KITA.

Hasil yang didapatkan dari wawancara dengan responden menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang terbentuk dari pengetahuan mereka terhadap dampak positif dan negatif dari rencana pembangunan kawasan industri takalar terkait dengan aspek ekonomi. Dampak positif dan negatif pada aspek ekonomi dapat dijelaskan dalam matriks Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Ekonomi

No.	Stakeholder	Persepsi Terhadap Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)		Pencegahan
		Dampak Positif (+)	Dampak Negatif (-)	
1.	Masyarakat			
	Toko Adat/Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kunjungan wisatawan ke toko adat - Potensi kerjasama dengan industri pariwisata - Peluang pendanaan dan dukungan untuk pelestarian budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi penurunan minat masyarakat terhadap budaya tradisional - Potensi pengaruh negatif dari perubahan tren industri budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan dalam kegiatan promosi budaya lokal - Partisipasi dalam acara dan festival budaya - Konsultasi aktif dengan tokoh adat dan masyarakat lokal - Implementasi kebijakan perlindungan budaya
	Petani/Peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan - Peningkatan akses pasar regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan konflik lahan dan peningkatan harga input - Dampak lingkungan seperti polusi dan degradasi tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kesepakatan lahan yang adil dan transparan - Implementasi praktik pertanian dan peternakan berkelanjutan
	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peluang pekerjaan dan penghasilan - Peningkatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi gangguan terhadap lahan budidaya rumput laut dan penurunan hasil produksi - Risiko polusi laut dan kerusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan regulasi ketat untuk pelestarian lingkungan laut - Program diversifikasi nelayan rumput laut ke sektor lain - Sistem pemantauan dan tanggap terhadap dampak lingkungan
2.	Pemerintah			
	Aparatur Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peluang pekerjaan di sektor pelayanan publik - Peningkatan dana desa dan anggaran pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi peningkatan tekanan kerja dan tanggung jawab - Kemungkinan konflik kepentingan antara pelayanan publik dan kepentingan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas - Diversifikasi sumber pendapatan desa

	Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Peningkatan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko dampak lingkungan dan konflik dengan masyarakat - Risiko terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada beberapa kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan regulasi dan standar lingkungan - Keterlibatan aktif dalam dialog dengan masyarakat - Program inklusif untuk distribusi manfaat ekonomi
3.	Pemrakarsa			
	PT Berikat Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal - Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko perubahan tata guna lahan dan konflik kepentingan - Kemungkinan resistensi atau penolakan dari masyarakat - Potensi dampak lingkungan dan sosial yang tidak terelakkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan praktik pengembangan berkelanjutan - Konsultasi publik dan dialog terbuka

Dari perspektif tokoh adat dan tokoh budaya pembangunan Kawasan industri nantinya meningkatkan kunjungan wisatawan ke lokasi adat, dapat berpotensi bekerjasama dengan industri pariwisata, serta peluang pendanaan dan dukungan untuk pelestarian budaya. Meskipun terdapat dampak positif, risiko penurunan minat masyarakat terhadap budaya tradisional. Pengaruh negatif dari perubahan tren industri budaya juga merupakan tantangan, terutama bagi tokoh adat dan tokoh budaya yang bersikap kritis terhadap kemungkinan perubahan struktural dan nilai-nilai tradisional. Langkah-langkah pencegahan yang diperlukan mencakup pelibatan dalam kegiatan promosi budaya lokal serta partisipasi dalam acara dan festival budaya. Untuk tokoh adat dan tokoh budaya, konsultasi aktif dengan tokoh adat dan masyarakat lokal serta implementasi kebijakan perlindungan budaya yang ada.

Petani peternak dan nelayan rumput laut memiliki peluang untuk merasakan dampak positif yang signifikan dari pembangunan kawasan industri. Peningkatan peluang pekerjaan dan penghasilan serta permintaan produk pertanian dan peternakan akan memberikan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat setempat. Kerjasama ini juga dapat membuka pintu peningkatan akses pasar regional dan

peningkatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan. Meskipun ada peluang positif, terdapat pula potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Risiko konflik lahan dan peningkatan harga input pertanian, menimbulkan dampak lingkungan seperti polusi udara dan degradasi tanah, adanya potensi gangguan terhadap lahan budidaya rumput laut dan penurunan hasil produksi serta resiko polusi laut dan kerusakan lingkungan nelayan rumput laut.

Untuk mencegah dampak negatif tersebut, langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perlu diambil. Pembentukan kesepakatan lahan yang adil dan transparan serta implementasi praktik pertanian dan peternakan berkelanjutan. Sementara itu, nelayan rumput laut perlu adanya regulasi ketat untuk pelestarian lingkungan laut, adanya program diversifikasi nelayan rumput laut ke sektor lain serta sistem pemantauan dan tanggap nantinya terhadap dampak lingkungan yang timbul. Langkah kunci dalam mewujudkan pencegahan dampak negatif adalah konsultasi aktif dengan masyarakat setempat, termasuk petani peternak dan nelayan rumput laut, dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan dan keprihatinan mereka diperhatikan dengan cermat. Konsultasi ini juga menciptakan ruang untuk berbagi pengetahuan lokal, pengalaman, dan solusi yang dapat memperkuat rencana pembangunan secara keseluruhan.

Pandangan pemerintah, terutama aparat desa, terhadap pembangunan kawasan industri umumnya menyoroti dampak positif seperti peningkatan peluang pekerjaan di sektor pelayanan publik. Dengan hadirnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dari kawasan industri, diharapkan dana desa dan anggaran pembangunan dapat meningkat. Dari perspektif pemerintah kabupaten, peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten (PAK) menjadi salah satu dampak positif yang diharapkan. Selain itu, peningkatan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan infrastruktur menjadi fokus, dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi dari kawasan industri dapat memberikan manfaat secara menyeluruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pandangan pemerintah juga mencerminkan kesadaran terhadap dampak negatif yang dapat timbul. Potensi peningkatan tekanan kerja dan tanggung jawab serta kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pelayan publik dan kepentingan pribadi. Selain itu, risiko dampak lingkungan dan konflik

dengan masyarakat serta terkonsentrasinya manfaat ekonomi pada beberapa kelompok akan sangat berpengaruh pada apa yang dirasakan masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang disarankan mencakup penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, diversifikasi sumber pendapatan desa, serta penerapan regulasi dan standar lingkungan. Penerapan regulasi dan standar lingkungan, keterlibatan aktif dalam dialog dengan masyarakat, serta program inklusif untuk distribusi manfaat ekonomi menjadi penting untuk dilakukan.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah dan aparatur desa perlu terlibat secara aktif dalam dialog dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait untuk merancang kebijakan yang seimbang. Penguatan kapasitas administrasi dan manajemen juga menjadi esensial untuk mengelola dampak yang kompleks dari pembangunan kawasan industri. Partisipasi aktif dalam proses perencanaan dan implementasi akan memastikan bahwa dampak ekonomi yang muncul dapat diarahkan secara positif, mendukung pertumbuhan yang inklusif, dan memastikan keberlanjutan di tingkat lokal dan kabupaten.

Pemrakarsa atau developer pembangunan kawasan industri membawa dampak positif yang signifikan. Investasi yang mereka bawa masuk ke daerah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang substansial. Pembangunan kawasan industri cenderung menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja, yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dampak negatif juga dapat muncul. Munculnya kawasan industri seringkali dapat beresiko terhadap tata guna lahan dan konflik kepentingan. Selain itu, adanya kemungkinan resistensi atau penolakan dari masyarakat. dampak lingkungan dan sosial yang tidak terelakkan juga menjadi keprihatinan. Penting bagi pemrakarsa atau developer untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial (CSR) dapat membantu meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif terhadap masyarakat setempat. Konsultasi aktif dan terbuka dengan pihak lokal membantu memahami kebutuhan dan keprihatinan masyarakat, sehingga solusi yang lebih inklusif dapat dihasilkan. Adopsi praktik pembangunan berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan diminimalkan seoptimal mungkin. Dalam keseluruhan, kesuksesan pembangunan kawasan industri tidak

hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga sejauh mana proyek tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan keberlanjutan masyarakat setempat. Pemrakarsa atau developer yang melakukan konsultasi public dan dialog terbuka dapat membantu menciptakan dampak positif yang lebih berkelanjutan dan merata bagi semua pihak.

Dengan memperhatikan dampak ekonomi dari berbagai perspektif ini, pembangunan kawasan industri dapat dilakukan dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan, memastikan bahwa manfaatnya merata dan memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat sambil memelihara kekayaan budaya yang unik. Keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah serta pemrakarsa menjadi kunci utama dalam mengelola dampak ini secara efektif. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis partisipasi, pemahaman mendalam terhadap realitas lokal, dan implementasi kebijakan yang bijaksana adalah kunci untuk memastikan bahwa dampak ekonomi dari pembangunan kawasan industri dapat menjadi daya dorong positif bagi keberlanjutan ekonomi.

Setelah mengidentifikasi dampak ekonomi yang terjadi terhadap rencana pembangunan kawasan industri Takalar, kemudian dapat diidentifikasi biaya sosial (*social cost*) yang dibayarkan oleh masyarakat Desa Laikang dan Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. *Social Cost* (Biaya sosial) yang dikeluarkan oleh masyarakat yang terdampak akibat dari aktivitas pembangunan kawasan industri Takalar. Biaya tersebut dihitung berdasarkan kehilangan keuntungan (*loss cost*) yang merupakan selisih dari keuntungan yang didapatkan sebelum aktivitas pembangunan dilakukan dan setelah aktivitas pembangunan kawasan berjalan. Hadi (2017) mendefinisikan biaya sosial (*social cost*) sebagai wujud atensi dan tanggungjawab atas berbagai dampak langsung dan tidak langsung operasional perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Salah seorang informan yang berprofesi sebagai petani rumput laut menjelaskan bahwa dampak yang kemungkinan dialami akibat pembangunan kawasan industri takalar adalah pencemaran air. Pencemaran air tersebut tentunya akan menyebabkan kerugian yaitu gagal panen. Seorang responden mengaku biasanya dapat menghasilkan 2 ton/bentangan dengan jumlah bentangan yang dimiliki adalah sebanyak 5 bentangan. Responden tersebut

memprediksi bahwa pencemaran air yang diakibatkan oleh pembangunan kawasan industri dapat membuat setengah dari bentangan yang ia miliki mengalami gagal panen. Perhitungan biaya sosial yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

Kasus yang sama juga terjadi pada seorang informan yang merupakan seorang petani cabai di desa Punaga. Responden tersebut berpendapat bahwa nantinya akan ada biaya lebih yang dikeluarkan akibat perpindahan lahan yang harus dilakukan akibat pembangunan kawasan industri diatas lahan yang ia miliki. Biaya kompensasi atas lahan yang ia miliki ditaksir sebesar Rp. 300.000.000/hektar, dengan uang tersebut petani harus mencari lahan baru yang dapat digunakan sebagai lahan untuk menanam cabai. Setelah terjadi pembangunan kawasan industri, informan memperkirakan harga lahan di Kecamatan Mangarabombang akan mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu petani membutuhkan biaya transportasi sebesar Rp. 1,000,000,- untuk mencari lahan baru, termasuk biaya komunikasi yang dikeluarkan dalam mencari lahan tersebut. Biaya tambahan selanjutnya merupakan biaya pembelian lahan pertanian baru yang diprediksi akan mengalami kenaikan. Biaya lahan baru ditaksir senilai Rp.350.000.000/hektar yang berarti lebih mahal daripada kompensasi yang diberikan terhadap lahan yang dimiliki.

Kasus-kasus yang dipaparkan oleh informan terkait dampak pembangunan kawasan industri yang dilihat dari aspek sosial ekonominya dapat dilihat dalam tabel biaya sosial (*social cost*) sebagai berikut:

Tabel 18. Biaya Sosial terhadap dampak demografis pembangunan kawasan industri Takalar pada Petani/Peternak dan Nelayan Desa Punaga dan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, 2023.

No.	Stakeholder	Dampak Sosial (Persepsi masyarakat)	A. Biaya yang dikeluarkan (Sebelum pembangunan)	B. Biaya yang dikeluarkan (Setelah Pembangunan)	Biaya Sosial (A-B)
	Petani/Peternak	<ul style="list-style-type: none"> Potensi kerusakan lahan dan menurunnya kesuburan tanah 	Rp. 300.000.000	Rp.351.000.000	Rp. 51.000.000
	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Potensi kerusakan lingkungan rumput laut 	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
Total					Rp. 56.000.000

Sumber: Hasil Analisis dari Informan Petani dan Nelayan Rumput Laut, 2023.

Biaya sosial diatas merupakan biaya estimasi yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada informan di lokasi penelitian. Dengan memahami konsekuensi potensial yang kemungkinan terjadi dapat memberikan wawasan kepada pihak berwenang untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks analisis biaya sosial (*social cost*) terhadap biaya yang dikeluarkan individu petani dan nelayan rumput laut terhadap pembangunan Kawasan industri takalar (KITA) yang menyebabkan mereka mengalami kerugian disisi finansial. Jika perusahaan ingin mendapat citra positif dari masyarakat, Perusahaan harus mengeluarkan biaya sosial untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menjaga sumberdaya yang mereka miliki demi keamanan finansial mereka, sehingga perusahaan dimata masyarakat memiliki kepedulian terhadap mereka. Hendarti (2006) menuturkan bahwa biaya sosial (*social cost*) yang dikelurkan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keungan mereka. Terlihat pada Tabel 18, biaya sosial (*social cost*) yang dikeluarkan oleh petani dan nelayan rumput laut akibat kerusakan lahan dan menurunnya kesuburan tanah adalah sebesar Rp. 56.000.000,- sehingga masyarakat mengharapkan pihak perusahaan untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut. Dengan kebijakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan akan mendapatkan citra yang baik. Citra positif membantu membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah. Dengan menjaga hubungan yang baik, perusahaan dapat mendapatkan dukungan dan kerjasama yang diperlukan untuk suksesnya proyek pembangunan.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Kondisi Sosial-Budaya terkait dengan Rencana Pembangunan KITA

Pengetahuan masyarakat tentang kondisi sosial-budaya yang terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) memegang peran penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap proyek ini. Pemahaman masyarakat tentang bagaimana KITA dapat memengaruhi aspek sosial dan budaya dari komunitas mereka dapat mempengaruhi tingkat dukungan dan pandangan mereka terhadap rencana pembangunan.

Pada beberapa wawancara dengan informan, terlihat variasi tingkat pengetahuan terkait kondisi sosial-budaya yang akan terpengaruh oleh rencana pembangunan KITA. Beberapa informan menunjukkan pemahaman yang baik terkait potensi dampak positif dan negatif dari proyek ini terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat Takalar.

Salah satu responden menekankan,

"Saya yakin bahwa KITA akan membawa perubahan positif bagi komunitas kami. Namun, kita juga harus memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi budaya kami tetap terjaga dalam proses ini."

Pernyataan ini mencerminkan kepedulian responden terhadap pemeliharaan dan penghormatan terhadap warisan budaya lokal.

Namun, ada juga sejumlah responden yang mungkin membutuhkan informasi tambahan atau klarifikasi terkait dengan bagaimana proyek ini akan memengaruhi aspek sosial dan budaya dari komunitas mereka. Seorang responden mengungkapkan,

"Saya ingin memahami lebih lanjut tentang bagaimana KITA akan berdampak pada kehidupan sehari-hari dan tradisi kami di Takalar."

Dalam mengelola persepsi yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan tentang kondisi sosial-budaya, langkah penting adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui dialog terbuka, pertemuan komunitas, atau penyediaan materi informasi yang mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait dampak proyek terhadap aspek sosial dan budaya di wilayah tersebut. Memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang dampak sosial-budaya dari KITA adalah langkah penting dalam membangun dukungan yang kuat dan meminimalkan kekhawatiran atau ketidakpastian yang tidak perlu.

Secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat tentang kondisi sosial-budaya terkait dengan rencana pembangunan KITA adalah faktor penting dalam membentuk persepsi mereka terhadap proyek ini. Dengan komunikasi yang efektif dan transparan, pemerintah dan pengembang proyek dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang kuat dan terinformasi tentang dampak sosial-budaya dari proyek KITA.

Responden juga memiliki persepsi terhadap dampak positif dan negatif terkait dengan aspek sosial-budaya pada rencana pembangunan kawasan industri Takalar. Persepsi tersebut tentunya tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat tentang rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang dan Desa Punaga. Berikut merupakan matriks dampak rencana pembangunan kawasan industri terhadap aspek sosial budaya pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Matriks Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri terhadap Aspek Sosial-Budaya

No.	Stakeholder	Persepsi Terhadap Dampak Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)		Pencegahan
		Dampak Positif (+)	Dampak Negatif (-)	
1.	Masyarakat			
	Toko Adat/Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang pendanaan dan dukungan untuk pelestarian budaya - Peningkatan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi konflik lahan dan pergeseran budaya tradisional - Risiko komodifikasi budaya dan deformasi makna budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan aktif tokoh adat dan tokoh budaya dalam perencanaan pembangunan - penerapan kebijakan pelestarian budaya - program edukasi serta pertukaran budaya
	Petani/Peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peluang pasar untuk produk pertanian dan peternakan - Peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi peningkatan harga input dan biaya produksi - Potensi konflik antargenerasi dan hilangnya pengetahuan tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kesepakatan dan regulasi lahan yang adil - Program pendidikan dan pelatihan budaya bagi generasi muda
	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya nelayan - Pemberdayaan komunitas nelayan untuk menjaga warisan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi terjadinya komodifikasi budaya laut dan kehilangan nilai-nilai lokal - Kemungkinan perubahan struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan regulasi untuk melindungi kearifan lokal dan tradisi maritim - Program pelestarian dan dokumentasi budaya laut

2.	Pemerintah			
	Aparatur Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan desa dan dana pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi konflik dan resistensi dari masyarakat - Risiko terhadap kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan akses 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan edukasi masyarakat
	Pemerintah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik - Peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan terjadinya perubahan sosial dan budaya - Risiko marginalisasi kelompok masyarakat tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kebijakan tata ruang yang jelas - Pengawasan dan audit terhadap implementasi kebijakan
3.	Pemrakarsa			
	PT Berikat Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur sosial dan fasilitas umum - Peluang kemitraan dengan komunitas lokal dan kegiatan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi perubahan pola hidup dan nilai-nilai budaya - Risiko ketidaksetaraan akses terhadap manfaat pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik dan partisipasi masyarakat - Implementasi program pengembangan komunitas - Partisipasi aktif dalam pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai tradisional

Tokoh adat dan tokoh budaya dapat merasakan dampak positif melalui peningkatan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya lokal. Dukungan untuk pendanaan dan dukungan untuk pelestarian budaya juga dapat menjadi kontribusi positif. Meskipun demikian, terdapat potensi dampak negatif seperti potensi konflik lahan dan pergeseran budaya tradisional serta resiko komodifikasi budaya atau perubahan nilai guna menjadi nilai ekonomi terhadap budaya yang ada dan deformasi atau perubahan bentuk budaya juga menjadi keprihatinan. Langkah-langkah pencegahan melibatkan keterlibatan aktif tokoh adat dan tokoh budaya dalam perencanaan pembangunan, penerapan kebijakan pelestarian budaya, dan program edukasi serta pertukaran budaya.

Petani peternak dan nelayan rumput laut dapat merasakan dampak positif melalui peningkatan peluang pasar untuk produk pertanian dan peternakan serta peningkatan akses pasar dan nilai tambah produk juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Peningkatan visibilitas dan apresiasi terhadap budaya nelayan serta adanya pemberdayaan komunitas nelayan untuk menjaga

warisan budaya. Namun, terdapat potensi dampak negatif seperti potensi peningkatan harga input dan biaya produksi, serta potensi terjadinya komodifikasi budaya laut dan kehilangan nilai-nilai lokal. Konflik sosial seperti adanya konflik antargenerasi dan hilangnya pengetahuan tradisional serta perubahan struktur sosial dan hierarki dalam masyarakat nelayan atau pesisir menjadi perhatian.

Langkah-langkah pencegahan melibatkan pembentukan kesepakatan dan regulasi lahan yang adil serta program Pendidikan dan pelatihan budaya bagi generasi muda. Untuk nelayan rumput laut, penerapan regulasi untuk melindungi kearifan lokal dan tradisi maritim serta program pelestarian dan dokumentasi budaya laut yang ada.

Aparatur desa dan pemerintah kabupaten dapat merasakan dampak positif melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dana pembangunan serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup dan akses terhadap layanan juga dapat menjadi kontribusi positif. Meskipun demikian, terdapat potensi dampak negatif seperti adanya konflik dan resistensi dari masyarakat serta resiko terhadap kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan akses. Kemungkinan terjadinya perubahan sosial dan budaya serta resiko marginalisasi kelompok masyarakat tertentu juga menjadi keprihatinan. Langkah-langkah pencegahan melibatkan penyuluhan dan edukasi untuk masyarakat. Pembentukan kebijakan tata ruang yang jelas serta pengawasan dan audit terhadap implementasi kebijakan.

Pemrakarsa atau developer pembangunan kawasan industri dapat memberikan dampak positif melalui peningkatan infrastruktur sosial dan fasilitas umum serta peluang kemitraan dengan komunitas lokal dan kegiatan budaya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, terdapat potensi dampak negatif seperti potensi perubahan pola hidup dan nilai-nilai budaya serta resiko ketidaksetaraan akses terhadap manfaat pembangunan menjadi keprihatinan. Langkah-langkah pencegahan melibatkan konsultasi public dan partisipasi aktif dengan masyarakat setempat untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Implementasi program pengembangan komunitas masyarakat. Partisipasi aktif dalam pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai tradisional juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan keharmonisan dengan komunitas setempat.

5.2.2. Persepsi yang dipengaruhi oleh Faktor Eksternal

Persepsi merupakan interpretasi yang unik terhadap suatu situasi, bukan sekadar catatan factual mengenai situasi tersebut. Dengan kata lain, persepsi adalah suatu proses kognitif kompleks yang menghasilkan citra dunia yang bersifat khas, mungkin sedikit berbeda dari realitas objektif. Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di sekitarnya dan kondisi individual. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi persepsi melibatkan ukuran dan penempatan objek atau stimulus, dengan prinsip bahwa semakin besar atau lebih terkait suatu objek, semakin mudah dipahami. Interaksi faktor ini dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial luar kemudian menciptakan respons dalam bentuk tindakan. Dengan konsep ini, dalam konteks penelitian ini, persepsi diartikan sebagai respons atau pandangan masyarakat terhadap realitas atau peristiwa yang tengah terjadi di sekitar mereka (Catur, 2005).

Persepsi masyarakat terkait pengembangan kawasan industri menunjukkan kecenderungan positif terkait tingkat pengetahuan dan persetujuan terhadap pembangunan tersebut. Meskipun informasi dan transparansi mengenai rencana pengembangan dinilai cukup tinggi oleh masyarakat, namun masih sedikit di atas ambang batas klasifikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meski masyarakat telah mengetahui adanya rencana pembangunan kawasan industri, namun belum sepenuhnya mendapatkan sosialisasi yang memadai dari pemerintah.

1. Respon Masyarakat Tentang Perubahan Demografis terkait dengan Rencana Pembangunan KITA

Persepsi eksternal dalam konteks ini mengacu pada bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan merespons perubahan demografis yang terjadi sebagai akibat dari rencana pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KITA). Persepsi eksternal, yaitu pandangan dari luar komunitas lokal, memegang peran penting dalam menilai dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) terhadap perubahan demografis masyarakat. Respons dari masyarakat di luar wilayah Takalar memberikan wawasan berharga tentang bagaimana proyek ini dilihat secara lebih luas dan bagaimana perubahan demografis dianggap relevan.

Respon masyarakat terhadap perubahan demografis ini dapat sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang budaya, kondisi ekonomi, dan lokasi geografis. Beberapa masyarakat mungkin menyambut positif perubahan demografis ini, melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan kemajuan. Mereka mungkin melihat masuknya populasi baru sebagai sumber potensial tenaga kerja dan pelanggan untuk bisnis lokal. Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa sebagian masyarakat mungkin merasa cemas atau khawatir dengan perubahan demografis ini. Mereka mungkin khawatir akan terjadinya persaingan lebih ketat dalam hal sumber daya, lapangan kerja, atau infrastruktur. Menurut salah satu informan:

“...Saya sangat mendukung sebenarnya, tapi sangat disayangkan kalau tidak dibarengi sama pembangunan infrastruktur yang memadai karena infrastruktur yang menunjang semua ini bisa berjalan dengan lancar”

Pembangunan infrastruktur yang memadai tentunya berperan penting dalam perkembangan demografis suatu wilayah. *The term "general infrastructure" encompasses various elements such as transportation, healthcare, education, communication, and utilities.* Pada penelitian (Fathori, 2023) dinyatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah-wilayah terisolasi di kota sangat sedikit, sehingga pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan jalan dianggap tidak efisien. Oleh karena itu, disarankan agar alokasi dana besar tersebut dialihkan ke kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengembangan kawasan industri membawa peluang kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat merespons secara positif. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan lapangan kerja, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, permintaan tenaga kerja di kawasan industri dapat mengakibatkan masuknya pekerja dari daerah atau bahkan negara lain, yang mengarah pada perubahan demografis dan berpotensi mengubah komposisi penduduk. Salah seorang responden yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Laikang mengatakan bahwa:

“Nantinya bakalan banyak juga pendatang yang berdatangan untuk melamar kerja disini, kita sangat menghargai itu....”

Masyarakat memiliki respon yang positif terhadap adanya penambahan penduduk yang akan terjadi seiring dengan pembangunan kawasan industri. Penyerapan tenaga kerja yang bersifat besar-besaran tentunya akan mengundang banyak masyarakat dari luar desa tersebut yang berdatangan ke desa tersebut untuk bekerja di Kawasan Industri. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal tentunya menjadi hal yang sangat perlu agar dapat memicu daya saing masyarakat dalam peningkatan tenaga kerja. Menurut (Dariah, 2004) pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diiringi oleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti yang tercermin pada perubahan struktur ekonomi yang tidak diikuti oleh perubahan struktur tenaga kerja.

2. Respon Masyarakat Terhadap Dampak Rencana Pembangunan KITA dalam hal Perubahan Kondisi Ekonomi

Pembangunan kawasan industri diharapkan dapat menciptakan keanekaragaman dalam kehidupan ekonomi serta membuka peluang lapangan kerja baru. Kehadiran kawasan industri dianggap dapat memberikan peluang pekerjaan, termasuk dari sektor jasa dan perdagangan, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan secara keseluruhan.

Adanya kawasan industri yang berdekatan dengan pemukiman penduduk diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberadaan kawasan industri dianggap sebagai solusi untuk sebagian masyarakat dalam hal pencarian mata pencaharian. Dengan adanya kawasan industri, diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini menyebabkan perubahan dalam mata pencaharian masyarakat, di mana sebagian besar awalnya bekerja sebagai petani, tetapi dengan hadirnya kawasan industri, sebagian masyarakat beralih menjadi karyawan pabrik.

Dengan adanya rencana pembangunan kawasan industri masyarakat setuju akan di bangunnya Kawasan industri di daerah mereka. Mereka melihat peluang akan banyaknya sumber-sumber mata pencaharian baru.

“pasti akan semakin banyak orang yang datang dengan kebutuhan masing-masing. banyak cabang usaha yang saya bisa lakukan. seperti membuka warung makan, warung kopi, percetakan dan sebagainya.”

Di samping itu, kehadiran Kawasan Industri memberikan peluang tambahan bagi para ibu rumah tangga untuk memperoleh sumber keuntungan melalui berbagai peluang usaha yang dapat dijalankan. Dengan aktivitas para pekerja di Kawasan Industri, peluang usaha menjadi nilai tambah bagi sebagian masyarakat, yang mungkin membuka usaha seperti warung makan, warung kopi, laundry pakaian, dan kios-kios lainnya.

“bukan hanya nantinya penghasilan kami dari kegiatan pertanian saja tapi ada penghasilan lain dikarenakan akan banyak pendatang pastinya. dan itu sangat baik. saya bisa bikin warung makan, warkop atau gadde-gadde di dekat rumah”

Selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, perkembangan industri juga membawa dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Aspek ekonomi mencakup segala hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Interaksi sosial merupakan kehidupan bersama di dalam masyarakat, di mana lebih dari satu orang berkomunikasi satu sama lain dengan dimensi waktu (dahulu, sekarang, dan akan datang) serta tujuan tertentu.

3. Respon Masyarakat Terhadap Dampak Rencana Pembangunan KITA dalam hal Perubahan Kondisi Sosial-Budaya

Masyarakat di Desa Punaga dan Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tergolong sebagai masyarakat homogen yang terdiri dari penduduk asli. Hubungan sosial-budaya yang dibangun oleh mereka mencerminkan ciri kehidupan masyarakat pedesaan secara umum. Kehidupan sosial di kalangan masyarakat sangat akrab, baik dalam hubungan keluarga, tetangga, maupun pertemanan. Keakraban ini sering terwujud dalam bentuk saling tolong menolong dalam berbagai kegiatan. Seluruh kegiatan masyarakat tersebut merupakan bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama.

Sistem sosial budaya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang lebih bersifat abstrak dan dimensi yang lebih bersifat nyata atau konkret. Dalam konteks dampak pembangunan terhadap aspek sosial-budaya, banyak perhatian diberikan pada elemen-elemen yang bersifat konkret, seperti warisan sejarah,

situs bersejarah dengan nilai ilmiah, dan area dengan nilai geologis. Di sisi lain, aspek-aspek abstrak dalam sosial-budaya, seperti kelompok etnis, agama, atau kepercayaan, juga turut menjadi perhatian dalam konteks dampak pembangunan. (Suratmo, 2004)

Budaya dan nilai-nilai masyarakat lokal dapat memainkan peran besar. Petani yang sangat terikat dengan lingkungannya cenderung melihat pembangunan industri sebagai ancaman bagi ekosistem laut yang mereka lindungi. Seorang informan yang merupakan petani rumput laut berpendapat bahwa mereka memiliki tradisi dan warisan budaya yang dianggap terkait dengan mata pencaharian mereka. Dia khawatir bahwa kegiatan pembangunan industri akan mengakibatkan kepunahan tradisi tersebut

"Dari penjelasan yang saya dapat di balai desa, kegiatan pembangunan ini tidak akan mengganggu adat istiadat yang ada di desa. kami akan menolak jika adat istiadat kami terancam punah. Misalnya, maudu' lompoa itu kan acara yang sakral bagi masyarakat"

Pernyataan informan ini didukung oleh pernyataan dari seorang tokoh masyarakat adat di Desa Punaga yang menjelaskan tentang acara adat tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

"acara maudu' lompoa merupakan acara sakral masyarakat yang tidak boleh diganggu. kegiatan ini merupakan simbol pengharapan dan penolak bala bagi masyarakat. harapannya adalah ketika pembangunan kawasan industri ini tidak mengganggu kegiatan atau upacara ini. jika diganggu, kemungkinan besar masyarakat dan khususnya tokoh masyarakat tidak akan menyetujui pembangunan kawasan industri tersebut."

Masyarakat di Kecamatan Mangarabombang berharap agar kegiatan industri tidak mengganggu adat istiadat, nilai dan norma yang ada, misalnya perayaan Maudu' Lompoa. Para petani di Kecamatan Mangarabombang, khususnya di Desa Punaga, menganggap kegiatan ini sebagai simbol dan harapan bagi kelangsungan kegiatan pertanian mereka. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara petani dan masyarakat desa.

Aspek sosial dan budaya dalam kehidupan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan penduduk desa terhadap perencanaan pembangunan industri. Pelestarian cagar budaya menjadi langkah penting dalam menjaga warisan budaya yang mencerminkan tingkat dan perkembangan peradaban leluhur. Hal ini juga bertujuan untuk merawat nilai-nilai penting yang terkandung dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya

(Astuti et al., 2022). Data BPS Kabupaten Takalar (2019) menunjukkan bahwa mayoritas bahkan dapat dikatakan 100 % penduduk Kecamatan Mangarabombang adalah beragama Islam, dengan jumlah sarana peribadatan 66 mesjid dan 17 mushollah.

Sub komponen lingkungan sosial budaya yang diprediksi akan mengalami perubahan mendasar pada lingkungan sekitar lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar adalah terutama pada perubahan kelembagaan masyarakat, tradisi masyarakat dan nilai masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem stratifikasi sosial, diferensiasi, dan diversifikasi dalam masyarakat (Suratmo, 2004). Masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mengambil keputusan bersama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Tokoh masyarakat seringkali memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan pandangan mengenai kebutuhan serta masalah masyarakat. Peran mereka mencakup pengumpulan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu informan memaparkan bahwa:

"ada, para tokoh-tokoh masyarakat seperti para orang yang kita tuakan, tokoh adat, kita serta anak muda sekarang yang dapat mengkoordinir anggotanya....."

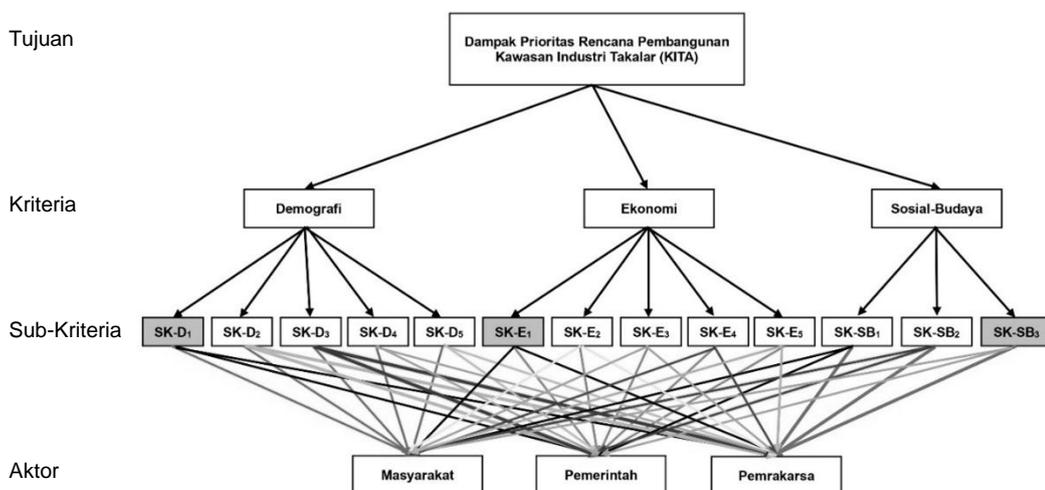
Masyarakat percaya dengan adanya kordinasi yang baik antara para penengambil keputusan dan masyarakat lainnya akan memudahkan mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara bersama-sama. Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa dengan adanya Kawasan Industri Takalar, kelembagaan baru semakin berkembang, dan hubungan sosial semakin erat, baik antar masyarakat maupun dengan pihak pemerintah setempat. Hal ini sejalan dengan persepsi masyarakat bahwa kehadiran KITA tidak menimbulkan konflik sosial atau memecah belah solidaritas masyarakat.

5.3. Analisis Dampak Prioritas dari Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)

Untuk menentukan dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dengan menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Dalam rangka melihat dampak prioritas yang akan nampak pada saat pembangunan KITA, sejumlah kriteria akan ditetapkan sebagai

pertimbangan. Ketiga kriteria tersebut akan menjadi panduan dalam menganalisa dampak prioritas dari rencana pembangunan. Dari kriteria ini dilihat dari kategori aspek sosial dalam melihat rencana kegiatan pembangunan, yakni: 1) demografi, 2) ekonomi, dan 3) sosial-budaya. Setelah itu dianalisa menggunakan aplikasi *software* EC (*Expert Choice*) 2011, kemudian diperoleh hasil seperti pada Gambar 8 berikut ini:

- SK-D_n : Sub-Kriteria Demografi
- SK-E_n : Sub-Kriteria Ekonomi
- SK-SB_n : Sub-Kriteria Sosial-Budaya
- n : Jumlah Sub-Kriteria



Gambar 8. Diagram Model AHP Dampak Prioritas Rencana Pembangunan KITA.

Gambar hierarki dampak prioritas rencana pengembangan kawasan industri Takalar menunjukkan bahwa dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah setempat, dan pihak pemrakarsa. Berikut ini merupakan penjelasan mendetail mengenai dampak prioritas terkait aspek demografis, ekonomi, dan sosial-budaya yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah setempat, dan pemrakarsa:

5.3.1. Masyarakat

a) Demografi



Gambar 9. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Demografi pada Stakeholder Masyarakat, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **demografi** pada **masyarakat** adalah sebagai berikut: **komposisi penduduk** memiliki nilai bobot **0,306** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **partisipasi angkatan kerja** dengan nilai bobot **0,219**. Selanjutnya, **kepadatan penduduk** memiliki nilai bobot **0,213** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **pertumbuhan penduduk** dengan nilai bobot **0,144** sebagai prioritas keempat. **Mobilitas penduduk** mendapatkan nilai bobot **0,119** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,05** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria demografi pada pihak stakeholder masyarakat adalah **Komposisi Penduduk**.

b) Ekonomi



Gambar 10. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Ekonomi pada Stakeholder Masyarakat, 2023

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **ekonomi** pada **masyarakat** adalah sebagai berikut: **tingkat pendapatan masyarakat** memiliki nilai bobot **0,322** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **penggunaan fasilitas umum dan sosial** dengan nilai bobot **0,218**. Selanjutnya, **kelompok dominan** memiliki nilai bobot **0,192** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **pola pemanfaatan sumber daya alam (sda)** dengan nilai bobot **0,163** sebagai prioritas keempat. **Pengambilan keputusan masyarakat** mendapatkan nilai bobot **0,106** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,05** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria ekonomi pada pihak stakeholder masyarakat adalah **Tingkat Pendapatan Masyarakat**.

c) Sosial-Budaya



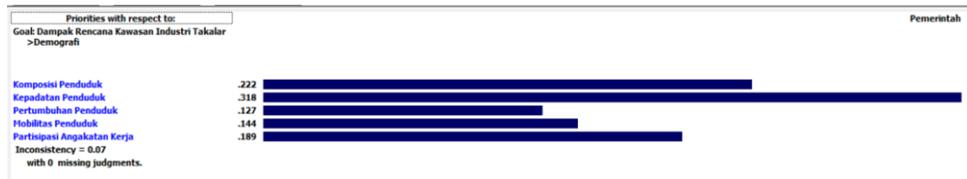
Gambar 11. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Masyarakat, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **sosial-budaya** pada **masyarakat** adalah sebagai berikut: **budaya maudu' lompoa** memiliki nilai bobot **0,413** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **nilai dan norma masyarakat** dengan nilai bobot **0,327** sebagai prioritas kedua. Prioritas ketiga dan yang terendah yaitu **kondisi adat istiadat** memiliki nilai bobot **0,260**. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,05** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar

(KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria Sosial-Budaya pada pihak stakeholder masyarakat adalah **Budaya Maudu' Lompoa**.

5.3.2. Pemerintah

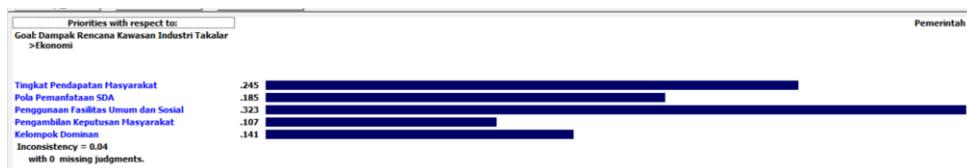
a) Demografi



Gambar 12. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Demografi pada Stakeholder Pemerintah, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **demografi** pada **pemerintah** adalah sebagai berikut: **kepadatan penduduk** memiliki nilai bobot **0,318** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **komposisi penduduk** dengan nilai bobot **0,222**. Selanjutnya, **partisipasi angkatan kerja** memiliki nilai bobot **0,189** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **mobilitas penduduk** dengan nilai bobot **0,144** sebagai prioritas keempat. **Pertumbuhan penduduk** mendapatkan nilai **0.127** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,07** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria demografi pada pihak stakeholder pemerintah adalah **Kepadatan Penduduk**.

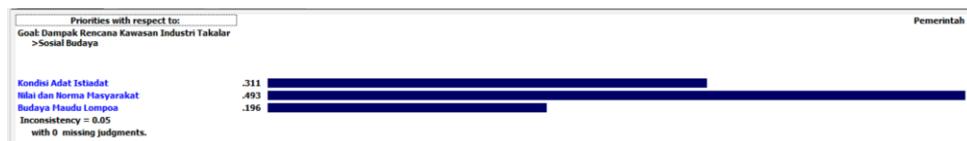
b) Ekonomi



Gambar 13. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemerintah, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **ekonomi** pada **pemerintah** adalah sebagai berikut: **penggunaan fasilitas umum dan sosial** memiliki nilai bobot **0,323** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **tingkat pendapatan masyarakat** dengan nilai bobot **0,245** sebagai prioritas kedua. Selanjutnya, **pola pemanfaatan sumber daya alam (sda)** memiliki nilai bobot **0,185** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **kelompok dominan** dengan nilai bobot **0,141** sebagai prioritas keempat. **Pengambilan keputusan masyarakat** mendapatkan nilai bobot **0,107** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,04** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria ekonomi pada pihak stakeholder pemerintah adalah **Penggunaan Fasilitas Umum dan Sosial**.

c) Sosial-Budaya



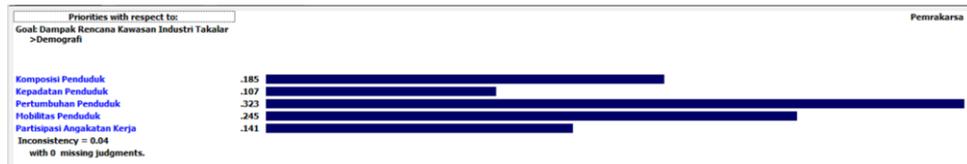
Gambar 14. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemerintah, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **sosial-budaya** pada **pemerintah** adalah sebagai berikut: **nilai dan norma masyarakat** memiliki nilai bobot **0,493** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **kondisi adat istiadat** dengan nilai bobot **0,311** sebagai prioritas kedua. Prioritas ketiga dan yang terendah yaitu **budaya maudu' lompoe** memiliki nilai bobot **0,196**. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,05** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa

dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria Sosial-Budaya pada pihak stakeholder pemerintah adalah **Nilai dan Norma Masyarakat**.

5.3.3. Pemrakarsa

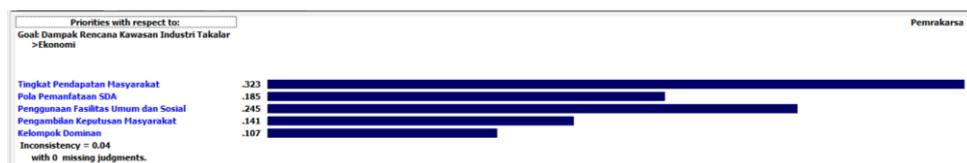
a) Demografi



Gambar 15. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Demografi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **demografi** pada **pemrakarsa** adalah sebagai berikut: **pertumbuhan penduduk** memiliki nilai bobot **0,323** sebagai prioritas tertinggi, keudian diikuti oleh **mobilitas penduduk** dengan nilai bobot **0,245**. Selanjutnya, **komposisi penduduk** memiliki nilai **0,185** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **partisipasi angkatan kerja** dengan nilai bobot **0,141** sebagai prioritas keempat. **kepadatan penduduk** mendapatkan nilai bobot **0,107** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,04** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria Demografi pada pihak stakeholder Pemrakarsa adalah **Pertumbuhan Penduduk**.

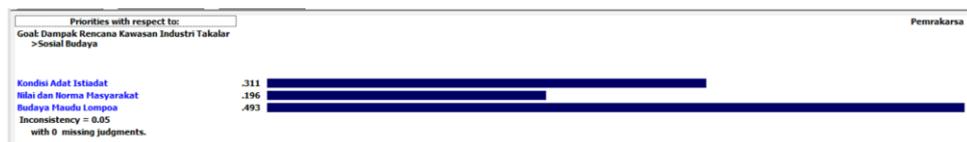
b) Ekonomi



Gambar 16. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Ekonomi pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **ekonomi** pada **pemrakarsa** adalah sebagai berikut: **tingkat pendapatan masyarakat** memiliki nilai bobot **0,323** sebagai prioritas tertinggi, kemudian diikuti oleh **penggunaan fasilitas umum dan sosial** dengan nilai bobot **0,245**. Selanjutnya, **pola pemanfaatan sumber daya alam (sda)** memiliki nilai bobot **0,185** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **pengambilan keputusan masyarakat** dengan nilai bobot **0,141** sebagai prioritas keempat. **Kelompok dominan** mendapatkan nilai bobot **0,107** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,04** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria Ekonomi pada pihak stakeholder Pemrakarsa adalah **Tingkat Pendapatan Masyarakat**.

c) Sosial-Budaya



Gambar 17. Urutan dampak prioritas berdasarkan kriteria Sosial-Budaya pada Stakeholder Pemrakarsa, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak prioritas terhadap rencana pembangunan kawasan industri berdasarkan kriteria **sosial-budaya** pada **pemrakarsa** adalah sebagai berikut: **budaya maudu' lompoa** memiliki nilai bobot **0,493** sebagai prioritas tertinggi, selanjutnya **kondisi adat istiadat** dengan nilai bobot **0,311** sebagai prioritas kedua. Prioritas ketiga dan yang terendah yaitu **nilai dan norma masyarakat** memiliki nilai bobot **0,196**. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,05** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa

dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan kriteria Sosial-Budaya pada pihak stakeholder Pemrakarsa adalah **Budaya Maudu' Lompoa**.

5.3.4. Kombinasi Dampak Prioritas dari Rencana Pembangunan KITA

a) Demografi



Gambar 18. Urutan Kombinasi dampak prioritas berdasarkan kriteria Keseluruhan Informan pada Demografi, 2023.

Gambar diatas bahwa urutan dampak yang memiliki prioritas berdasarkan kriteria **demografi** pada **keseluruhan informan** adalah sebagai berikut: **komposisi penduduk** memiliki nilai bobot **0,306** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **partisipasi angkatan kerja** dengan nilai bobot **0,219**. Selanjutnya, **kepadatan penduduk** memiliki nilai bobot **0,213** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **pertumbuhan penduduk** dengan nilai bobot **0,144** sebagai prioritas keempat. **Mobilitas penduduk** mendapatkan nilai **0,119** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,01** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan Ekonomi adalah **Komposisi Penduduk**. Dampak ini di anggap masyarakat akan sangat berpengaruh pada Tingkat pendapatan mereka. Masyarakat sangat menanti di bangunya Kawasan industri di daerah mereka karena akan membuka banyak cabang-cabang pendapatan yang akan mereka hasilkan, sehingga mereka sangat mendukung adanya pembangunan ini.

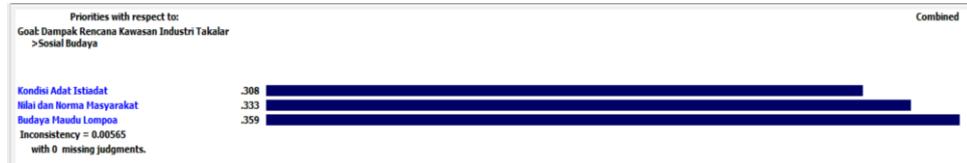
b) Ekonomi



Gambar 19. Urutan Kombinasi dampak prioritas berdasarkan kriteria Keseluruhan Informan pada Ekonomi, 2023.

Gambar diatas menunjukkan bahwa urutan dampak yang memiliki prioritas berdasarkan kriteria **ekonomi** pada **keseluruhan informan** adalah sebagai berikut: **tingkat pendapatan masyarakat** memiliki nilai bobot **0,322** sebagai prioritas tertinggi, diikuti oleh **penggunaan fasilitas umum dan sosial** dengan nilai bobot **0,218**. Selanjutnya, **kelompok dominan** memiliki nilai bobot **0,192** sebagai prioritas ketiga, diikuti oleh **pola pemanfaatan sumber daya alam (sda)** dengan nilai bobot **0,163** sebagai prioritas keempat. **Pengambilan keputusan masyarakat** mendapatkan nilai bobot **0,106** sebagai prioritas kelima dan prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,00921** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan Ekonomi adalah **Tingkat Pendapatan Masyarakat**. Dampak ini dianggap oleh masyarakat akan sangat berpengaruh pada Tingkat pendapatan mereka. Masyarakat sangat menanti di bangunya Kawasan industri di daerah mereka karena akan membuka banyak cabang-cabang pendapatan yang akan mereka hasilkan, sehingga mereka sangat mendukung adanya pembangunan kawasan industri ini.

c) Sosial-Budaya



Gambar 20. Urutan Kombinasi dampak prioritas berdasarkan kriteria Sosial-Budaya pada Keseluruhan Informan, 2023.

Gambar 20. diatas menunjukkan bahwa urutan dampak yang memiliki prioritas berdasarkan kriteria **sosial-budaya** pada **keseluruhan informan** adalah sebagai berikut: **budaya maudu' lompoa** memiliki nilai bobot **0,359** sebagai prioritas tertinggi, kemudian **nilai dan norma masyarakat** dengan nilai bobot **0,333** sebagai prioritas kedua. **Kondisi adat istiadat** mendapatkan nilai bobot **0,308** sebagai prioritas ketiga sebagai prioritas terendah. Dalam konteks ini, dihasilkan nilai bobot *inconsistency* sebesar **0,00565** menunjukkan bahwa hasil analisis valid karena nilai *inconsistency* atau CR (*Consistency Ratio*) kurang dari sebesar 0,1. Berdasarkan nilai bobot diatas dapat disimpulkan bahwa dampak prioritas dari rencana pembangunan Kawasan industri Takalar (KITA) yang dianggap akan sangat berdampak pada masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang berkaitan dengan Sosial-Budaya adalah **Budaya Maudu' Lompoa**. Dampak ini akan sangat dikhawatirkanoleh masyarakat yang akan mengganggu upacara atau kegiatan keagamaan ini. Namun, masyarakat mengaggap pembangunan ini akan melihat dan memperhatikan kegiatan kebudayaan yang sering dilaksanakan di desa shingga masyarakat pada umumnya akan mendukung rencana pembangunan Kawasan industri ini.

5.4. Kesesuaian Antara Harapan Masyarakat dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar

Rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) menjadi sorotan penting dalam hal pengembangan ekonomi wilayah. Keberhasilan proyek ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana rencana pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Harapan-harapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga keberlanjutan lingkungan. Evaluasi

berkala dapat membantu mengidentifikasi potensi pergeseran atau perubahan dalam harapan masyarakat dan memungkinkan adaptasi rencana pembangunan sesuai kebutuhan (Zhang et al., 2021). Ini dapat mencakup perubahan prioritas masyarakat atau evolusi kebijakan publik yang relevan, Oleh karena itu, analisis kesesuaian antara harapan masyarakat dan rencana pembangunan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penting untuk mengingat bahwa proses kesesuaian tidak hanya berfokus pada sejauh mana harapan masyarakat terpenuhi, tetapi juga sejauh mana proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti dampak lingkungan, inklusi sosial, dan pemberdayaan ekonomi juga harus diperhitungkan dalam evaluasi kesesuaian (Feng et al., 2020).

Harapan masyarakat terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar telah terungkap melalui serangkaian wawancara dan survei yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu harapan yang menonjol adalah penciptaan lapangan kerja yang signifikan. Harapan masyarakat adalah bahwa proyek ini akan membuka peluang kerja bagi warga setempat, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, peningkatan pendapatan juga menjadi harapan utama. Masyarakat berharap bahwa adanya kawasan industri baru akan meningkatkan pendapatan per kapita, membawa dampak positif terhadap daya beli, dan secara keseluruhan, meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan peningkatan pendapatan, diharapkan masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan produk konsumen, yang pada gilirannya akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan infrastruktur juga merupakan salah satu harapan masyarakat yang signifikan. Masyarakat berharap bahwa dengan adanya kawasan industri baru, akan ada peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas umum seperti jalan, listrik, dan air bersih. Infrastruktur yang memadai menjadi landasan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sehingga pemenuhan harapan ini akan menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan proyek.

Harapan masyarakat juga tidak terlepas dari kekhawatiran terhadap lingkungan. Beberapa Informan menyuarakan keinginan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan kawasan industri ini dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Mereka berharap bahwa proyek ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga tidak membahayakan lingkungan sekitar. Ini mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya alam, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan.

Dalam mengevaluasi kesesuaian antara harapan masyarakat dan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar, penting untuk memperhatikan aspek hukum dan regulasi. Rencana ini harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dan pemilik tanah dihormati. Pengelolaan lahan dan pemilihan lokasi proyek juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat, termasuk pengelolaan konflik dan mitigasi dampak sosial.

Selain itu, pendekatan partisipatif juga dapat menjadi sarana untuk memastikan kesesuaian antara harapan masyarakat dan rencana pembangunan. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi kekhawatiran mereka dengan lebih efektif. Keterlibatan aktif masyarakat juga dapat memperkuat rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka dalam kesuksesan proyek.

Evaluasi kesesuaian juga harus mempertimbangkan analisis risiko dan keberlanjutan jangka panjang. Diperlukan identifikasi dan mitigasi potensi risiko yang mungkin muncul selama dan setelah pembangunan kawasan industri. Selain itu, proyek ini juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya bersifat sementara. Keterlibatan ahli dan konsultan yang kompeten dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan hukum juga dapat memperkuat analisis kesesuaian. Dengan melibatkan perspektif multidisipliner, kita dapat memastikan bahwa semua aspek penting telah dipertimbangkan secara komprehensif.

Penting untuk mencatat bahwa analisis kesesuaian ini tidak hanya bersifat statis, tetapi harus dinamis dan terus dievaluasi selama berlangsungnya proyek. Perubahan dalam kebutuhan masyarakat atau kondisi lingkungan dapat memerlukan penyesuaian rencana pembangunan untuk memastikan kesesuaian terus berlanjut.

Melalui analisis kesesuaian antara harapan masyarakat dan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemerintah, industri, dan masyarakat setempat. Dengan memenuhi harapan-harapan masyarakat, proyek ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan wilayah tersebut. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa harapan dan kekhawatiran masyarakat dipahami dan diakomodasi sepanjang proses pembangunan. Mengadakan forum terbuka dan dialog terstruktur dapat menjadi cara yang efektif untuk memfasilitasi komunikasi yang konstruktif (Li et al., 2018).

5.4.1. Harapan Masyarakat terhadap rencana pembangunan KITA

Evaluasi terhadap persepsi masyarakat terhadap rencana pengembangan Kawasan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mendukung pembangunan kawasan industri, mereka masih belum siap menghadapi dampaknya terkait pengelolaan lingkungan dan pengalaman serta pendidikan masyarakat di bidang industri. Masyarakat melihat bahwa kawasan industri akan memberikan dampak positif dan dapat meningkatkan status sosial mereka (Setiawan, 2016).

Masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu terkait adanya kawasan industri di sekitar mereka. Beberapa prioritas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan meliputi:

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan taraf hidup, kesehatan, pendidikan, dukungan beragama, nilai moral, dan aspek kesejahteraan sosial lainnya.
2. Perusahaan diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja dan peluang berusaha..

3. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan, perumahan, dan fasilitas umum..
4. Perusahaan mampu meningkatkan jaminan hukum, ketertiban dan keamanan.
5. Perusahaan diharapkan dapat mengelola lingkungan hidup dengan lebih bijaksana, sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang aman dan nyaman saat tinggal dan berdekatan dengan kawasan industri..

5.4.2. Kesesuaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar

Menurut Kementerian Perindustrian, pembangunan kawasan industri harus memenuhi beberapa kriteria teknis, termasuk kesesuaian tata ruang, infrastruktur industri yang memadai, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi. Penetapan kawasan peruntukan industri juga harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, kepadatan permukiman, dan kesesuaian dengan rencana pembangunan industri daerah.

Kawasan Industri Takalar (KITA) baru-baru ini diumumkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020, menandakan kelanjutan dari rencana pembangunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengalokasikan lahan seluas 750 hektare untuk kawasan industri ini, yang diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 15.000 orang. Fokus utama KITA adalah pada industri pengolahan aluminium dan tembaga.

Kesesuaian rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar dengan kebijakan tingkat nasional hingga lokal menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa investasi industri berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2024 secara tegas menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong industrialisasi berbasis investasi. Dalam kerangka ini, sinergi dengan pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi strategi pokok. Sentra Industri Kecil Menengah (IKM), termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola oleh koperasi dan lembaga ekonomi sosial berbasis masyarakat, diutamakan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri.

Kebijakan ini juga mengarahkan perhatian pada pengembangan Kawasan Industri (KI) di luar Pulau Jawa, termasuk Kawasan Industri Takalar. Kesembilan KI prioritas ini menjadi fokus dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, dan kolaborasi antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tindakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang kuat.

Selain aspek kebijakan nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 juga memainkan peran sentral dalam memastikan kesesuaian antara Kawasan Industri Takalar dengan visi pengembangan wilayah. Pasal 68 Poin h dari Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut memberikan pedoman jelas terkait pengembangan Kawasan Industri (KI) skala besar di wilayah Metropolitan Mamminasata. Poin h ini dengan spesifik mengidentifikasi Kawasan Industri Takalar (Kabupaten Takalar) sebagai salah satu lokasi kawasan industri besar yang direncanakan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar tahun 2012-2031 juga memasukkan Kawasan Peruntukan Industri ke dalam pertimbangannya. Pasal 38 dari rencana ini secara tegas menyebutkan bahwa Kawasan Industri Takalar (KITA) di Kecamatan Mangarabombang, termasuk Desa Punaga dan Desa Laikang, termasuk dalam kategori kawasan peruntukan industri sedang. Hal ini menegaskan komitmen dari tingkat kabupaten untuk mendukung pengembangan kawasan industri.

Hal ini terdapat kesesuaian yang kuat antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pembangunan Kawasan Industri Takalar. Langkah-langkah ini diambil dengan mempertimbangkan harapan dan aspirasi masyarakat setempat, serta dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, kerja sama regional, dan diversifikasi perekonomian daerah. Dengan langkah ini, diharapkan Kawasan Industri Takalar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar serta wilayah sekitarnya.

Untuk memastikan keberhasilan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kesesuaian rencana pembangunan dengan tujuan dan kepentingan masyarakat setempat serta regulasi yang berlaku. Rencana pembangunan harus memenuhi

standar-standar yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti lingkungan, infrastruktur, dan sosial. Dalam hal ini, studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan dapat menjadi instrumen penting dalam menilai kesesuaian rencana pembangunan KITA dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penilaian kesesuaian juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan peraturan yang mengatur pembangunan kawasan industri. Sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mematuhi persyaratan yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak masyarakat atau pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam implementasi rencana pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Saat berbicara dengan sejumlah informan yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA), banyak dari masyarakat serta LSM di Kecamatan Manggarabombang menekankan pentingnya kesesuaian rencana pembangunan dengan berbagai aspek yang ada. Salah satu informan, menyampaikan bahwa aspek hukum dan regulasi adalah dasar yang sangat penting. Dia menegaskan bahwa rencana pembangunan KITA harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak masyarakat atau pihak terkait lainnya. Informan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut **Pak Agus Dg Bella** yang menjadi informan dalam percakapan ini menekankan bahwa aspek lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Dia mengatakan bahwa evaluasi kesesuaian harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan KITA dan bagaimana rencana tersebut dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Informan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan industri dan pelestarian lingkungan. Selain pelestarian lingkungan, Informan juga ini memberikan wawasan berharga. Dia menggarisbawahi betapa pentingnya memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kawasan industri telah dipertimbangkan dalam rencana pembangunan. Selain itu, dia menyoroti bahwa infrastruktur yang ada harus dikelola dengan efisien dan diperbarui sesuai kebutuhan.

Pendapat dari informan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesesuaian rencana pembangunan KITA dengan berbagai aspek yang beragam. Mereka menggarisbawahi bahwa evaluasi kesesuaian harus menjadi proses yang cermat, holistik, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Keselarasan dengan hukum, lingkungan, dan infrastruktur adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan kawasan industri dengan baik. Dalam situasi ini, penting juga untuk mengundang ahli dan konsultan yang terampil di berbagai bidang terkait, termasuk hukum, lingkungan, dan infrastruktur. Mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan standar terbaik dan kepentingan masyarakat.

Kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar dengan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar sangat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan industri tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek seperti zonasi, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan perlu diintegrasikan dengan baik. Dengan menjamin kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar dan Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar, potensi konflik dapat diminimalkan, dan implementasi proyek dapat berjalan dengan lancar.

Dalam evaluasi kesesuaian ini, pihak terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Takalar, harus melakukan analisis yang teliti dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat setempat, ahli lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan aktif dari seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pembangunan kawasan industri memberikan manfaat optimal bagi masyarakat setempat, sambil mengurangi sejauh mungkin dampak negatif yang mungkin timbul.

Selain itu, dalam mengevaluasi kesesuaian, penting untuk memperhitungkan potensi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang dari pembangunan Kawasan Industri Takalar. Studi telah menunjukkan bahwa proyek industri yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan jangka panjang (Bennet et al., 2019). Dengan demikian, penting untuk memahami dan menyesuaikan rencana pembangunan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan risiko

yang terkait dengan proyek ini juga menjadi krusial, dan perlu dilakukan identifikasi serta mitigasi potensi risiko, termasuk risiko lingkungan dan sosial. Hal ini harus menjadi fokus utama dalam perumusan rencana pembangunan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan lancar dan minim risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan jangka panjang.

Dalam mengimplementasikan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar, penting juga untuk memastikan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat. Proses partisipatif memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proyek ini memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dan menjadi lebih berhasil dalam jangka panjang.

Dalam hal ini, komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang rencana pembangunan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan kekhawatiran mereka, akan memastikan bahwa proses berjalan dengan integritas dan akuntabilitas.

Selain itu kesesuaian rencana pembangunan KITA, penting juga untuk mempertimbangkan analisis keberlanjutan jangka panjang. Proyek ini harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Penting untuk memperhatikan bahwa keberlanjutan proyek juga tergantung pada pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Studi telah menunjukkan bahwa integrasi praktik berkelanjutan dalam rencana pembangunan industri dapat menghasilkan manfaat jangka panjang yang signifikan (Feng et al., 2020). Oleh karena itu, perlu ada strategi yang jelas untuk meminimalkan dampak lingkungan, mempromosikan efisiensi sumber daya, dan mempertahankan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri. Sedangkan mengevaluasi kesesuaian rencana pembangunan, penting untuk mempertimbangkan aspek inklusifitas dan keadilan sosial. Masyarakat yang terlibat dalam proyek harus mencerminkan keberagaman populasi setempat. Pemastian keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat akan membantu memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari proyek didistribusikan secara adil.

Analisis risiko juga harus mencakup skenario yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk perubahan kondisi ekonomi atau lingkungan yang dapat mempengaruhi proyek. Dengan melakukan analisis risiko yang komprehensif, proyek dapat mempersiapkan strategi mitigasi yang efektif dan meminimalkan potensi dampak negatif, serta mempertimbangkan aspek etika dan keadilan dalam evaluasi kesesuaian rencana pembangunan. Pemastian bahwa semua keputusan diambil dengan integritas dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proyek ini.

Dalam konteks proyek industri, jaminan kualitas dan keamanan produk atau output yang dihasilkan adalah faktor penting. Rencana pembangunan harus memastikan bahwa semua proses produksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak membahayakan kesehatan atau keamanan masyarakat, dan untuk mempertimbangkan potensi kerja sama antara proyek industri dengan inisiatif dan program pembangunan lokal atau nasional. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat dampak positif dari proyek ini.

Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala diterapkan untuk memantau kemajuan proyek. Melalui pemantauan yang cermat, potensi masalah atau ketidaksesuaian dengan rencana dapat diidentifikasi dan ditangani secara proaktif. Selain itu, aspek teknologi dalam rencana pembangunan. Memanfaatkan teknologi terbaru dan praktik industri terbaik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalkan dampak lingkungan dari operasi kawasan industri Takalar (KITA).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Kecamatan Mangarabombang merupakan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada darat dan laut. Sebagian besar masyarakat mengusahakan bidang pertaniannya di wilayah daratan seperti pengelolaan sawah, cabai, beternak dan juga di wilayah lautan seperti budidaya rumput laut. Kegiatan pembangunan kawasan industri melibatkan beberapa aktifitas pembangunan seperti pengembangan prasarana industri. Jenis prasarana industri yang akan dibangun dalam zona peruntukan prasarana yaitu: 1) zona industri, 2) zona prasarana industri, 3) zona sarana penunjang, dan 4) zona ruang terbuka hijau. Desa Laikang dan Desa Punaga menjadi lokasi tapak pertama pembangunan kawasan industri yang terdiri dari tahap pra-konstruksi dan tahap proses konstruksi.
2. Melihat bagaimana masyarakat di Kecamatan Mangarabombang, terutama petani di Desa Punaga dan Desa Laikang, merespons rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar memiliki dampak signifikan pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Respons ini tercermin dalam persepsi positif mayoritas masyarakat, yang menunjukkan persetujuan terhadap pembangunan kawasan industri. Masyarakat melihat potensi desa mereka sebagai pusat pertumbuhan melalui transformasi menjadi Kawasan Industri Takalar (KITA). Mereka percaya bahwa keberadaan kawasan industri akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan di sekitar Kecamatan Mangarabombang. Dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya bagi petani, kawasan industri diharapkan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Punaga dan Desa Laikang. Ini meliputi peningkatan pendapatan petani dan penyediaan sarana serta prasarana sosial, ekonomi, dan budaya. Mayoritas informan sepakat bahwa rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan status sosial-

ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, para petani rata-rata mendukung pengembangan rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dengan harapan utama bahwa Kawasan Industri Takalar (KITA) akan memberdayakan tenaga kerja lokal dan mengatasi masalah pengangguran.

3. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan 13 dampak prioritas terhadap rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA). Tiga Belas prioritas dampak tersebut terbagi dari 3 kriteria. Kriteria masyarakat adalah yakni, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, dan partisipasi angkatan kerja. kemudian kriteria pemerintah yakni tingkat pendapatan masyarakat, pola pemanfaatan sumber daya alam, penggunaan fasilitas umum dan sosial, pengambilan keputusan masyarakat, dan kelompok dominan. sedangkan untuk kriteria yakni kondisi adat istiadat, nilai dan norma masyarakat dan budaya *maudu' lompoa*. Berdasarkan penggabungan ketujuh informan dengan menggunakan metode AHP dan dengan *software ExpertChoice 11* dihasilkan strategi prioritas untuk meningkatkan kualitas. Prioritas dampak rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) pada kriteria Demografi dengan nilai bobot 0,246 adalah Komposisi Penduduk, kemudian kriteria Ekonomi dengan nilai bobot 0,299 adalah Tingkat Pendapatan Masyarakat, dan kriteria Sosial-Budaya dengan nilai bobot 0,359 adalah Budaya *Maudu' Lompoa*.

6.2. Saran

Saran terkait dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar (KITA) adalah sebagai berikut.

1. Saran untuk Pemerintah
 - a. Mengikutsertakan warga dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan industri untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial.
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri, tidak hanya kepada perangkat desa ataupun tokoh masyarakat, tetapi juga seluruh masyarakat yang terkena dampak langsung kawasan industri.

- c. Memperhatikan lingkungan sekitar kawasan industri yang terkena limbah pabrik yang telah terbangun dan merencanakan pembangunan kawasan industri yang ramah lingkungan.
 - d. Melaksanakan program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya terfokus kepada sektor investasi, namun lebih menekankan adanya upaya dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
2. Saran untuk Masyarakat
- a. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat dalam menanggapi adanya rencana pengembangan kawasan industri sehingga pemerintah mengetahui apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
 - b. Sikap terbuka dan memiliki keinginan untuk berkembang dengan mengetahui peran pembangunan yang positif dan negatif adanya kawasan industri yang bertujuan untuk membangun daerah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Astuti, E. Y., Krisnugrahanto, P. A., & Ayushitarum, L. (2022). A Sustainable Approach to Endangered Heritage: The Batujaya Temples, Indonesia. *The Historic Environment: Policy & Practice*, 13(4), 509–525. <https://doi.org/10.1080/17567505.2022.2149128>
- Bennet, M., Cramer, L., & Gonzalez, M. (2019). Community expectations of mining and energy development: Definitions, integration, and decision-making. *Natural Resources Forum*, 43(3), 148–161.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (3rd ed.). Allyn and Bacon.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Burdge, R. J. (1994). *A Conceptual Approach to Social Impact Assessment: Collection of Writings by Rabel J. Burdge and Colleagues*. Social Ecology Press.
- Capra, F. C. (2001). *Jaring-Jaring Kehidupan Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan* (1st ed.). Fajar Pustaka Baru.
- Catur, N. (2005). *Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Taman Suropati dalam Upaya Melestarikannya Sebagai Taman Kota Bersejarah di Jakarta*. Pertanian Bogor.
- Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1999). *Doing Qualitative Research* (2nd ed.). Sage Publications. Inc.
- Dariah, A. R. (2004). Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(2), 121–133. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/131>
- Dirdjuwono, R. W. (2014). *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya* (2nd ed.). Biografika.
- Djazifah, N. (2012). *Proses Perubahan Sosial Di Masyarakat*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fardani, A. (2012). *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur)* [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
- Fathori, F. (2023). ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL. *Multifinance*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.61397/mfc.v1i1.15>
- Feng, Q., Fang, C., & Xie, X. (2020). Exploring the Spatial–Temporal Features of Social Equity in China’s New Urbanization Process. *Sustainability*, 12(20), 8304.

- Firdausi, P. N. (2018). Analisis Dampak Sosial Perencanaan Revitalisasi Pasar Wates Wetan, Ranuyoso, Lumajang. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 1(2), 173–191. <https://www.bjss.ub.ac.id/index.php/bjss/article/view/74>
- Giridharan, R., Madhavi, D. G., & Mahbub, R. (2017). Community Perceptions and Attitudes Towards Urban Renewal: A Case Study of Bangalore, India. *Procedia Engineering*, 180, 760–768.
- Goeltenboth, F. (1990). *Subsistence Agriculture Improvement: Manual for The Humid Tropics*. Margraf Scientific Publishers.
- Ibrahim, J. T. (2002). *Sosiologi Pedesaan*. UMM Malang.
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. (2021). Analisa Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Klasifikasi Carvalho dalam Menentukan Potensi Ekonomi Kabupaten Takalar. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 2(3), 29–40.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/ PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Kementerian Perindustrian, 1 (2010).
- Kusmayadi. (2013). *Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung*.
- Kwanda, T. (2000). *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*. <https://dimensi.petra.ac.id/index.php/ars/article/view/15727>
- Marimin. (2004). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk* (1st ed.). Grasindo.
- Mazidah, N. (2011). Relijiusitas dan Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1(1), 17–34. <https://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/7>
- Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pub. L. No. 14, 1 (1994). <https://www.regulasip.id/book/5303/read>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (T. E. Rohidi & Mulyarto, Eds.). Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). Pt Remaja Rosdakarya.
- Mutolib, A., Yonariza, & Rahmat, A. (2019). Faktor Penarik dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat. *Journal of Tropical Upland Resources (J. Trop. Upland Res.)*, 1(1), 161–170. <https://doi.org/10.23960/jtur.vol1no1.2019.20>
- Nurkholis, N. (2015). *Dampak Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Serta Lingkungan Sekitar Industri*. Universitas Negeri Medan.
- Parid, M., & Alif, A. L. S. (2020). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Tafhim Al-'Ilmi*, 11(2), 266–275.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 18, 1 (2020).

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>

- Purba, J. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial* (J. Purba, Ed.; 2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Purwanto, R. D. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal Di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim*. Universitas Sriwijaya.
- Richards, M. (2012). *Penilaian Dampak Sosial secara Partisipatif untuk Proyek dan Program Sumberdaya Alam*. <https://www.forest-trends.org/publications/penilaian-dampak-sosial-secara-partisipatif-untuk-proyek-dan-program-sumberdaya-alam/>
- Riduwan. (2008). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Warisman, Ed.; 6th ed.). Alfabeta.
- Saaty, T. L. (1986). *Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks*. PT Pustaka Binman Pressindo.
- Setiawan, F. (2016). *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Sentolo, kabupaten Kulon Progo*. Universitas Gadjah mada.
- Singh, Y. K. (2006). *Fundamental of research methodology and statistics*. New Age International (P) Limited.
- Soekanto, S. (1986). *Fungsionalisme imperatif*. Rajawali.
- Soemarwoto, O. (1991). *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Sudirman, H. (2016). *Hidup Selaras dengan Alam - Suatu Studi Fenomenologi tentang Kehidupan Komunitas Adat Sando Batu di Kabupaten Sidenreng Rappang [Agribisnis]*. Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumiyati, Sutiarmo, L., Windia, I. W., & Sudira, P. (2011). Aplikasi Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Strategi Pengembangan Subak. *Agritech*, 31(2), 138–145.
- Suratmo, G. (2004). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan . *Gajah Mada University Press*, 1–342.
- Suyatno, B., & Sutinah. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Syahrudin. (2011). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisas*, 17(1), 31–43. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i1.624>
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian* (3rd ed.). UR Press.

- Tarigan, R. (2016). *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi* . Bumi Aksara.
- Warjiyono. (2010). Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan Expert Choice dalam Menunjang Keputusan Pemilihan Perumahan. *Jurnal Paradigma*, 12(2), 130–138.
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/3478>
- Wiryohandoyo, S. (2002). *Perubahan Sosial*. PT Tiara Wacana Yogya.
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi: Konsep dan Teori* (A. Gunarsa, Ed.; Cetakan 1). PT Refika Aditama.
- Zhang, Y., Yin, W., & Wang, Q. (2021). Public Perception of Industrial Projects: A Case Study of a Petrochemical Project in China. *Sustainability*, 13(12), 6647.

LAMPIRAN

PROFIL INFORMAN

Syarifuddin Dg. Sore (Informan 1):

Syarifuddin Dg. Sore. seorang aparatur Desa Punaga berusia sekitar 45 tahun, menjadi informan utama dalam penelitian ini. Dengan tanggung jawab administratif yang beliau miliki, beliau membawa perspektif yang khusus terkait kebijakan dan regulasi di tingkat desa. Pengalamannya sebagai bagian dari struktur desa memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana keputusan pembangunan Kawasan Industri Takalar di Desa Punaga dapat memengaruhi aspek administratif dan pemerintahan lokal.

Karaeng Kaseng (Informan 2):

Sebagai tokoh adat di Desa Punaga berusia sekitar 52 tahun, Karaeng Kaseng memiliki peran yang penting dalam melestarikan tradisi adat, khususnya kegiatan Maudu Lompoa. Dengan pengetahuan yang beliau miliki terhadap kearifan lokal masyarakat di Desa Punaga, beliau dapat menyajikan perspektif budaya yang kaya dan berharga. Pengetahuannya tentang tradisi adat memberikan dimensi tambahan dalam memahami bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat setempat.

Agus Dg. Bella (Informan 3):

Agus Dg. Bella, seorang petani peternak berusia sekitar 54 tahun, menjadi informan kunci terkait aspek ekonomi dalam penelitian ini. Kepemilikannya atas pemilikan usaha peternakan ayam yang terbesar di Desa Punaga memberikan wawasan tentang bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi sektor pertanian dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Edi (Informan 4):

Edi, seorang petani dan nelayan rumput laut berusia sekitar 33 tahun, memberikan gambaran langsung dari sektor pertanian dan hasil dari budidaya rumput laut di Desa Punaga. Dengan keterlibatannya dalam kegiatan pertanian dan budidaya rumput laut, beliau dapat memberikan pandangan yang praktis dan mendalam tentang dampak pembangunan, baik dari segi lingkungan maupun sosial ekonomi masyarakat di Desa Punaga terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).

Ibu Ramlawati S.Pd. (Informan 5):

Ibu Ramlawati S.Pd., seorang Guru SD yang berusia sekitar 40 tahun. Ibu Ramlawati memberikan perspektif unik dari aspek demografis khususnya dunia pendidikan di Desa Laikang. Dengan pengalaman sebagai pendidik dan warga desa, pandangannya mencerminkan bagaimana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dapat mempengaruhi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baharuddin Dg. Tojeng (Informan 6):

Baharuddin Dg. Tojeng, seorang petani dan peternak berusia sekitar 60 tahun di Desa Laikang, memiliki hubungan karib dengan bapak Syarifuddin Dg. Sore. Keterlibatannya dalam penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Laikang dan bagaimana interaksi antar warga dapat mempengaruhi persepsi terhadap pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA).

Rusman (Informan 7):

Rusman, seorang petani rumput laut berusia sekitar 32 tahun di Desa Laikang. Bapak Rusman memberikan penjelasan terkait perspektif masyarakat Desa Laikang dari sektor kelautan. Bapak Rusman bekerja sebagai petani rumput laut dan memberikan wawasan tentang dampak pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) terhadap sektor ini khususnya dalam budidaya rumput laut dan bagaimana pembangunan KITA dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat di Desa Laikang.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini dirancang untuk keperluan penelitian akademis dalam rangka penyusunan tesis sebagai persyaratan memperoleh gelar magister di Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup. Data dan informasi yang diberikan dianggap sebagai kontribusi berharga dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan terbuka. Tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah, dan apresiasi besar atas partisipasi dan perhatiannya dalam memberikan informasi. Terima kasih banyak.

A. Aturan Wawancara

- Pedoman wawancara pada penelitian ini merupakan pedoman wawancara kualitatif
- Pertanyaan bersifat mendalam atau terbuka sehingga informan dapat menyampaikan sudut pandang dan pendapat lebih luas
- Pertanyaan dapat disesuaikan dan bisa saja melebar atau berubah namun tetap sesuai dengan kaidah wawancara

B. Pertanyaan wawancara (Bahasa disesuaikan dengan bahasa setempat)

Identitas Informan

1. Nama :
2. Desa / Kelurahan :
3. Dusun :
4. Umur :
5. Jenis Kelamin : L / P
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Status Kependudukan :
9. Lama tinggal di desa ini : tahun (dari tahun
hingga tahun)

I. Pengetahuan umum masyarakat terhadap rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang rencana dibangunnya Kawasan Industri Takalar (KITA)?
2. Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang rencana dibangunnya Kawasan Industri Takalar (KITA)?
3. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)?

4. Apakah masyarakat pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah atau pihak swasta tentang rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat desa memiliki latar belakang pendidikan atau pernah mengikuti penyuluhan/pelatihan khusus di bidang industri?

II. Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) terhadap kondisi demografis masyarakat

1. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada komposisi penduduk di desa setempat?
2. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada kepadatan penduduk di desa setempat?
3. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada pertumbuhan penduduk di desa setempat?
4. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada mobilitas penduduk di desa setempat?
5. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja di desa setempat?
6. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada tingkat pengangguran di desa setempat?

III. Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat

1. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat di desa setempat?
2. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada pola pemanfaatan sumber daya alam di desa setempat?
3. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak

pada penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di desa setempat?

4. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat di desa setempat?
5. Sepengetahuan Bapak/Ibu apakah di desa setempat ada kelompok individu yang dominan? apakah rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada hal tersebut?

IV. Pengetahuan masyarakat tentang dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat

1. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan bagaimana rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada kondisi adat istiadat masyarakat di desa setempat?
2. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan bagaimana rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada nilai dan norma masyarakat di desa setempat?
3. Menurut informasi yang Bapak/Ibu dapatkan bagaimana rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) akan berdampak pada keberlangsungan budaya *maudu' lompoa* yang biasa di desa setempat?

V. Respons masyarakat tentang dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dalam kehidupan sosial masyarakat

1. Apa reaksi Bapak/Ibu ketika mengetahui akan dibangun kawasan industri Takalar (KITA) di wilayah tempat tinggal?
2. Apakah Bapak/Ibu ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA)?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan adanya rencana pengembangan kawasan industri akan memunculkan lembaga/organisasi sosial oleh masyarakat?
4. Apakah Bapak/Ibu memiliki kemauan untuk terlibat dalam organisasi sosial bersama dengan masyarakat terkait dengan pengembangan Kawasan Industri Takalar (KITA)?

VI. Respons masyarakat tentang dampak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar (KITA) dalam pengembangan ekonomi masyarakat

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengembangan kawasan industri akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dampak pemanfaatan lahan menjadi industri terhadap harga tanah di sekitarnya?
3. Bagaimana jika pemerintah memanfaatkan lahan dari warga untuk melakukan pengembangan kawasan industri (melalui proses ganti rugi)?
4. Apakah Bapak/Ibu berminat untuk beralih usaha apabila Kawasan Industri Takalar jadi dibangun?

VII. Pedoman FGD

Topik 1: Harapan Masyarakat terhadap rencana pembangunan KITA

Pertanyaan Kunci:

1. Apa harapan Bapak/Ibu terkait dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar?
2. Apa harapan masyarakat terhadap rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar?
3. Apa saran Bapak/Ibu terkait dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar?

Topik 2: Kesesuaian Rencana Pembangunan Kawasan Industri Takalar

Pertanyaan Kunci:

1. Apakah persiapan pemerintah dalam merencanakan adanya pembangunan mega proyek telah sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah lokasi pengembangan Kawasan Industri Takalar ini sesuai?
3. Apakah rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar telah sesuai dengan ekspektasi Bapak/Ibu?

DOKUMENTASI

1. Observasi Lahan Pertanian



Desa Laikang



Desa Punaga

Petani Rumput Laut





Desa Laikang





Desa Punaga

Lahan Kosong





Desa Laikang





Desa Punaga

Situs Budaya





Desa Punaga

Wisata Pantai





**Wisata Pantai Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo,
Desa Laikang**





Wisata Pantai Barugaya, Desa Punaga

2. Wawancara





